

**POLA KEMISKINAN DI PERMUKIMAN NELAYAN  
KELURAHAN DONGKOP KOTA TANJUNGPINANG**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh :

**GATOT WINOTO**  
L4D 003 095



**PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2006**

**POLA KEMISKINAN DI PERMUKIMAN NELAYAN  
KELURAHAN DOMPAK KOTA TANJUNGPINANG**

Tesis diajukan kepada  
Program Studi Magister Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro  
Semarang

Oleh :

**GATOT WINOTO**  
L4D 003 095

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis  
Tanggal 18 Maret 2006

Dinyatakan Lulus  
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, April 2006

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

Ir. Hadi Wahyono, MA

Ir. Parfi Khadiyanto, MSL

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Magister Pembangunan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka. Apabila dalam Tesis saya ternyata ditemui duplikasi, jiplakan (plagiat) dari Tesis orang lain/ Institusi lain, maka saya bersedia menerima sanksi untuk dibatalkan kelulusan saya dan saya bersedia melepaskan gelar Magister Teknik dengan penuh rasa tanggung jawab.

Semarang, Maret 2006

**GATOT WINOTO**  
NIM L4D 003 095

**To study life you don't have to go on creative junkets and waste public funds. Study life where you live, it's more productive, and cheaper, too.**

**(Vladimir Voinovich, 1932)**

Kupersembahkan kepada:

- Ayah dan Bunda tercinta
- Istriku dan anak-anakku tersayang
- Masyarakat Kota Tanjungpinang dan Kelurahan Dompok pada khususnya

## ABSTRAK

*Kemiskinan perkotaan merupakan salah satu isu pembangunan yang kompleks dan kontradiktif. Kemiskinan dipandang sebagai dampak ikutan dari pembangunan dan bagian dari masalah dalam pembangunan. Tipologi kemiskinan perkotaan dicirikan oleh berbagai dimensi baik dimensi sosial maupun ekonomi yang lebih beragam serta memiliki kebijakan yang rumit. Hal tersebut membentuk pola kemiskinan yang berbeda-beda.*

*Sebagai ibukota Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang tidak dapat terhindar dari fenomena kemiskinan. Kemiskinan ini terbentuk dari ketimpangan antar kawasan dimana kawasan dengan aktivitas perkotaan (aktivitas perdagangan dan jasa) yang minim menyebabkan pendapatan masyarakatnya rendah. Permukiman nelayan di Kelurahan Dompok, Kota Tanjungpinang, merupakan salah satu kawasan yang minim aktivitas perkotaan. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Fakta menunjukkan terdapat 147 keluarga nelayan dari 311 keluarga di Kelurahan Dompok yang hidup dibawah garis kemiskinan Hal ini menyebabkan 47,3 % penduduk di Kelurahan Dompok masuk ke dalam kategori keluarga prasejahtera dan sejahtera satu.. Sehingga apabila dibiarkan, dapat menyebabkan terjadinya keterbatasan akses menuju sarana dan prasarana publik, tingkat pendidikan penduduk di permukiman nelayan di Kelurahan Dompok tidak meningkat, dan lingkungan yang semakin buruk yang berdampak pada ketidaklayakan huni permukiman nelayan di Kelurahan Dompok.*

*Oleh karena itu, untuk menyikapi kondisi kemiskinan yang terjadi di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang ini maka perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pola kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang. Dan sasaran yang perlu dicapai adalah identifikasi kondisi kawasan di permukiman nelayan, identifikasi karakteristik masyarakat di permukiman nelayan, menganalisis pola kemiskinan di pemukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang; serta menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok.*

*Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis yang dilakukan meliputi analisis indikasi kemiskinan, pola kemiskinan dan faktor-faktor penyebab kemiskinan. dan teknik analisis berupa analitik deskriptif. Adapun tahapan penelitian ini adalah persiapan, pengumpulan data primer dan sekunder, pengolahan dan pengkajian data, serta merumuskan hasil kajian melalui kegiatan analisis deskriptif kualitatif. Pengumpulan data primer berupa kuisisioner dilakukan kepada sejumlah 40 KK keluarga miskin sebagai sampel keluarga miskin..*

*Berdasarkan temuan yang didapat di lapangan, maka disimpulkan bahwa pola kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok adalah (a) kemiskinan sub-sistensi, dicirikan oleh pendapatan masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok yang rendah, kondisi perumahan yang tidak layak dan minimnya fasilitas air bersih; (b) kemiskinan perlindungan, dimana lingkungan permukiman nelayan yang buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi) dan tidak adanya jaminan atas hak pemilikan tanah; (c) kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk (rendah), terbatasnya keahlian yang menyebabkan terbatasnya kesadaran atas hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok adalah faktor ekonomi, Sosial, dan faktor pendidikan.*

*Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat dengan cara meminimalisir faktor penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat setempat. Sehingga apabila pengentasan kemiskinan dilakukan sesuai dengan pola kemiskinan dan faktor penyebabnya masing-masing, maka upaya tersebut dapat lebih optimal.*

**Kata kunci: kemiskinan, kemiskinan perkotaan, permukiman nelayan**

## ABSTRACT

*Urban poverty is one of the development issue that are complex and contradictive. Poverty seemed as the following affect of the development and part of the problem of it. Some dimensions, such as social dimension, feature the tipology of the development and economic which is more complicated and has policy. That's makes different poverty pattern.*

*As the capital of Riau Archipelago, Tanjungpinang City cannot protected from poverty phenomenon. This poverty is formed from the lameness between ares where the minim activity there (commerce activity and service) causing the low economical level of the society. The fisherman's settlement in Dompok Subdistrict, Tanjungpinang City, is one of the minim urban activity areas. The majority of the citizen is a fisherman. This ini causing the majority of the citizen of Dompok subdistrict categorized as poor family. Based on the data on Tanjungpinang City major office, there are 147 fisherman's families from 316 families in Dompok subdistrict, which is under poorness life. Mean of them cannot fulfill their requirement of food (eat once a day). If it is let, can cause limited accessibility into public's medium and pre-medium, the level of citizen's education in fisherman settlement in Dompok Subdistrict can not rise, and the environment which is getting worse and affect to non-appropriate of living there.*

*Therefore, in order to respond to the poverty condition that is happened in the fisherman's settlement Dompok Subdistrict, need to do some research which is aimed to know the poverty pattern, and the factors that affecting to the poverty in fisherman's settlement Dompok subdistrict Tanjungpinang City. And the purpose that is need to be gained is to study area condition in the fisherman's settlement, to study society's characteristics there, poverty pattern analysis in the fisherman's settlement Dompok Subdistrict Tanjungpinang City, and also studying the factors that causing poverty there.*

*This research is a descriptive research by describe the society's characteristic in fisherman settlement through the responden with a number of 40 families head from poor families. The steps of this research are the preparation, the gathering of primary and secondary datas, the processing and studying datas, and formulating the result of study through descriptive qualitative analysis activity. This research used poverty indication analysis, poverty pattern analysis and then analysis to identify factors that cause poverty in that area.*

*Based on the invention in the fiels, can be conclude that the poverty patterns in the fisherman's settlement Dompok Subdistrict are (a) sub-sistension of poverty, is features by the low level of society's earnings in the fisherman's settlement Dompok subdistrict, the unproper condition of the settlement condition ant the minim of clean water facilities; (b) lack of protection, where the worst environment of the fisherman's settlement (sanitation, medium of dismissal of the garbage, pollution) and there is no guarantee of ground ownership rights; (c) lack of understanding, the worst (low) level of understanding rights, ability and potency to effort change. Factors that are influencing poberty in the fisherman's settlement Dompok subdistrict are economi factor, social factor and education factor.*

*Thus, need to do some action in order to increase the level of earnings local society by minimalizing the factor that is causing the poverty of the local society. So that, if the poverty is eliminated which is according to the poverty pattern and its cause factor each, so that the effort can be more optimal.*

**The keywords: poverty, urban poverty, fisherman's settlement**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, dengan segala doa kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia dan rahmatnya, sehingga karya ilmiah yang berjudul "Pola Kemiskinan di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang" telah dapat diselesaikan dengan baik menjadi sebuah tesis sebagai tugas akhir pada Program Pasca Sarjana Magister Teknik Pembangunan Kota Universitas Diponegoro Semarang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Ir. H. Eko Budihardjo, MSc selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Dra. Hj. Suryatati A. Manan, selaku Walikota Tanjungpinang yang telah memberikan dukungan moril dan materiil selama saya menyusun tesis ini;
3. Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, CES, DEA selaku ketua Program Pascasarjana Magister Teknik Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro;
4. Ir. Parfi Khadiyanto, MSL selaku mentor, atas waktu dan bimbingannya dalam penyusunan tesis;
5. Ir. Hadi Wahyono, MA selaku co-mentor, atas masukan yang diberikan guna penyelesaian tesis saya;
6. Ir. Sunarti, MT selaku penguji dalam sidang pra tesis dan tesis, atas waktu, kritikan dan saran yang selalu diberikan dalam setiap ujian sehingga berguna bagi pengembangan materi tesis saya;
7. Keluarga saya, atas kesabaran dan perhatiannya selama saya menyusun tesis ini;
8. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Diiringi dengan doa, semoga jerih payah, pengorbanan dan kebaikannya mendapat balasan dari Allah SWT.

*Tidak ada gading yang tak retak.* Bergitu juga dengan tesis ini, jauh dari sempurna. Saya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Namun, saya berharap karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca yang selalu haus untuk menimba ilmu pengetahuan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, Maret 2006

Penyusun

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan, Sasaran dan Manfaat Penelitian .....	4
1.3.1 Tujuan.....	4
1.3.2 Sasaran.....	4
1.3.3 Manfaat Penelitian.....	4
1.4 Ruang Lingkup .....	5
1.4.1 Ruang Lingkup Materi .....	5
1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah .....	6
1.5 Kerangka Pemikiran .....	10
1.6 Metode Penelitian.....	12
1.6.1 Jenis Penelitian .....	12
1.6.2 Langkah-Langkah Penelitian.....	12
1.6.3 Teknik Pengumpulan Data .....	14
1.6.4 Konsep Kebutuhan Data.....	15



1.6.5 Teknik Analisis.....	20
1.6.6 Sasaran Populasi dan Penentuan Jumlah Sampel.....	22
1.7 Sistematika Penulisan.....	23

## **BAB II POLA KEMISKINAN PERMUKIMAN NELAYAN**

2.1 Konsepsi Dasar Kemiskinan Perkotaan .....	25
2.1.1 Definisi Kemiskinan.....	25
2.1.2 Kemiskinan dan Kemanusiaan .....	26
2.1.3 Akses Penduduk Miskin terhadap Pelayanan Kota .....	27
2.1.4 Bentuk Kemiskinan Perkotaan .....	28
2.2 Sebab Terjadinya Kemiskinan di Perkotaan.....	32
2.2.1 Pandangan Konservatif.....	32
2.2.2 Pandangan Liberal .....	33
2.2.3 Pandangan Transformatif .....	34
2.2.4 Penyebab Dasar Kemiskinan .....	35
2.3 Indikator Kemiskinan .....	37
2.4 Pola Kemiskinan.....	41
2.5 Karakteristik Permukiman Nelayan .....	42
2.6 Pendekatan, Metode dan Pola Pembangunan dalam Mengatasi Kemiskinan Perkotaan.....	44
2.6.1 Pendekatan dalam Mengatasi Kemiskinan Perkotaan.....	44
2.6.2 Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Kemiskinan .....	46
2.6.3 Pola Pembangunan Perumahan bagi Masyarakat Miskin .....	47
2.6.4 Pendekatan Berperspektif Perencanaan Sosial.....	48
2.7 Pola Kemiskinan di Permukiman Nelayan.....	48

## **BAB III GAMBARAN PERMUKIMAN NELAYAN**

### **DI KELURAHAN DOMPAK KOTA TANJUNG PINANG**

3.1 Gambaran Umum Kota Tanjungpinang .....	51
3.1.1 Letak Geografis .....	51
3.1.2 Kependudukan .....	52

3.1.3 Sosial Budaya .....	53
3.1.4 Kondisi Perekonomian .....	54
3.1.5 Sistem Transportasi .....	54
3.1.6 Proses Urbanisasi .....	55
3.2 Gambaran Umum Kelurahan Dompok .....	55
3.2.1 Lokasi .....	55
3.2.2 Kependudukan .....	55
3.2.3 Penggunaan Lahan .....	56
3.2.4 Sektor Kegiatan Masyarakat .....	57
3.3 Karakteristik Keluarga Miskin di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok.....	58
3.3.1 Kondisi Tempat Tinggal Keluarga Miskin .....	58
3.3.2 Kondisi Lingkungan Permukiman Nelayan .....	60
3.3.3 Kondisi Kesehatan Keluarga Miskin .....	61
3.3.4 Pendidikan Masyarakat Kelurahan Dompok .....	62
3.3.5 Kondisi Sandang dan Pangan Keluarga Miskin .....	62

#### **BAB IV ANALISIS POLA KEMISKINAN DI PERMUKIMAN NELAYAN KELURAHAN Dompok KOTA TANJUNGPINANG**

4.1 Analisis Karakteristik Masyarakat di Permukiman Nelayan.....	64
4.1.1 Analisis Karakteristik Ekonomi Nelayan .....	64
4.1.2 Analisis Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat Nelayan .....	67
4.1.3 Analisis Karakteristik Kehidupan Politik Masyarakat .....	72
4.2 Analisis Kondisi Fisik Kawasan Permukiman Nelayan di Kelurahan Dompok.....	73
4.2.1 Analisis Kondisi Fisik Tempat Tinggal Nelayan .....	73
4.2.2 Kondisi Fisik Sarana dan Prasarana Penunjang Permukiman..	76
4.3 Analisis Indikasi Kemiskinan di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok.....	77
4.4 Analisis Pola Kemiskinan pada Permukiman Nelayan .....	80
4.5 Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan	

Pola Kemiskinan pada Permukiman Nelayan .....	85
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Temuan Studi .....	89
5.2 Kesimpulan.....	90
5.3 Rekomendasi .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL I.1</b>	: Kebutuhan Data Penelitian.....	16
<b>TABEL II.1</b>	: Sintesis Faktor Tingkat Pendidikan .....	36
<b>TABEL II.2</b>	: Sistesis Faktor Pekerjaan .....	36
<b>TABEL II.3</b>	: Sintesis Faktor Pendapatan .....	37
<b>TABEL II.4</b>	: Indikator Utama Kemiskinan.....	40
<b>TABEL II.5</b>	: Hasil Sintesa Literatur.....	49
<b>TABEL III.1</b>	: Jumlah Penduduk Kota Tanjungpinang Berdasarkan Kecamatan, Kelurahan, Jenis Kelamin dan Kewarganegaraan Tahun 2003.....	52
<b>TABEL III.2</b>	: Mobilitas Penduduk Kota Tanjungpinang Tahun 2003 (jiwa).....	53
<b>TABEL III.3</b>	: Jumlah Penduduk Kelurahan Dompok Tahun 2003 .....	54
<b>TABEL III.4</b>	: Jenis Bangunan Rumah yang Ditempati Oleh Keluarga Miskin di Kelurahan Dompok Tahun 2004 .....	59
<b>TABEL III.5</b>	: Jumlah Keluarga Miskin di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok Menurut Jenis Penyakit yang Sering Diderita Tahun 2004 .....	61
<b>TABEL IV. 1</b>	: Mata Pencaharian Utama Penduduk Kelurahan Dompok Berdasarkan Hasil Kuesioner.....	65
<b>TABEL IV. 2</b>	: Pekerjaan Sampingan Penduduk Kelurahan Dompok Berdasarkan Hasil Kuesioner.....	65
<b>TABEL IV. 3</b>	: Pendapatan per Bulan Masyarakat di Kelurahan Dompok Berdasarkan Hasil Kuesioner.....	66
<b>TABEL IV. 4</b>	: Penghasilan dari Penangkapan Ikan (ribu/hari) Berdasarkan Hasil Kuesioner.....	67
<b>TABEL IV. 5</b>	: Pendidikan Terakhir Kepala Keluarga (KK) Berdasarkan Hasil Kuesioner.....	68

<b>TABEL IV. 6 :</b> Pendidikan Terakhir Anggota Keluarga Berdasarkan Hasil Kuesioner.....	68
<b>TABEL IV. 7 :</b> Jumlah Keluarga Miskin di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok Menurut Jenis Penyakit yang Sering Diderita Tahun 2004 .....	70
<b>TABEL IV. 8 :</b> Status Kepemilikan Tanah Rumah di Kelurahan Dompok Berdasarkan Hasil Kuesioner .....	73
<b>TABEL IV. 9 :</b> Perbandingan Luas Bangunan dan Luas Tanah yang Ditempati di Kelurahan Dompok .....	75
<b>TABEL IV. 10:</b> Penggunaan Sumber Air Bersih Menurut Responden di Kelurahan Dompok .....	76
<b>TABEL IV. 11:</b> Karakteristik Kemiskinan di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok Berdasarkan Indikator Kemiskinan .....	78
<b>TABEL V.1 :</b> Rekomendasi Penelitian .....	92

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR 1.1</b> : Peta Kota Tanjungpinang.....	8
<b>GAMBAR 1.2</b> : Peta Kecamatan Bukit Bestari.....	9
<b>GAMBAR 1.3</b> : Kerangka Pemikiran Penelitian.....	11
<b>GAMBAR 1.4</b> : Kerangka Analisis .....	21
<b>GAMBAR 3.1</b> : Gambaran Permukiman Nelayan di Kelurahan Dompok.....	57
<b>GAMBAR 3.2</b> : Kondisi Tempat Tinggal Keluarga Miskin .....	59
<b>GAMBAR 3.3</b> : Kondisi Lingkungan Permukiman Nelayan.....	60
<b>GAMBAR 4.1</b> : Pola Hidup Masyarakat Nelayan.....	71
<b>GAMBAR 4.2</b> : Kondisi Rumah Nelayan .....	74
<b>GAMBAR 4.3</b> : Kepadatan Rumah .....	75
<b>GAMBAR 4.4</b> : Kondisi Jalan di Permukiman Nelayan.....	77
<b>GAMBAR 4.5</b> : Pola Kemiskinan di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok .....	85

## **DAFTAR LAMPIRAN**

<b>LAMPIRAN I</b> : Form Kuesioner Masyarakat.....	98
--	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan perkotaan merupakan salah satu isu pembangunan yang kompleks dan kontradiktif (Irawan, 2002: 1). Kemiskinan dipandang sebagai dampak ikutan dari pembangunan dan bagian dari masalah dalam pembangunan. Keberadaan kemiskinan ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan, dan ketimpangan antar wilayah.

Tipologi kemiskinan perkotaan dicirikan oleh berbagai dimensi, baik dimensi sosial maupun ekonomi yang lebih beragam serta memiliki kebijakan yang rumit. Hal tersebut membentuk pola kemiskinan yang berbeda-beda. Menurut Max-Neef et. al, terdapat 6 macam kemiskinan yang ditanggung komunitas dan membentuk suatu pola kemiskinan tertentu, yaitu (a) kemiskinan sub-sistensi, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal; (b) kemiskinan perlindungan, lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah; (c) kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya kesadaran atas hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan, (d) kemiskinan partisipasi, tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas; (e) kemiskinan identitas, terbatasnya pembauran antar kelompok sosial, terfragmentasi; dan (f) kemiskinan kebebasan, stres, rasa tidak berdaya, tidak aman baik di tingkat pribadi maupun komunitas.

Sebagai ibukota Kepulauan Riau, Kota Tanjungpinang tidak dapat terhindar dari fenomena kemiskinan. Kemiskinan di Kota Tanjungpinang ditunjukkan dengan adanya permukiman-permukiman kumuh serta liar, serta adanya golongan masyarakat yang masuk kategori keluarga miskin yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi, sosial dan politik dari masing-masing keluarga miskin tersebut. Fenomena ini ditunjukkan dengan terdapatnya beberapa



kepala keluarga yang secara ekonomi tidak dapat memenuhi kebutuhan primer anggota keluarganya. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat rendah sehingga mereka sulit memperoleh pekerjaan dengan hasil yang memadai atau mencukupi kebutuhan keluarganya. Terdapat pula sejumlah keluarga yang tingkat kesehatannya rendah sehingga menghambat mereka untuk bekerja.

Kemiskinan di Kota Tanjungpinang terbentuk dari ketimpangan antar kawasan. Kawasan dengan aktivitas perkotaan (aktivitas perdagangan dan jasa) yang minimum menyebabkan perekonomian masyarakatnya rendah. Hal ini menyebabkan mayoritas penduduk di kawasan tersebut lebih rendah pendapatannya daripada penduduk kawasan kota. Permukiman nelayan di Kelurahan Dompok, Kota Tanjungpinang, merupakan salah satu kawasan yang minim aktivitas perkotaan. Mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Hal ini menyebabkan 47,3% penduduk di Kelurahan Dompok masuk ke dalam kategori keluarga miskin. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kelurahan Dompok, terdapat 147 keluarga nelayan dari 316 keluarga di Kelurahan Dompok yang hidup dibawah garis kemiskinan. Rata-rata dari mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan pangan (makan satu kali sehari). Secara ekonomi, pendapatan yang dihasilkan oleh keluarga miskin di Kota Tanjungpinang hanya sejumlah Rp 200.000 – Rp 1.000.000 per bulan (hasil observasi, 2006). Sekitar 80% pendapatan tersebut dihabiskan guna membeli kebutuhan makanan dan minuman. Keadaan ini cukup memprihatinkan, karena mempunyai dampak yang sangat besar terhadap tingkat kesehatan, tingkat pendidikan serta terhambatnya akses ke pelayanan publik.

Kemiskinan yang dialami oleh keluarga miskin di permukiman nelayan Kelurahan Dompok terjadi karena faktor yang timbul dari dalam diri sendiri dan faktor lingkungan setempat. Kemiskinan timbul dari diri sendiri karena pola hidup masyarakat yang tidak peduli akan kebersihan lingkungan, dan tidak adanya kesadaran hidup sehat. Sedangkan faktor lingkungan maksudnya pendapatan nelayan tidak tetap berdasarkan kondisi cuaca yang cocok untuk melaut (*seasonal poverty*).

Oleh karena itu, untuk menyikapi kondisi kemiskinan yang terjadi di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang ini maka perlu dilakukan suatu tindakan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat dengan cara meminimalisir faktor penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat setempat.

## 1.2 Rumusan Masalah

Permukiman nelayan di Kelurahan Dompok, Kota Tanjungpinang, merupakan salah satu kawasan yang minim aktivitas perkotaan dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Minimnya pendapatan sebagian besar penduduk yang diperoleh dari mata pencahariannya sebagai nelayan menyebabkan mayoritas penduduk di Kelurahan Dompok masuk ke dalam kategori keluarga miskin. Jika kondisi tersebut dibiarkan tanpa penanganan lebih lanjut, dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya hal-hal sebagai berikut:

- Terbatasnya penyediaan serta akses menuju sarana dan prasarana publik;
- Tingkat pendidikan penduduk di permukiman nelayan di Kelurahan Dompok rendah;
- Lingkungan yang semakin buruk dapat mengakibatkan lokasi permukiman nelayan di Kelurahan Dompok menjadi tidak layak untuk dihuni;
- Tingkat kesehatan masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok rendah.

Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang terjadi di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang ini maka perlu dilakukan suatu penelitian dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut: **“Bagaimanakah pola kemiskinan yang terdapat pada permukiman nelayan di Kelurahan Dompok Tanjungpinang serta faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pembentukan pola kemiskinan di kawasan tersebut?”**

Penelitian ini guna mengetahui bagaimana kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang. Sehingga apabila pengentasan kemiskinan dilakukan sesuai dengan pola kemiskinan dan faktor penyebabnya masing-masing, maka upaya pengentasan tersebut dapat lebih optimal. Dengan

cara meminimalisir faktor penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat setempat maka dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat.

### **1.3 Tujuan, Sasaran, dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang.

#### **1.3.2 Sasaran**

Untuk melihat dengan jelas dan komprehensif tentang kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok, Kota Tanjungpinang, maka sasaran yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Mengidentifikasi karakteristik masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang;
2. Mengidentifikasi kondisi fisik kawasan permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang;
3. Analisis indikasi kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang;
4. Analisis pola kemiskinan di pemukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang;
5. Analisis faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok.

#### **1.3.3 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari diadakannya penelitian mengenai pola kemiskinan yang terdapat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

- a. Diperolehnya hasil kajian mengenai pola kemiskinan yang terdapat pada keluarga miskin di Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang.

- b. Diperolehnya hasil kajian faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan di Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang, sehingga dapat dicari solusi yang tepat sasaran dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Kelurahan tersebut.
- c. Menghasilkan rekomendasi upaya pengentasan kemiskinan serta arahan pengembangan di permukiman nelayan berdasarkan kajian pola kemiskinan yang terdapat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang.

## **1.4 Ruang Lingkup**

### **1.4.1 Ruang Lingkup Materi**

Permasalahan kemiskinan di Kelurahan Dompok identik dengan permukiman yang kumuh di daerah pinggiran kota (tepi pantai). Sebagian besar dari kaum miskin adalah penduduk yang mendiami permukiman kumuh dan liar, Selain itu kemiskinan dipengaruhi pula oleh karakteristik masyarakat tertentu. Seperti halnya nelayan, yang cenderung hidup di pinggir laut walau dalam kondisi apapun. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji tentang pola kemiskinan di permukiman pinggiran kota (tepi pantai) yang minim aktivitas perkotaan yang dalam hal ini kemiskinan perkotaan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Tanjungpinang.

Dengan demikian, maka ruang lingkup materi dari penelitian mengenai kemiskinan yang dibatasi hanya pada permasalahan pola kemiskinan masyarakat nelayan yang tervisualisasikan dalam bentuk permukiman nelayan. Kajian-kajiannya akan membahas materi tentang hal-hal yang membentuk pola kemiskinan permukiman nelayan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kondisi fisik kawasan permukiman nelayan Kelurahan Dompok, dimana materi yang dibahas adalah tentang lokasi spesifik Kelurahan Dompok, Kondisi fisik tempat tinggal penduduk, dan kondisi fisik lingkungan penduduk.

- b. Karakteristik masyarakat di permukiman nelayan Kota Tanjungpinang, seperti seperti karakteristik ekonomi, karakteristik sosial dan karakteristik politik masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang.
- c. Indikasi kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang, yang di dasarkan pada indikator kemiskinan menurut teori yang ada.
- d. Pola kemiskinan di pemukiman nelayan Kota Tanjungpinang, yang didasarkan atas teori pola kemiskinan yang ada.
- e. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok, yang didasarkan pada perumusan pola kemiskinan dan sebabnya. Faktor penyebab timbulnya kemiskinan tersebut terbagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal dari permukiman nelayan di Kelurahan Dompok.

#### **1.4.2 Ruang Lingkup Wilayah**

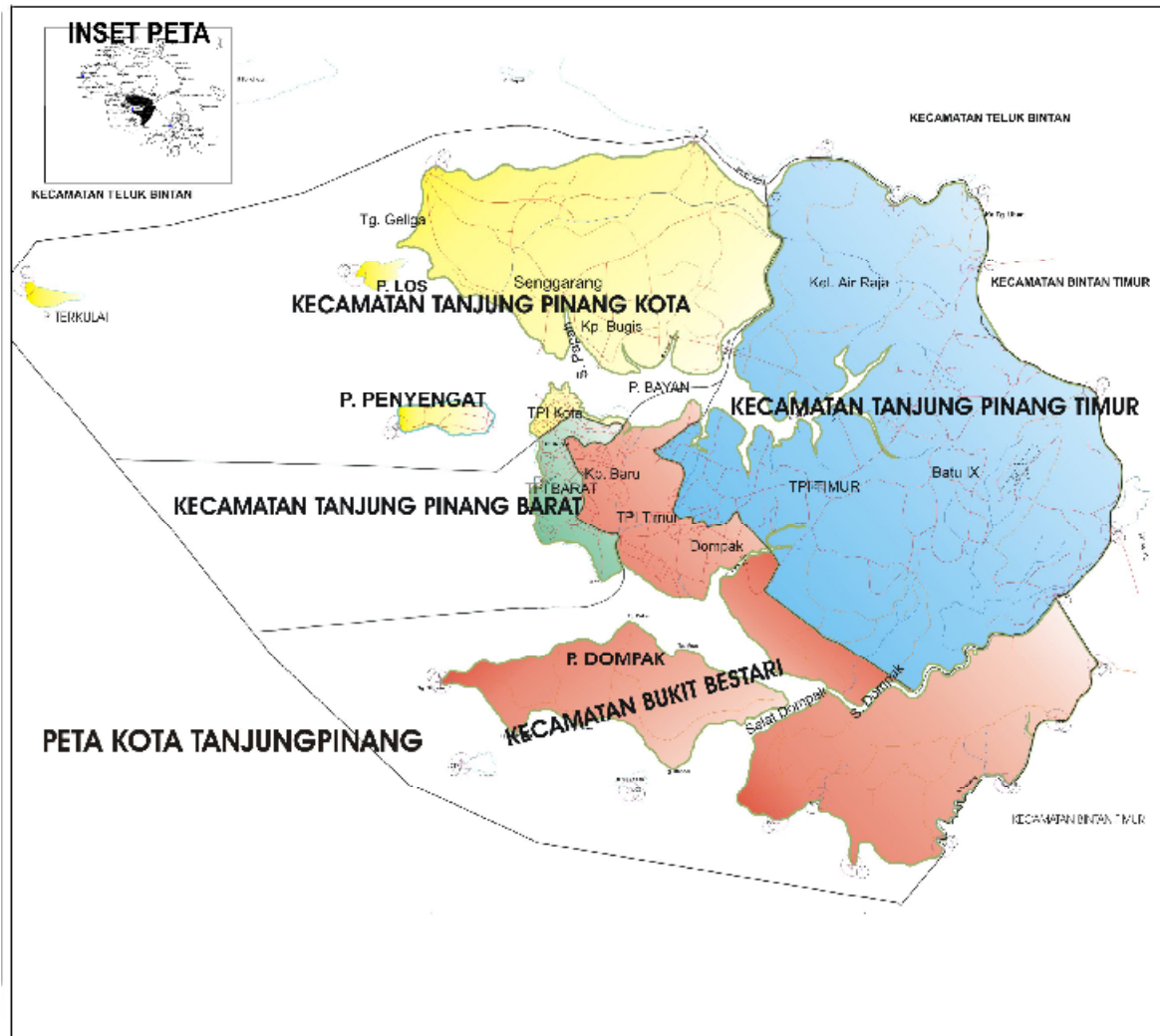
Ruang lingkup wilayah atau kajian wilayah dalam studi ini dibatasi hanya di dalam daerah permukiman nelayan di Kelurahan Dompok. Kelurahan Dompok merupakan bagian dari Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Adapun batas-batas Kecamatan Bukit Bestari adalah sebagai berikut:


Timur	: Kecamatan Bintan Timur
Barat	: Kecamatan Tanjungpinang Barat
Utara	: Kecamatan Tanjungpinang Timur dan Tanjungpinang Kota
Selatan	: Kecamatan Bintan Timur

Pengambilan studi kasus di Kelurahan Dompok ini, dikarenakan oleh Kelurahan Dompok di anggap dapat mewakili kelurahan-kelurahan lainnya yang setingkat. Daerah ini memiliki keluarga miskin sekitar 47% dari jumlah keseluruhan penduduknya. Selain itu, Kelurahan Dompok sangat dipengaruhi oleh fungsi dan lokasi dari Kota Tanjungpinang, yaitu:

- Kota pantai (*waterfront city*), kota perdagangan, kota industri yang sudah mulai beranjak modern walaupun masyarakatnya lebih bersifat paguyuban.
- Mempunyai pengaruh dan dipengaruhi oleh wilayah *hinterlandnya*.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di gambar 1.1 dan 1.2 di bawah ini..





PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER TEKNIK PERENCANAAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

---

**TESIS**

---

**POLA KEMISKINAN  
DI PERMUKIMAN NELAYAN  
KELURAHAN DOMPAK  
KOTA TANJUNGPINANG**

---

**PETA  
KOTA TANJUNGPINANG**

---


**LEGENDA**

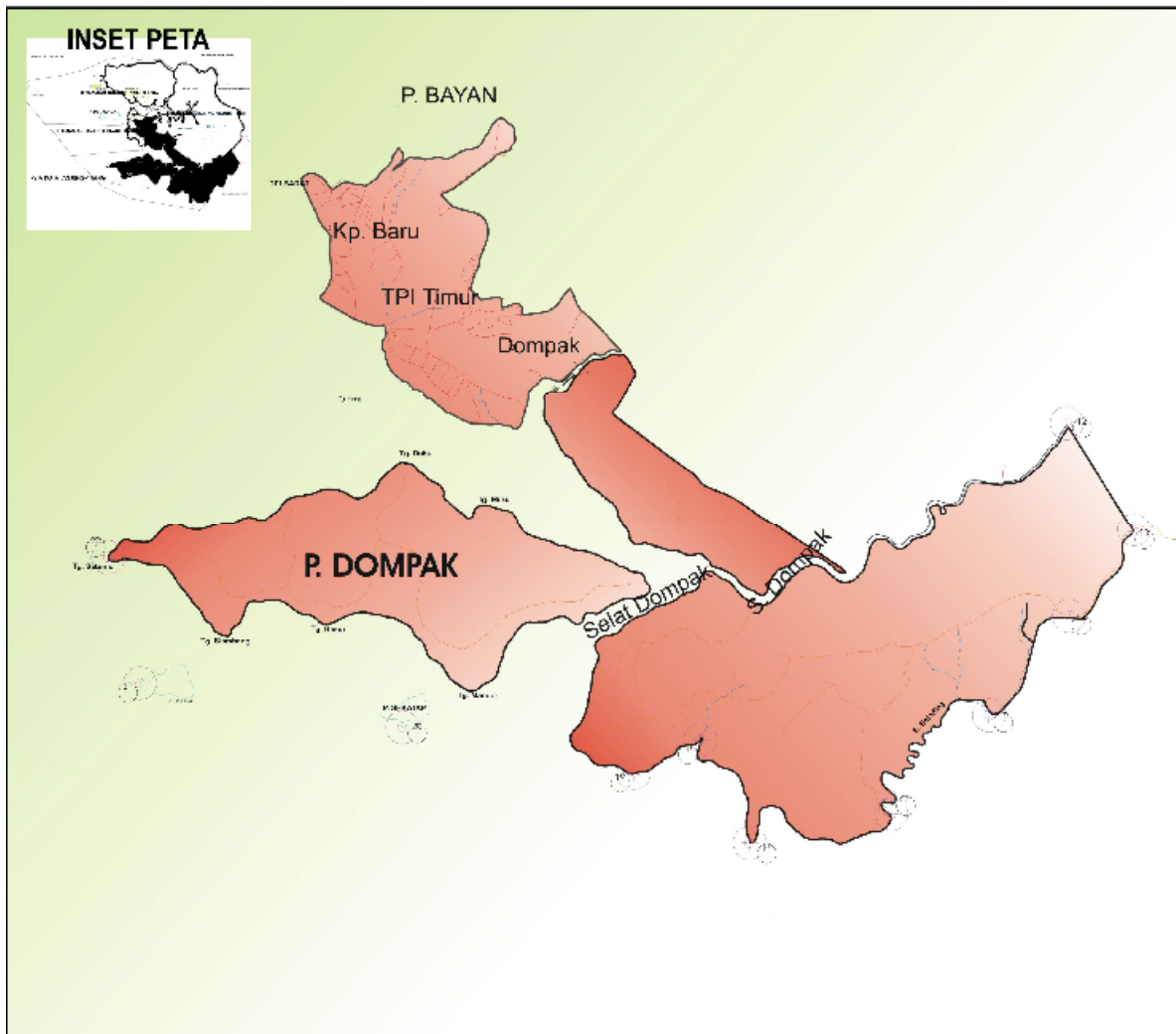
- Kec. Bukit Bestari
- Kec. TPI Timur
- Kec. TPI Barat
- Kec. TPI Kota
- Batas Kecamatan

---

NO	SKALA
1.1	1 : 300.000

---

UTARA	SUMBER
	BAPPEDA KOTA TANJUNGPINANG



PROGRAM BACCASARIANA  
MAGIS TERIKNIK PEMBANGUNAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

**T E S I S**

**POLA KEMISKINAN  
DI PERMUKIMAN NELAYAN  
KELURAHAN DOMPAK  
KOTA TANJUNGPINANG**

**PETA**

**KECAMATAN  
BUKIT BESTARI**

**LEGENDA**

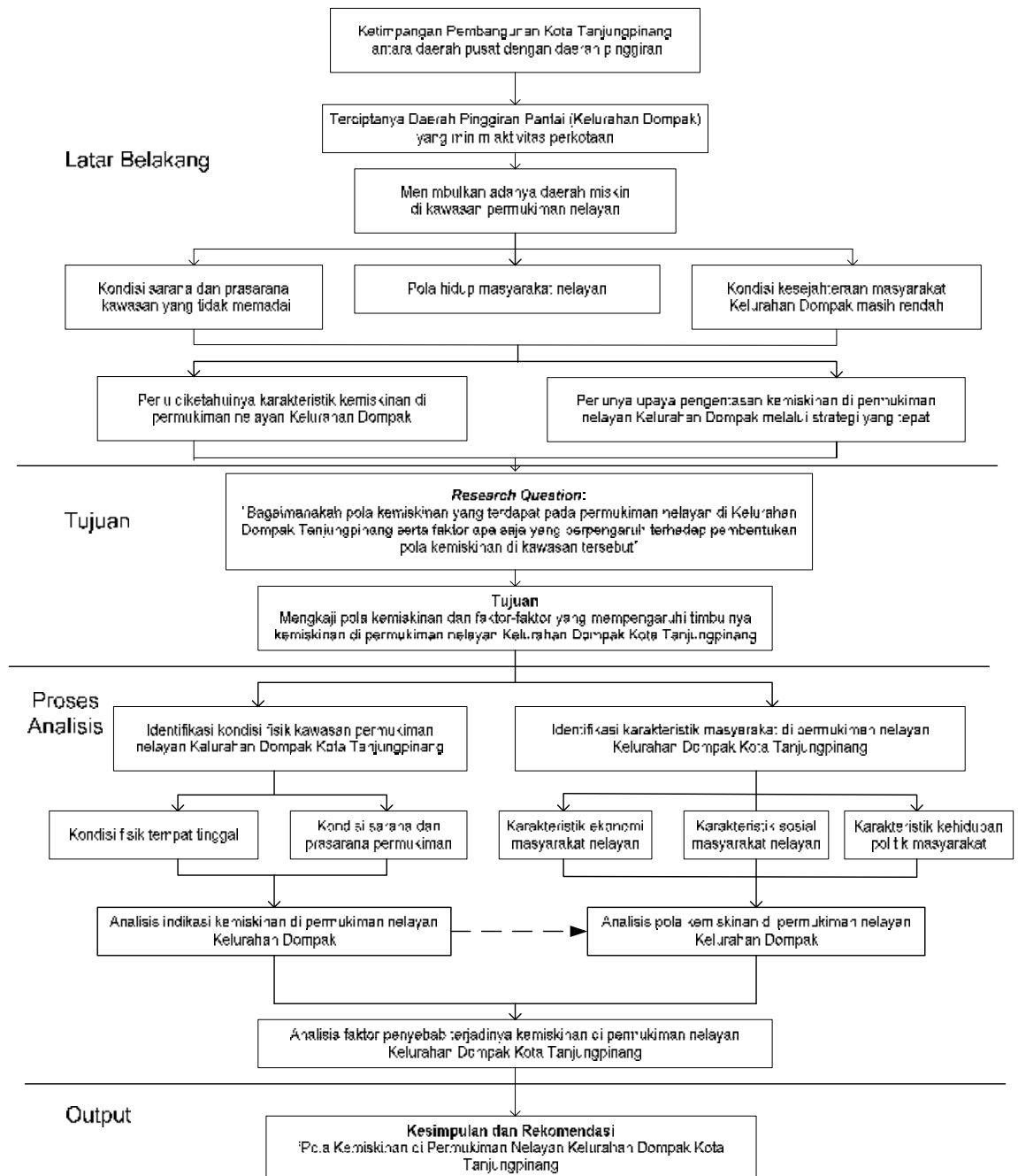
- Kec. Bukit Bestari
- Kec. TPI Timur
- Kec. TPI Barat
- Kec. TPI Kota
- Batas Kecamatan

NO	SKALA
1.2	1 : 200.000
UTARA	SUMBER
	BAPPEDA KOTA TANJUNGPINANG



## 1.5 Kerangka Pemikiran

Pembangunan yang terjadi di Kota Tanjungpinang saat ini tidak merata ke seluruh wilayah. Hal ini terlihat dengan timbulnya ketimpangan pembangunan antara daerah pusat dan daerah pinggiran. Daerah pinggiran Kota Tanjungpinang yang identik dengan daerah minim aktivitas perkotaan diantaranya menimbulkan daerah miskin di kawasan permukiman nelayan Kelurahan Dompok. Hal ini ditandai dengan minimnya sarana dan prasarana lingkungan permukiman serta rendahnya pendapatan masyarakat. Namun kemudian, kemiskinan tersebut diperparah oleh karakteristik masyarakat nelayan yang 'berbeda' dengan masyarakat lainnya. Sehingga, guna mengetahui karakteristik masyarakat nelayan Kelurahan Dompok dan mencari upaya pengentasan kemiskinan yang tepat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok maka perlu adanya penelitian yang menjawab pertanyaan penelitian **'bagaimanakah pola kemiskinan yang terdapat pada permukiman nelayan di Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang serta faktor apa saja yang berpengaruh terhadap pembentukan pola kemiskinan di kawasan tersebut?'**. Dengan dasar pertanyaan penelitian tersebut kemudian akan dikaji tentang kondisi fisik kawasan permukiman nelayan berupa kondisi fisik tempat tinggal dan kondisi fisik sarana prasarana penunjang, dan karakteristik masyarakat nelayan berupa karakteristik sosial, ekonomi dan kehidupan politik. Hasil identifikasi tersebut digunakan untuk menganalisis indikasi kemiskinan yang terjadi di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang dan analisis pola kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok. Hasil analisis kemudian dikaji untuk menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan terutama di permukiman nelayan di Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang. Sehingga dihasilkan kesimpulan dan rekomendasi pengentasan kemiskinan yang tepat sesuai dengan karakteristik permukiman nelayan Kelurahan Dompok.



Sumber: Penyusun, 2006

**GAMBAR 1.3**  
**KERANGKA PEMIKIRAN PENELITIAN**

## **1.6 Metode Penelitian**

Permasalahan perkotaan ditandai dengan munculnya kantung-kantung kemiskinan di lingkungan permukiman, sehingga kemiskinan perkotaan dapat dikatakan selalu identik dengan permukiman kumuh dan liar.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji dan memahami masalah kemiskinan perkotaan yang terwujud dalam permukiman nelayan di Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang dengan metode penelitian sebagai berikut :

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian mengenai keadaan status manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu klas peristiwa pada masa sekarang.

Sedangkan tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk memuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Suharto, 1993 : 35). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan keadaan yang ada pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab akibat melalui identifikasi dari gejala yang ada dari permasalahan. Diharapkan dengan dilakukannya penelitian deskriptif maka dapat dilakukan berbagai identifikasi serta analisis kondisi permukiman nelayan dan penduduknya sehingga dapat membantu memberikan gambaran pola kemiskinan serta faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang.

### **1.6.2 Langkah-Langkah Penelitian**

Penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi empat tahap utama, yaitu:

- a. Tahap persiapan yang meliputi:
  - Menyiapkan perijinan untuk penelitian pada instansi setempat dan peralatan yang digunakan dalam survei lapangan.
  - Menyiapkan kuesioner untuk pengumpulan data primer.
  - Menyiapkan alat analisis

- b. Tahap kajian atau penelitian kepustakaan atau penelusuran literatur. Kajian atau penelitian kepustakaan merupakan kegiatan penelitian berupa yang berkaitan dengan:
  - Metode penelitian
  - Pengertian istilah (*terminology*) atau kata kunci yang akan digunakan
  - Teori dan konsep yang berkaitan dengan kemiskinan di perkotaan dari hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan.
  - Teori-teori tentang kemiskinan yang tercermin pada permukiman kumuh dan liar, sector informal masyarakat miskin kaum nelayan.
  - Teori yang berkaitan dengan sebab akibat terjadinya kemiskinan di perkotaan
  - Tindakan dan kebijaksanaan dalam mengatasi kemiskinan kota.
- c. Penelitian lapangan, yang merupakan kegiatan antara lain meliputi :
  - Observasi/pengamatan lapangan yang dilakukan untuk mengetahui fenomena-fenomena kemiskinan di perkotaan khususnya yang terjadi dilokasi penelitian.
  - Pengambilan data primer melalui wawancara dengan responden menggunakan kuesioner.
  - Pengamatan aktivitas dan lokasi penelitian melalui sketsa suasana maupun pengambilan foto sebagai data fisik.
- d. Kegiatan inventarisasi dan analisis data yang meliputi kegiatan:
  - Melakukan pengolahan dan penyusunan data yang diperoleh dari hasil survei, berupa kompilasi data yang berkaitan dengan karakteristik kemiskinan perkotaan pada permukiman miskin di kota Tanjungpinang.
  - Melakukan analisis data sesuai dengan pendekatan dan metodologi penelitian karakteristik kemiskinan perkotaan pada permukiman miskin kota Tanjungpinang.
- e. Penyusunan laporan penelitian.

### 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Hal yang penting dalam persiapan penelitian lapangan adalah dengan penyusunan kebutuhan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi dapat melalui observasi/ pengamatan langsung situasi dan kondisi yang terjadi dalam wilayah penelitian, serta konteks sosial lain yang terlibat. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. *Pengumpulan data primer*, yaitu pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data yang tidak terdapat di instansi melalui pengumpulan secara langsung dari lapangan. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan cara:
  - **Wawancara/ Kuesioner**  
Merupakan kegiatan untuk menarik informasi dan data dari sampel yang terpilih. Jenis kuesioner yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu kuesioner dengan pertanyaan tertutup dimana jawabannya sudah ditentukan, namun terdapat pertanyaan lanjutan apabila jawaban responden tidak terdapat dalam pilihan jawaban. Adapun responden yang dituju adalah sejumlah keluarga miskin yang terdapat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap responden di wilayah penelitian merupakan salah satu upaya pencarian data untuk mendapatkan informasi tentang karakteristik dan sebab-sebab terjadinya kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang. Pengumpulan data melalui kuesioner ini dilakukan pada keluarga miskin yang terdapat di permukiman nelayan di Kelurahan Dompok. Pembagian kuesioner ini dilakukan secara langsung dimana peneliti menggunakan kuesioner dan langsung mewawancarai responden.
  - **Observasi/ pengamatan langsung**  
Hasil observasi/ pengamatan pada penelitian ini dicatat secara deskriptif, yang secara akurat mengamati dan merekam fenomena yang muncul dan mengetahui hubungan antar aspek dalam fenomena

tersebut. Data dan informasi tersebut dapat berupa tabel data kuantitatif maupun kualitatif, gambar ilustrasi maupun peta di wilayah penelitian, serta visualisasi foto, sebagai bahan analisis dan penjelasan.

- b. *Data sekunder*, diperoleh dari buku-buku kepustakaan dan beberapa instansi yang terkait dan validitas datanya dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui survei ke instansi-instansi untuk mendapatkan data yang dikeluarkan oleh instansi tersebut dan telaah dokumen. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Survei Instansi

Survei instansi dilakukan kepada instansi-instansi terkait yang ada di Kota Tanjungpinang seperti Biro Pusat Statistik (BPS) Kota Tanjungpinang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Tanjungpinang, Dinas Kimpraswil Kota Tanjungpinang, Dinas Kependudukan Kota Tanjungpinang, serta Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan.

- Studi Literatur

Merupakan survei data maupun literatur yang berkaitan dengan kemiskinan perkotaan serta sebab-sebab terjadinya kemiskinan. Literatur ini diperoleh dari internet, *handbook*, dan referensi lainnya.

#### **1.6.4 Konsep Kebutuhan Data**

Kebutuhan data dalam studi ini merupakan data primer yang akan di gali dari para penghuni lingkungan nelayan miskin di Kelurahan Dompok. Data primer yang akan digunakan dalam studi ini dapat dilihat dalam tabel I.1. di bawah ini.

**TABEL I.1**  
**KEBUTUHAN DATA PENELITIAN**

No	Sasaran	Kegunaan	Variabel Data	Data yang dibutuhkan	Jenis Data	Sumber
1	Identifikasi kondisi fisik kawasan permukiman nelayan Kelurahan Dompok	Untuk mengetahui kondisi fisik kawasan permukiman nelayan Kelurahan Dompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Karakteristik tempat tinggal nelayan di Kelurahan Dompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah Tempat Tinggal</li> <li>▪ Jenis bahan tempat tinggal</li> <li>▪ Kepadatan rumah</li> <li>▪ Ukuran tempat tinggal</li> <li>▪ Karakteristik tempat tinggal</li> <li>▪</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data Primer</li> <li>▪ Data sekunder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat yang tinggal di permukiman nelayan</li> <li>▪ BPS</li> <li>▪ Dinas Kependudukan</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kondisi fisik sarana Permukiman Nelayan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah dan jenis sarana umum</li> <li>▪ Kondisi fisik sarana umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data Primer</li> <li>▪ Data sekunder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat yang tinggal di permukiman nelayan</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kondisi fisik prasarana permukiman</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kondisi jalan</li> <li>▪ Jumlah dan jenis prasarana sanitasi</li> <li>▪ Kondisi prasarana persampahan</li> <li>▪ Kondisi prasarana drainase</li> <li>▪ Kondisi lingkungan setempat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data Primer</li> <li>▪ Data sekunder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Observasi lapangan</li> <li>▪ Kuesioner kepada masyarakat yang tinggal di permukiman nelayan</li> <li>▪ Diskimpraswil</li> </ul>

Lanjutan

No	Sasaran	Kegunaan	Variabel Data	Data yang dibutuhkan	Jenis Data	Sumber
2	Identifikasi karakteristik masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok	Untuk mengidentifikasi karakteristik sosial, ekonomi serta politik masyarakat nelayan Kelurahan Dompok	Karakteristik perekonomian masyarakat nelayan Kelurahan Dompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pendapatan masyarakat per bulan</li> <li>▪ Mata pencaharian masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data Primer</li> <li>▪ Data sekunder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat yang tinggal di permukiman nelayan</li> <li>▪ BPS</li> </ul>
			Karakteristik sosial masyarakat miskin di Kelurahan Dompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Jumlah Penduduk</li> <li>▪ Pola hidup masyarakat nelayan</li> <li>▪ Tingkat pendidikan masyarakat nelayan</li> <li>▪ Tingkat kesehatan penduduk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data Primer</li> <li>▪ Data sekunder</li> <li>▪ hasil analisis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat yang tinggal di permukiman nelayan</li> <li>▪ BPS</li> <li>▪ Dinas Kependudukan</li> </ul>
			Karakteristik kehidupan politik masyarakat nelayan di Kelurahan Dompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat partisipasi masyarakat</li> <li>▪ Status kepemilikan tanah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data primer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat yang tinggal di permukiman nelayan</li> </ul>
3	Analisis indikasi kemiskinan dalam permukiman nelayan Kelurahan Dompok	Untuk mengetahui fenomena kemiskinan yang terjadi di permukiman nelayan Kelurahan Dompok	Indikasi kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kecukupan dan mutu pangan</li> <li>▪ kesempatan kerja dan berusaha</li> <li>▪ akses dan mutu layanan sarana dan prasarana</li> <li>▪ perlindungan sosial dan politik</li> <li>▪ kondisi lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data Primer (Kuesioner/wawancara)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat miskin yang tinggal di permukiman nelayan</li> </ul>



Lanjutan

No	Sasaran	Kegunaan	Variabel Data	Data yang dibutuhkan	Jenis Data	Sumber
4	Analisis pola Kemiskinan di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang	Untuk pola kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kondisi fisik kawasan permukiman nelayan Kelurahan Dompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kondisi fisik permukiman nelayan</li> <li>▪ Kondisi sosial masyarakat miskin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data sekunder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil analisis</li> <li>▪ Tinjauan literatur</li> <li>▪ Hasil Observasi</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Karakteristik masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok</li> </ul>	Karakteristik masyarakat nelayan berupa: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat pendidikan</li> <li>▪ Tingkat kesehatan</li> <li>▪ Pola hidup masyarakat</li> <li>▪ Tingkat partisipasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data sekunder</li> <li>▪ Data primer</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat yang tinggal di permukiman nelayan Kelurahan Dompok</li> <li>▪ Bappeda</li> <li>▪ Dinas Tata Kota</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indikasi kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ kecukupan dan mutu pangan</li> <li>▪ kesempatan kerja dan berusaha</li> <li>▪ akses dan mutu layanan sarana dan prasarana</li> <li>▪ perlindungan sosial dan politik</li> <li>▪ kondisi lingkungan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data primer</li> <li>▪ Data sekunder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hasil analisis</li> <li>▪ Tinjauan literature</li> <li>▪ Hasil Observasi</li> </ul>

Lanjutan

No	Sasaran	Kegunaan	Variabel Data	Data yang dibutuhkan	Jenis Data	Sumber
5.	Faktor-Faktor penyebab kemiskinan permukiman nelayan di Kelurahan Dompok	Untuk mengetahui penyebab kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok	Kondisi fisik kawasan permukiman nelayan di Kelurahan Dompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kondisi fisik tempat tinggal di permukiman nelayan</li> <li>▪ Kondisi sarana dan prasarana penunjang aktivitas masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data primer</li> <li>▪ Data sekunder</li> </ul>	Masyarakat yang tinggal di permukiman nelayan Kelurahan Dompok
			Karakteristik masyarakat nelayan Kelurahan Dompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Karakteristik sosial masyarakat</li> <li>▪ Karakteristik ekonomi masyarakat</li> <li>▪ Karakteristik kehidupan politik masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Data primer</li> <li>▪ Data sekunder</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat yang tinggal di permukiman nelayan Kelurahan Dompok</li> <li>▪ Tinjauan literature</li> <li>▪ Hasil Observasi</li> </ul>

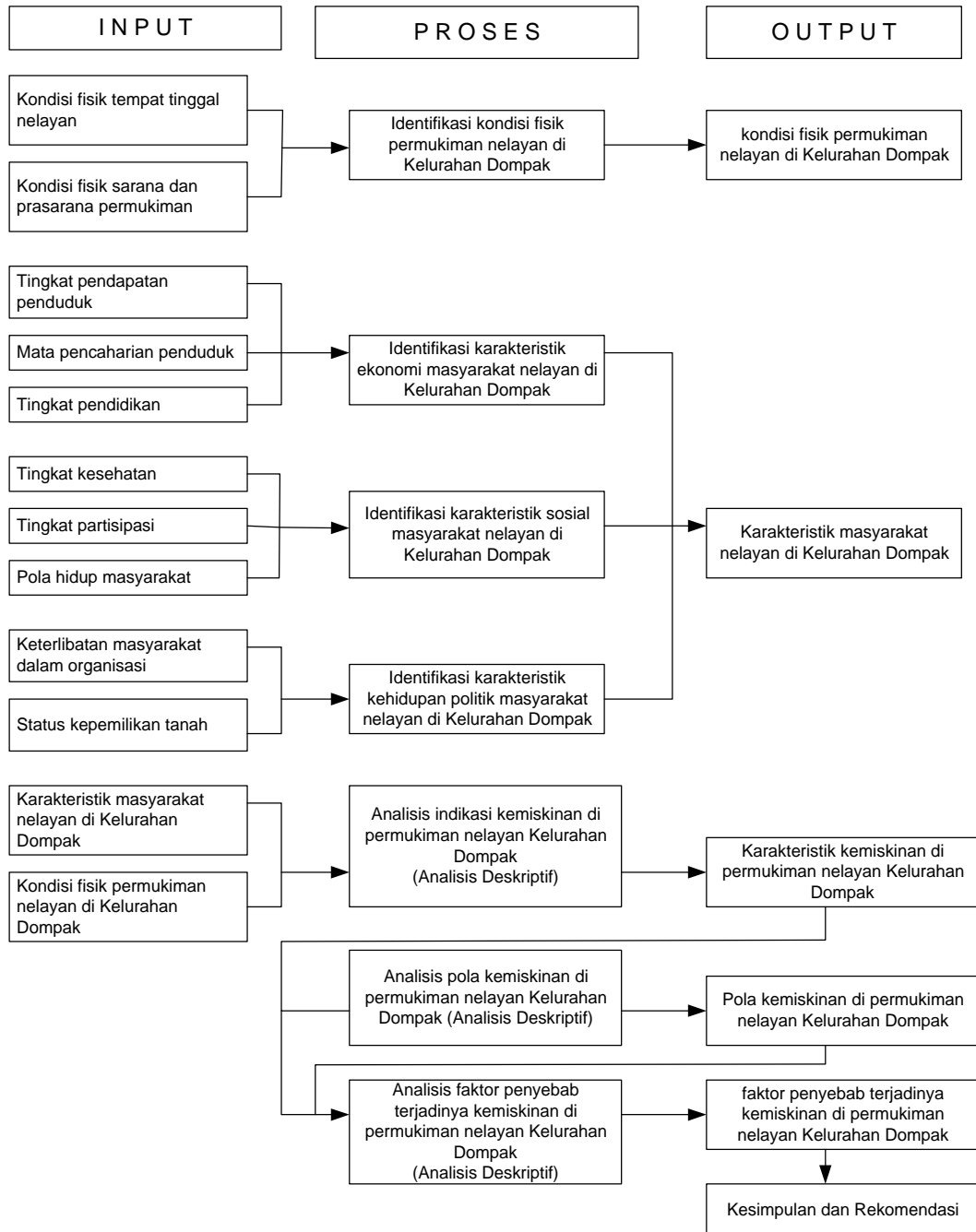
Sumber : Penyusun, 2006

### 1.6.5 Teknik Analisis

Dalam menganalisis data pada penelitian ini digunakan teknik analisis sebagai berikut :

- a. Analisis deskriptif kualitatif, untuk menggambarkan pola kemiskinan suatu variabel, mengetahui keterkaitan antar berbagai variabel tersebut. Dalam hal ini berbagai variabel yang mempunyai keterkaitan atau hubungan antar kemiskinan perkotaan dengan aspek fisik keruangan.
- b. Landasan teoritis digunakan untuk memahami data yang terkumpul dalam *life history* secara utuh, dan menarik implikasi kebijaksanaan yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan negara kita.

Teknik tersebut digunakan karena penelitian ini berbeda dengan penelitian kemiskinan yang lazim, penelitian ini menggunakan pendekatan *life history*. Melalui pendekatan ini peneliti mengadakan wawancara bebas dengan sejumlah 40 orang (1 orang mewakili 1 keluarga) miskin yang dipilih secara *random*. Dengan wawancara ini maka peneliti menyusun sejarah kehidupan responden serta kehidupan sehari-hari mereka, dan masalah serta upaya mandiri yang mereka lakukan untuk mengentaskan kemiskinan.



Sumber: Penyusun, 2006

**GAMBAR 1.4**  
**KERANGKA ANALISIS**

### 1.6.6 Sasaran Populasi dan Penentuan Jumlah Sampel

Populasi sampel yang akan diteliti adalah masyarakat yang tinggal di daerah permukiman miskin nelayan di Kelurahan Dompok. Menurut data yang diperoleh dari Kantor Kelurahan Dompok, jumlah penduduk miskin yang tinggal di lingkungan permukiman nelayan adalah 147 kepala keluarga.

Mengingat bahwa penelitian mengenai kemiskinan permukiman nelayan ini baru pertama kali ini dilakukan, maka sebelum pengambilan sampel mengenai daerah penelitian, terlebih dahulu direkam secara meluas beberapa kawasan miskin permukiman nelayan Kota Tanjungpinang. Setelah diperoleh gambaran secara keseluruhan, kemudian baru diambil atau ditentukan daerah penelitiannya dan dikaji secara mendalam.

Sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian, maka kemiskinan permukiman nelayan yang akan dikaji dengan studi kasus pada permukiman miskin nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang. Selain itu, permukiman miskin nelayan yang dikaji/diteliti merupakan permukiman yang sudah membentuk semacam komunitas tersendiri, walaupun dalam skala kecil.

Mengenai teknik penentuan sampel dilakukan secara “random” pada responden di wilayah penelitian, dan hanya pada mereka yang menerima dan terlibat langsung pada permasalahan. Berdasarkan penentuan lokasi lingkungan permukiman nelayan miskin, maka perlu ditentukan jumlah sampel yang akan disurvei. Untuk menentukan besarnya sampel digunakan rumus:

$$S = \frac{N z P (1 - P)}{Nd + z P (1 - P)}$$

Dimana : N = Populasi (147)

z = Nilai realibilitas (dengan dk = 95%, maka z = 1,96)

P = Objek yang akan diteliti (20 %)

d = Nilai error (5 %)

(rumus diambil dari Cochran, 1988 dalam Kartono 1992)

Nilai *error* yang digunakan adalah 5 % dengan berdasarkan bahwa jika terjadi sedikit kekeliruan dalam penelitian ini, maka tidak terlalu membahayakan jiwa manusia secara langsung. Sedangkan prosentase objek yang akan diteliti adalah 20 % mengingat jumlah populasi yang akan disampel adalah di bawah 200.

Berdasarkan survey Kit (Fink, 1995: 43; Ida Bagoes Mantra dan Kasto dalam Singarimbun, 1989: 170,171), untuk menentukan jumlah sampel yang cukup representatif dalam penelitian, maka jumlah sampel yang digunakan sekurang-kurangnya sebanyak 30 sampel, karena nilai-nilai atau skor yang diperoleh dari sampel yang berjumlah lebih dari 30, distribusinya akan mengikuti distribusi normal.

Dengan demikian, maka pada lokasi studi permukiman miskin nelayan di kota Tanjungpinang, dari 147 keluarga miskin diambil sampel secara *random* sebanyak 40 responden (KK). Responden tersebut tersebar di Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang dan akan dibagi secara merata ke keluarga miskin di setiap RW dalam lingkungan permukiman nelayan.

### **1.7 Sistematika Penulisan**

Penelitian tentang pola kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang ini, terbagi menjadi lima bab, sebagai berikut:

#### **Bab I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan sasaran dan manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

#### **Bab II POLA KEMISKINAN PERMUKIMAN NELAYAN**

Berisi tentang kajian teoritis mengenai pola kemiskinan masyarakat perkotaan di Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang. Kajian teoritis digunakan sebagai dasar menguraikan dan menganalisis problematika penelitian yang dapat mendukung tujuan dan pelaksanaan penelitian.

**Bab III GAMBARAN UMUM KEMISKINAN PERMUKIMAN NELAYAN DI KELURAHAN DOMPAK KOTA TANJUNGPINANG**

Berisi kajian tentang gambaran objek penelitian yaitu permukiman nelayan di Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang

**Bab IV ANALISIS POLA KEMISKINAN PERMUKIMAN NELAYAN DI KELURAHAN DOMPAK KOTA TANJUNGPINANG**

Berisi tentang analisis karakteristik masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok, pola kemiskinan serta faktor-faktor penyebab kemiskinan di daerah tersebut.

**Bab V PENUTUP**

Berisi temuan studi, kesimpulan, dan rekomendasi dalam penelitian.

## **BAB II**

### **POLA KEMISKINAN PERMUKIMAN NELAYAN**

#### **2.1 Konsepsi Dasar Kemiskinan Perkotaan**

##### **2.1.1 Definisi Kemiskinan**

Kemiskinan adalah teori, fakta dan kebijakan bahkan masalah yang sudah sejak lama ada dan hampir dapat dikatakan akan tetap menjadi “kenyataan abadi”. Kemiskinan selalu mendapatkan tempat yang cukup penting dalam pembahasan pembangunan. Pengertian kemiskinan menurut Gunawan Sumodiningrat dkk (1999: 1) adalah sebuah konsep ilmiah yang lahir sebagai dampak ikutan dari pembangunan dalam kehidupan. Kemiskinan dipandang sebagai bagian dari masalah dalam pembangunan, yang keberadaannya ditandai dengan adanya pengangguran, keterbelakangan, yang kemudian meningkat menjadi ketimpangan.

Sedangkan Sar A Levitan mendefinisikan bahwa kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standard hidup yang layak. Oleh karena standard hidup itu berbeda-beda, maka tidak ada definisi kemiskinan yang dapat diterima secara universal. (Levitan, 1980: 2). Hal ini sesuai dengan definisi kemiskinan yang diungkapkan oleh Bradley R. Schiller bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial yang terbatas (Murin dkk, 1979: 214).

Kemiskinan dapat dilukiskan dengan kurangnya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok (Salim, 1984: 41). Dalam kaitannya dengan hal ini, World Bank mendefinisikan keadaan miskin sebagai:

*“Poverty is concern with absolute standard of living of part of society the poor in equality refers to relative living standards across the whole society”* (World Bank, 1990; 26).

Dengan kata lain, kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlukan



untuk memenuhi kebutuhan minimum. Kebutuhan tersebut hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang dapat hidup secara layak. Jika tingkat pendapatan tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum, maka orang atau rumah tangga tersebut dapat dikatakan sebagai keluarga miskin.

Masyarakat miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi, sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang memiliki potensi lebih tinggi. Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok anggota masyarakat yang secara struktural tidak mempunyai peluang dan kemampuan yang memadai untuk mencapai tingkat kehidupan yang layak. Akibatnya mereka harus mengakui keunggulan kelompok masyarakat lainnya dalam persaingan mencari nafkah dan kepemilikan aset produktif, sehingga semakin lama menjadi semakin tertinggal. Dalam prosesnya, gejala tersebut memunculkan persoalan ketimpangan distribusi pendapatan.

### **2.1.2 Kemiskinan dan Kemanusiaan**

Suatu kondisi kemiskinan dapat mendorong tindakan-tindakan yang dapat dipandang sebagai perbuatan yang menentang nilai-nilai kemanusiaan. Sudah tentu mereka yang hidup dalam kondisi kemiskinan (*the have nots*) akan membangun atau membentuk nilai-nilai tersendiri yang khas dan tidak sama dengan golongan lain di atasnya.

Sebagai contoh, kebiasaan kaum miskin hidup dalam kekurangan membuat cara hidup mereka tidak bisa memiliki kadar kebersihan sebagaimana golongan atas, hal ini disebabkan oleh:

1. Dari segi waktu, mereka kebanyakan tidak cukup punya waktu untuk memikirkan hal-hal lain diluar usaha mencari sesuap nasi.
2. Dari segi ketersediaan fasilitas, memang tidak memungkinkan suasana yang bersih. Bagaimana orang yang tinggal di kolong jembatan atau di pinggir kali dapat memiliki punya tradisi bersih (menjaga kebersihan) apabila kondisi lingkungannya lebih buruk dibandingkan dengan mereka yang tinggal dirumah yang mapan. Selain itu, cara komunikasi mereka yang biasa tinggal

dalam hiruk pikuk jalan, kebisingan yang tinggi, tentu saja akan terbiasa bersuara keras (volume suara). Dapatkah tradisi ini diterima ? Apakah dapat diterima oleh norma-norma kesopanan dan etiket golongan elit ?

Jika nilai-nilai dari golongan atas digunakan sebagai titik pijakan dan ukuran dalam menilai tingkat realisasi kemanusiaan, maka dengan sendirinya mereka yang bergelimang dalam kemiskinan dapat dikatakan hidup dalam kondisi kemanusiaan yang rendah. Sebagai contoh antara lain seperti :

1. Ditempat-tempat pembuangan sampah, serombongan manusia saling berebut barang (sampah) yang baru diturunkan dari truk pengangkut.
2. Pagi hari ketika kereta api masuk stasiun, anak-anak gelandangan saling berebut makanan bekas, sisa-sisa makanan dari para penumpang.
3. Pemulung yang masih bersedia memakan makanan bekas yang sudah ada di tempat sampah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemiskinan menjadi kenyataan yang tidak memungkinkan nilai kemanusiaan dan martabat manusia tumbuh secara wajar. Masih adanya kemiskinan dengan sendirinya memberikan bukti bahwa keadaan kemanusiaan masih sangat memprihatinkan. Dalam kondisi yang demikian, pembicaraan mengenai martabat (kemuliaan) manusia hanya sebatas bagi mereka yang dalam posisi mapan, tetapi belum menyentuh pada mereka yang dihinakan karena hidup dalam kemiskinan dan menderita.

### **2.1.3 Akses Penduduk Miskin Terhadap Pelayanan Kota**

Hambatan akses penduduk miskin terhadap pelayanan kota dapat disebabkan oleh faktor ekonomi, sosial, administrasi dan faktor kebijaksanaan (Cheema, 1986: 8). Faktor-faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. faktor ekonomi disebabkan karena penduduk miskin kota tidak memiliki kemampuan untuk membayar pelayanan kota karena rendahnya pendapatan mereka.
- b. faktor sosial yaitu dimana penduduk perkampungan kumuh dan rumah-rumah liar tidak mempunyai hak milik yang sah terhadap lahan yang mereka tempati, oleh karena itu mereka merasa tidak harus membayar biaya penyediaan dan

pemakaian fasilitas pelayanan. Sementara itu pemerintah enggan untuk menyediakan pelayanan seperti saluran air bersih, listrik dan saluran air kotor untuk mereka.

- c. Sistem administrasi pemerintah kota dan lembaga-lembaga lainnya, yang menentukan prioritas kebutuhan pelayanan, merencanakan program dan melaksanakan pembangunan. Akses penduduk miskin terhadap mereka sangat terbatas karena tidak memiliki lembaga formal untuk menyampaikan keinginan mereka.
- d. Standar pemerintah untuk pelayanan kota biasanya terlalu tinggi, sehingga membutuhkan biaya yang tinggi untuk mendapatkan pelayanannya. Pada akhirnya pelayanan tersebut lebih banyak dimanfaatkan oleh penduduk dengan pendapatan menengah.
- e. Penduduk miskin kota biasanya tidak terorganisasi. Sifat dan heterogenitas latar belakang sosial serta kemiskinan menghalangi terbentuknya organisasi kelompok masyarakat. Dengan demikian, mereka tidak mungkin untuk menuntut hak jaminan pemenuhan pelayanan dasar kota.

Adanya keterbatasan dalam menerapkan suatu kebijaksanaan telah memperlihatkan ketidakmampuan administrasi dan politik dari pemerintah dan perencana untuk mengalokasikan sumber daya untuk menyediakan pelayanan dasar perkotaan untuk penduduk miskin.

#### **2.1.4 Bentuk Kemiskinan Perkotaan**

Kemiskinan yang terjadi di perkotaan dapat menciptakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Terciptanya Permukiman kumuh dan liar

Tempat tinggal biasanya diwujudkan dalam bentuk fisik berupa rumah yang berfungsi sebagai wadah untuk lembaga terkecil masyarakat manusia, yang sekaligus dapat dipandang sebagai “*shelter*” bagi tumbuhnya rasa aman atau terlindungi. Suatu kawasan perumahan lengkap dengan prasarana lingkungan, prasarana umum, dan fasilitas sosial yang mengandung keterpaduan kepentingan dan keselarasan pemanfaatan

sebagai lingkungan kehidupan. (Soedarsono, 1992: 1). Dengan demikian, maka pengertian permukiman dapat dirumuskan sebagai suatu kawasan perumahan yang ditata secara fungsional sebagai satuan sosial, ekonomi dan fisik tata ruang, dilengkapi dengan prasarana lingkungan, sarana umum, dan fasilitas sosial. Kawasan tersebut merupakan suatu lingkungan yang ada untuk mendukung kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Disamping itu, juga memberi rasa aman, tenteram, nikmat, nyaman dan sejahtera, dalam keselarasan, keserasian dan keseimbangan agar berfungsi sebagai wadah yang dapat melayani kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat.

Namun, kemiskinan menyebabkan permukiman masyarakat setempat tidak dapat sesuai dengan definisi di atas. Terciptanya permukiman kumuh dan liar di perkotaan menggambarkan kemiskinan akan selalu nampak.

Dari beberapa pendapat para pakar dan institusi terkait dapat disimpulkan bahwa permukiman kumuh dan liar dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

- *Aspek fisik*  
Berbagai sarana seperti jalan, saluran air limbah dan sebagainya dibangun serba terbatas. Juga pembangunan perumahannya dilakukan tanpa pedoman dan rencana.
- *Aspek sosial ekonomi*  
Permukiman tersebut merupakan tempat tinggal sebagian besar golongan berpenghasilan rendah (Cohen, 1975: 54). Ia adalah tempat penduduk yang status sosial dan ekonominya rendah dan kondisi perumahan dibawah standar (Krausse, 1976: 1).
- *Aspek tata ruang*  
Kampung tumbuh dan berkembang secara organik (*organic pattern*) yang pada akhirnya menjelma menjadi permukiman kumuh. Kampung semacam ini biasanya tumbuh di pusat kota (Pontoh, 1994: 17).

- *Aspek hukum (legalitas)*

Permukiman kumuh tidak selalu liar, demikian dengan liar tidak selamanya kumuh. Hunian liar dikaitkan dengan status kepemilikan tanah yaitu hunian yang dibangun diatas tanah bukan haknya (orang lain atau negara). Permukiman liar di kota sebagian besar berada diatas tanah negara. Jadi bila ada permukiman kumuh yang menempati tanah negara atau bukan haknya merupakan permukiman umuh sekaligus liar. Dengan demikian berarti ada kumuh tidak liar yaitu permukiman yang didirikan diatas tanah milik atau tanah negara yang sudah diberikan haknya (hak guna bangunan dan hak guna usaha) dengan tata letak bangunan yang tidak beraturan. Dan ada permukiman liar tidak kumuh yaitu bangunan yang didirikan diatas tanah bukan haknya yang menyadari akan kebersihan dan keindahan lingkungannya.

- b. Munculnya Sektor Informal (*self employed*)

Kemiskinan menyebabkan munculnya sektor informal di perkotaan. Sektor informal terbentuk karena revolusi industri telah mengubah cara berproduksi (*models of production*) manusia dari bekerja yang semula dilakukan dengan tangan kepada bekerja yang dilakukan dengan menggunakan mesin, dari semula orang bekerja dirumah berubah menjadi bekerja di pabrik atau kantor. Manusia yang semula bekerja atas dasar sektor informal dengan datangnya mesin terpaksa harus berhenti menggunakan cara-cara berproduksi dasar. Sektor informal dan buruh dari sekelompok orang yang memiliki pabrik-pabrik. Muncullah organisasi produksi baru yang didasarkan pada hubungan kerja antara majikan dan buruh. Masyarakat miskin berpendidikan rendah sulit untuk mengikuti prosedur perusahaan industri. Hal ini berakibat pada kehilangan mata pencaharian. Untuk itu, masyarakat miskin cenderung mencari nafkah dengan berjualan keliling dan lain sebagainya.

Permukiman kumuh dan sektor informal tercipta akibat pola mobilitas penduduk. Kondisi lingkungan yang dibawah standard tanpa sarana dan prasarana

yang memadai, bukan merupakan permasalahan yang besar. Kedekatan dengan lapangan kerja, khususnya dalam sektor informal seperti sebagai buruh industri dan bangunan, buruh pasar, bengkel, pengolahan sampah atau bahan bekas dan lain-lain merupakan faktor penentu yang jauh lebih penting. Bagi kalangan masyarakat mampu dengan penghasilan yang cukup dan tidak menghadapi masalah berkaitan dengan biaya transportasi dari rumah ketempat kerja, belanja dan rekreasi, ikatan terhadap lokasi perumahannya tidak terlalu kuat. Kontak sosial mereka tidak lagi pada tangga dekat keluar dari batas-batas lingkungan perumahannya. Apalagi dengan adanya jaringan komunikasi telepon.

Dari sudut pandang ekonomi, masyarakat miskin tidak memiliki posisi yang kuat untuk melawan kekuatan dari luar. Akan tetapi dari sudut pandang sosial, mereka memiliki daya tahan (resistensi) yang tinggi dalam mempertahankan eksistensinya. *“For those with a weak economic important: they are more bound to their neighborhood”* (Nientied, 1982: 24).

Salah satu penyebab lain terjadinya resistensi yang tinggi dari para penghuni permukiman kumuh untuk tetap berada di lokasi semula adalah jarak yang dekat antara permukiman kumuh dengan pusat-pusat lapangan kerja yang digelutinya. Kebanyakan permukiman kumuh berada di tempat-tempat yang strategis di pusat kota (sekitar pasar, dekat rumah sakit, dibelakang pegudangan, dan lain-lain), di tengah kota (menempati lahan kuburan, ditepi sungai, dibelakang pertokoan), atau di pinggiran kota dekat tempat pembuangan sampah, diatas tanggul).

Meskipun strategis, lokasi-lokasi yang diserbu oleh para migran untuk dijadikan lingkungan permukiman tersebut bukan lokasi yang ditetapkan sebagai daerah permukiman. Oleh karena itu, permukiman kumuh selain mengandung pengertian kotor, jorok, padat dan tidak teratur, juga menyiratkan kesan liar atau tidak bersih dan memang arti dari *“squatters”* adalah mereka yang menempati jalan yang bukan miliknya tanpa hak atau ijin.

## **2.2 Sebab Terjadinya Kemiskinan di Perkotaan**

Menurut Loekman Sutrisno (1999 : 5), kemiskinan merupakan sebuah pertanyaan yang tidak menarik dan sekaligus berbahaya. Pertanyaan tentang sebab tersebut pada akhirnya akan mengarah pada proses kemiskinan – bagaimana orang menjadi miskin. Tentu saja banyak pandangan yang berusaha untuk menjelaskan adanya kemiskinan tersebut. Berikut akan dibahas mengenai tiga pandangan tentang kemiskinan.

Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia, orang miskin pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang berada diluar sector ekonomi yang “terorganisasi”, yaitu petani-petani yang bekerja sendiri di pedesaan dan orang-orang di sektor informal (*self employed*) perkotaan yang tumbuh pesat dan tidak mendapatkan pekerjaan yang memadai. Pertumbuhan absolut jumlah orang miskin di perkotaan menyebabkan perhatian dan upaya penanganan kemiskinan kota menjadi suatu “agenda” penting dalam lingkup pembangunan kota.

### **2.2.1 Pandangan Konservatif**

Pandangan ini beranggapan bahwa pasar bebas dapat menjadi pondasi bagi kebebasan ekonomi dan politik, yang juga akan memungkinkan demokrasi. Perbedaan-perbedaan dikalangan masyarakat semata-mata dipandang sebagai akibat dari perbedaan individu, pembawaan (bakat) dan karakter, termasuk motif hidup. Tidak ada masalah dalam sistem, sebab sistem telah dianggap final atau tidak dapat diganggu gugat. Bahkan pandangan ini percaya bahwa pada masa depan akan terjadi suatu kondisi yang menguntungkan bagi semua pihak. (Sutrisno, 1999 : 6).

Jika sekarang terdapat golongan miskin, maka menurut pandangan tersebut, pangkal masalah ada pada orang miskin itu sendiri. Mereka yang miskin itu dinilai pemalas, bodoh dan tidak punya keinginan untuk maju, kurang keterampilan serta hidup dalam kebudayaan yang anti kemajuan (anti modernisasi). Secara prinsip pandangan ini mendekati masalah dari sisi urban dan lebih cenderung menyalahkan korban. Oleh karena itu, untuk merubah mereka yang miskin tersebut, maka perlu dilakukan intervensi, terutama bagi rekayasa

individu mengubah mentalitas si miskin agar memiliki daya hidup dan ketahanan dalam menghadapi tantangan dan perkembangan. Pendidikan-pendidikan untuk memacu motivasi seseorang, pemberian latihan-latihan keterampilan, dapat dikatakan bersumber pada pandangan ini.

### **2.2.2 Pandangan Liberal**

Dalam pandangan ini, sistem dianggap tidak bermasalah, letak masalah pada bagaimana sistem tersebut bekerja. Adanya kebocoran, in-efisiensi, tidak adanya kontrol, korupsi, kolusi, nepotisme, hukum tidak berjalan, dan lain-lain, dipandang sebagai sumber masalah. Kesemuanya menunjukkan bahwa sistem tidak berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat distorsi yang mengakibatkan fungsi dasar sistem menjadi mandul, dan di sisi lain menjadi faktor yang mempersempit kesempatan pada sebagian orang dan membuka kesempatan pada bagian yang lain (khususnya yang berada dekat dengan kekuasaan). Pada prinsipnya pandangan ini tidak mempersoalkan struktur sosial, sehingga arah perubahannya pun tidak akan sampai pada perubahan struktur sosial. (Sutrisno, 1999 : 12).

Terhadap kemiskinan, golongan ini berpendapat, bahwa adanya kemiskinan disebabkan oleh kesempatan yang tidak sama yang merupakan sebagai akibat dari manajemen yang amburadul (berantakan dan tidak profesional). Oleh sebab itu, jika orang miskin diberi kesempatan berusaha, maka masalah kemiskinan akan dapat diatasi. Pada sisi lain, untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, diperlukan kontrol publik. Untuk keperluan itu diperlukan adanya jaminan agar masyarakat bebas dari segala tata aturan yang menghambat gerak maju mereka, dan dengan itu diharapkan masyarakat dapat menjalankan fungsi kontrol yang ketat, termasuk menghidupkan supremasi hukum. Usaha-usaha yang kini berkembang dalam skema (bungkus) gerakan reformasi, dapat dikatakan sebagai model dari pandangan liberal.



### 2.2.3 Pandangan Transformatif

Berbeda dengan dua pandangan diatas, pandangan ini berangkat dari sistem (struktur dan kultural) sosial sebagai titik persoalan. Ketidakadilan bersumber pada sistem yang bukan saja memungkinkan ketidakadilan, tetapi juga memuat ketidakadilan itu sendiri. Dalam pandangan transformatif, persoalan yang kini berkembang tidak akan pernah dapat diselesaikan dengan tuntas, selama sistem tidak mengalami transformasi, diubah dengan sistem baru yang berdiri diatas fondasi keadilan. (Sutrisno, 1999 : 26).

Dalam kasus perubahan, sebagai contoh pandangan transformatif akan melihat kemiskinan di sektor perburuhan sebagai akibat dari hubungan produksi yang tidak adil. Kaum buruh hanya menjadi objek, pihak yang menjual tenaga untuk mendapatkan upah, dan sama sekali tidak memiliki andil untuk menentukan proses produksi termasuk menentukan besarnya upah yang selayaknya mereka terima. Di sektor pertanian, kemiskinan kaum tani dipandang sebagai akibat ketimpangan dalam struktur penguasaan sumber-sumber agraria (termasuk tanah); sehingga kaum tani tetap tidak bisa hidup dalam kecukupan, namun sebaliknya malah mengalami ketertindasan yang panjang. Dua kasus ini merupakan suatu contoh akibat yang lebih luas dari ketidakadilan yang termuat dalam sistem. Usaha-usaha untuk menaikkan upah buruh, menaikkan harga gabah, tanpa melibatkan perubahan yang mendasar, terbukti tidak banyak memberikan arti pada perbaikan kehidupan perekonomian masyarakat.

Kemiskinan bukan diakibatkan oleh kesalahan si miskin (korban), tidak pula dilihat sebagai salah arus, melainkan sebagai akibat struktur, terutama yang berkaitan dengan aset produksi yang timpang, sehingga memungkinkan pihak lain menentukan dan sekaligus menjadi penikmat pertama dari segala hasil. Masalah kemiskinan tidak bersifat spesifik (hanya ada disuatu daerah), melainkan perlu dilihat secara makro, termasuk sistem dunia yang menjadikan negara-negara utara lebih mampu dari negara-negara selatan. Pola hubungan utara-selatan dalam kerangka ini menjadi penting untuk dipersoalkan. Dalam pandangan ini, hubungan kekuasaan laki-laki dan perempuan menjadi bagian dari masalah yang perlu ditransformasikan, agar tercipta suatu keadilan bagi semua orang.

#### 2.2.4 Penyebab Dasar Kemiskinan

Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa didefinisikan dengan sangat sederhana, karena tidak hanya berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga sangat berkaitan dengan dimensi kehidupan manusia yang lain. Menurut Bank Dunia (2003), terdapat beberapa penyebab dasar dari kemiskinan adalah sebagai berikut:

- a) kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal;
- b) terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;
- c) kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sektor;
- d) adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung;
- e) adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antara sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);
- f) rendahnya produktivitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat;
- g) budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya;
- h) tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*);
- i) pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

Selain itu, faktor sosial ekonomi juga dijadikan penyebab kemiskinan. Hal ini didasarkan atas hasil rangkuman literatur sebagai berikut.

##### a. Tingkat Pendidikan Penduduk

Teori yang dapat dijadikan pijakan yang mendukung bahwa tingkat pendidikan termasuk di dalamnya pengetahuan, ketrampilan serta informasi dapat dijadikan salah satu faktor yang menentukan sasaran penerima bantuan kemiskinan.

Pendapat-pendapat itu dapat dilihat dalam tabel II.1 berikut ini.

**TABEL II.1**  
**SINTESIS FAKTOR TINGKAT PENDIDIKAN**

Tokoh	Pernyataan
Friedmann, 1979	Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial meliputi :....., dan lain-lain : <b>pengetahuan dan ketrampilan</b> yang memadai : dan <b>informasi</b> yang berguna untuk memajukan kehidupan anda.
Ala, 1981	Nilai-nilai ini berkaitan erat dengan kebutuhan dasar manusia yakni....., <b>pendidikan</b> ,.....
Adler Karlsson, 1978	<b>Pendidikan</b> dan ....juga harus termasuk dalam pengukuran kemiskinan absolut
World Bank, 1980	Beberapa aspek kemiskinan yaitu:....., dan <b>pendidikan</b> yang rendah
Hendratta, 1979	Suatu penelitian dalam masyarakat akan menunjukkan ruwet dan kompleksnya hubungan diantara berbagai manifestasi kemiskinan yakni:....., <b>buta huruf</b> ,.....
Ala, 1981	Terdapat ada 10 macam nilai, sehingga dengan demikian terdapat sepuluh dimensi atau aspek kemiskinan, yakni,... <b>pendidikan dan pengetahuan, ketrampilan dan keahlian</b> ,.....
Salim, 1980	Orang miskin memiliki lima ciri ...., <b>tingkat pendidikan</b> merasa rendah, tak sampai tamat sekolah dasar.

Sumber: Hasil sintesa, 2006

#### b. Pekerjaan Penduduk

Pekerjaan penduduk setempat merupakan salah satu faktor yang menentukan sasaran bantuan program kemiskinan. Pendapat-pendapat yang mendukung pernyataan ini antara lain:

**TABEL II.2**  
**SINTESIS FAKTOR PEKERJAAN**

Tokoh	Pernyataan
Friedmann, 1979	Kemiskinan mendefinisikan sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial meliputi:....., network atau jaringan sosial untuk memperoleh <b>pekerjaan</b> , .....
Adler Karlsson, 1978	<b>Tenaga kerja</b> juga harus termasuk didalam pengukuran kemiskinan absolut
Hendratta, 1979	Suatu penelitian dalam masyarakat akan menunjukkan ruwet dan kompleksnya hubungan di antara berbagai manifestasi kemiskinan:....., <b>pengangguran</b> .....

Lanjutan

Tokoh	Pernyataan
Ala, 1981	Nilai-nilai ini berkaitan erat dengan kebutuhan dasar manusia yakni:....., <b>pekerjaan</b> ,.....

Sumber: Hasil sintesa, 2006

### c. Tingkat Pendapatan Penduduk

Pendapatan penduduk dijadikan salah satu faktor yang menentukan sasaran penerima bantuan kemiskinan berdasarkan pendapat-pendapat dalam tabel berikut ini.

**TABEL II.3**  
**SINTESIS FAKTOR PENDAPATAN**

Tokoh	Pernyataan
Salaim, 1980	Kemiskinan biasanya dilukiskan sebagai kurangnya <b>pendapatan</b> untuk memenuhi kebutuhan hidup yang pokok.
Friedmann, 1979	Kemiskinan didefinisikan ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasi basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial meliputi (tidak terbatas pada):.....sumber-sumber keuangan ( <b>income</b> dan kredit yang memadai).
World Bank, 1980	Beberapa aspek kemiskinan yaitu: <b>income</b> atau <b>pendapatan</b> yang rendah.

Sumber: Hasil sintesa, 2006

## 2.3 Indikator Kemiskinan

Berdasarkan sebab terjadinya kemiskinan di perkotaan, maka indikator utama kemiskinan dapat dirumuskan sebagai berikut:

### a. Menurut BAPPENAS

BAPPENAS merumuskan Indikator-indikator kemiskinan dengan rumusan yang konkrit berikut ini:

- terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, dilihat dari stok pangan yang terbatas, rendahnya asupan kalori penduduk miskin dan buruknya status gizi bayi, anak balita dan ibu. Sekitar 20 persen penduduk dengan tingkat pendapatan terendah hanya mengkonsumsi 1.571 kkal per hari. Kekurangan asupan kalori, yaitu kurang dari 2.100 kkal per hari, masih dialami oleh 60 persen penduduk berpenghasilan terendah (BPS, 2004);

- terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan disebabkan oleh kesulitan mendapatkan layanan kesehatan dasar, rendahnya mutu layanan kesehatan dasar, kurangnya pemahaman terhadap perilaku hidup sehat, dan kurangnya layanan kesehatan reproduksi; jarak fasilitas layanan kesehatan yang jauh, biaya perawatan dan pengobatan yang mahal. Di sisi lain, utilisasi rumah sakit masih didominasi oleh golongan mampu, sedang masyarakat miskin cenderung memanfaatkan pelayanan di PUSKESMAS. Demikian juga persalinan oleh tenaga kesehatan pada penduduk miskin, hanya sebesar 39,1 persen dibanding 82,3 persen pada penduduk kaya. Asuransi kesehatan sebagai suatu bentuk sistem jaminan sosial hanya menjangkau 18,74 persen penduduk, dan hanya sebagian kecil di antaranya penduduk miskin;
- terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan yang disebabkan oleh kesenjangan biaya pendidikan, fasilitas pendidikan yang terbatas, biaya pendidikan yang mahal, kesempatan memperoleh pendidikan yang terbatas, tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung;
- terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah serta lemahnya perlindungan kerja terutama bagi pekerja anak dan pekerja perempuan seperti buruh migran perempuan dan pembantu rumahtangga;
- terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi. Masyarakat miskin yang tinggal di kawasan nelayan, pinggiran hutan, dan pertanian lahan kering kesulitan memperoleh perumahan dan lingkungan permukiman yang sehat dan layak. Dalam satu rumah seringkali dijumpai lebih dari satu keluarga dengan fasilitas sanitasi yang kurang memadai;
- terbatasnya akses terhadap air bersih. Kesulitan untuk mendapatkan air bersih terutama disebabkan oleh terbatasnya penguasaan sumber air dan menurunnya mutu sumber air;
- lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah. Masyarakat miskin menghadapi masalah ketimpangan struktur penguasaan dan kepemilikan tanah, serta ketidakpastian dalam penguasaan dan kepemilikan lahan pertanian.

Kehidupan rumah tangga petani sangat dipengaruhi oleh aksesnya terhadap tanah dan kemampuan mobilisasi anggota keluarganya untuk bekerja di atas tanah pertanian;

- memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam. Masyarakat miskin yang tinggal di daerah perdesaan, kawasan pesisir, daerah pertambangan dan daerah pinggiran hutan sangat tergantung pada sumberdaya alam sebagai sumber penghasilan;
  - lemahnya jaminan rasa aman. Data yang dihimpun UNSFIR menggambarkan bahwa dalam waktu 3 tahun (1997-2000) telah terjadi 3.600 konflik dengan korban 10.700 orang, dan lebih dari 1 juta jiwa menjadi pengungsi. Meskipun jumlah pengungsi cenderung menurun, tetapi pada tahun 2001 diperkirakan masih ada lebih dari 850.000 pengungsi di berbagai daerah konflik;
  - lemahnya partisipasi. Berbagai kasus penggusuran perkotaan, pemutusan hubungan kerja secara sepihak, dan pengusiran petani dari wilayah garapan menunjukkan kurangnya dialog dan lemahnya partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan. Rendahnya partisipasi masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan juga disebabkan oleh kurangnya informasi baik mengenai kebijakan yang akan dirumuskan maupun mekanisme perumusan yang memungkinkan keterlibatan mereka;
  - besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga dan adanya tekanan hidup yang mendorong terjadinya migrasi. Menurut data BPS, rumahtangga miskin mempunyai rata-rata anggota keluarga lebih besar daripada rumahtangga tidak miskin. Rumahtangga miskin di perkotaan rata-rata mempunyai anggota 5,1 orang, sedangkan rata-rata anggota rumahtangga miskin di perdesaan adalah 4,8 orang.
- b. Menurut Bank Dunia

Indikator utama kemiskinan menurut Bank Dunia adalah:

- Kepemilikan tanah dan modal yang terbatas,
- Terbatasnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan,

- Pembangunan yang bias kota,
- Perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat,
- Perbedaan sumber daya manusia dan sektor ekonomi,
- Rendahnya produktivitas,
- Budaya hidup yang jelek,
- Tata pemerintahan yang buruk, dan
- Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan.

Berdasarkan pendapat diatas, maka indikator utama kemiskinan dapat dirumuskan sebagai berikut:

**TABEL II.4**  
**INDIKATOR UTAMA KEMISKINAN**

INDIKATOR	KETERANGAN
Ekonomi rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan;</li> <li>▪ Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha;</li> <li>▪ Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga;</li> </ul>
Terbatasnya sarana dan prasarana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan;</li> <li>▪ Terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan;</li> <li>▪ Terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi;</li> <li>▪ Terbatasnya akses terhadap air bersih;</li> <li>▪ Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam;</li> </ul>
Terbatasnya perlindungan sosial dan politik	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, dan perbedaan upah;</li> <li>▪ Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah;</li> <li>▪ Lemahnya jaminan rasa aman;</li> <li>▪ Lemahnya partisipasi;</li> <li>▪ Tata kelola pemerintahan yang buruk yang menyebabkan inefisiensi dan inefektivitas dalam pelayanan publik, meluasnya korupsi dan rendahnya jaminan sosial terhadap masyarakat.</li> </ul>

*Sumber: Hasil Sintesis, 2006*

## 2.4 Pola Kemiskinan

Kemiskinan dalam pengertian konvensional pada umumnya (income) komunitas yang berada dibawah satu garis kemiskinan tertentu. Oleh karena itu sering sekali upaya pengentasan kemiskinan hanya bertumpu pada upaya peningkatan pendapatan komunitas tersebut. Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan permasalahan kemiskinan dari segi pendapatan saja tidak mampu memecahkan permasalahan komunitas. Karena permasalahan kemiskinan komunitas bukan hanya masalah ekonomi namun meliputi berbagai masalah lainnya. Kemiskinan dalam berbagai bidang ini disebut dengan kemiskinan plural. Menurut Max-Neef et. al, sekurang-kurangnya ada 6 macam kemiskinan yang ditanggung komunitas dan membentuk suatu pola kemiskinan tertentu, yaitu :

1. Kemiskinan sub-sistensi, penghasilan rendah, jam kerja panjang, perumahan buruk, fasilitas air bersih mahal.
2. Kemiskinan perlindungan, lingkungan buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), kondisi kerja buruk, tidak ada jaminan atas hak pemilikan tanah.
3. Kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk, terbatasnya akses atas informasi yang menyebabkan terbatasnya kesadaran atas hak, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan.
4. Kemiskinan partisipasi , tidak ada akses dan kontrol atas proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas.
5. Kemiskinan identitas, terbatasnya perbauran antar kelompok sosial, terfragmentasi.
6. Kemiskinan kebebasan, stres, rasa tidak berdaya, tidak aman baik di tingkat pribadi maupun komunitas.

Sedangkan Ridlo (2001: 11) mengatakan terdapat beberapa pola kemiskinan, (a) dari pola waktunya yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun (*persistent proverty*); (b) *cylical proverty* yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; (c) *seasonal proverty* yaitu kemiskinan musiman seperti yang sering terjadi pada kasus-kasus nelayan dan



petani tanaman pangan; dan (d) *accidental proverty* yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

## 2.5 Karakteristik Permukiman Nelayan

Menurut Suprijanto (2000 : 16), karakteristik ekonomi, sosial dan budaya dari kota tepi pantai, tempat berkembangnya permukiman nelayan adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki keunggulan lokasi yang dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi;
- b. Penduduk mempunyai kegiatan sosial-ekonomi yang berorientasi ke air dan darat;
- c. Rata-rata penduduk golongan ekonomi lemah, dengan latar belakang pendidikan relatif terbatas
- d. Pengetahuan akan lingkungan sehat cenderung masih kurang, terjadi kebiasaan '*tidak sadar lingkungan*' serta cenderung kurang memperhatikan bahaya dan resiko.
- e. Terdapat peninggalan sejarah/budaya seperti museum bahari, dsb.
- f. Terdapat masyarakat yang secara tradisi terbiasa hidup (bahkan tidak dapat dipisahkan) di atas air, seperti masyarakat Bajo. Terdapat pula budaya/tradisi pemanfaatan perairan sebagai sarana transportasi utama.
- g. Merupakan kawasan terbuka (akses langsung), sehingga rawan terhadap keamanan, seperti penyelundupan, penyusupan (masalah pertahanan dan keamanan) dsb.

Sedangkan karakteristik perumahan dan permukiman di kota tepi pantai (permukiman nelayan) adalah sebagai berikut:

- a. Kawasan permukiman di atas air cenderung rapat (kepadatan bangunan tinggi dan jarak antar bangunan rapat) dan kumuh (tidak teratur, kotor, dll). Dominasi kawasan perumahan/ permukiman nelayan, yang umumnya kumuh dan belum tertata.

- b. Daerah atas air pada umumnya cenderung memiliki pola cluster, yang tidak teratur dan organik. Pada daerah-daerah yang telah ditata umumnya menggunakan pola grid atau linear sejajar garis badan perairan.
- c. Orientasi bangunan semula umumnya menghadap perairan sesuai orientasi kegiatan berbasis perairan. Perkembangan selanjutnya orientasi kegiatan ke darat semakin meningkat (bahkan lebih dominan), maka orientasi bangunan cenderung menghadap ke arah darat dan lebih mempertimbangkan aspek fungsional dan aksesibilitas.
- d. Secara arsitektural, bangunan pada permukiman di kota pantai dibedakan atas:
  - Bangunan di atas tanah;
  - Bangunan panggung di darat;
  - Bangunan panggung di atas air;
  - Bangunan rakit di atas air (pernah ada dan saat ini sudah jarang dijumpai);Arsitektural bangunan dibuat dengan kaidah tradisional maupun modern, sesuai dengan latar belakang budaya dan suku/etnis masing-masing.
- e. Tipologi bangunan menggunakan struktur dan konstruksi sederhana, tradisional dan konvensional, yang kurang memperhitungkan pengaruh angin, tsunami, gempa, dll.

Adapun kondisi sarana dan prasarana lingkungan di permukiman tepi pantai adalah sebagai berikut:

- a. Sistem dan pola jaringan jalan di darat umumnya sudah terpola, memadai serta dapat melayani fungsi-fungsi yang ada. Hanya beberapa konstruksi jalan perlu disesuaikan dengan standar dan tingkat pelayanan yang harus disediakan. Jalan setapak dan beberapa jalan lingkungan umumnya berpola organik mengikuti pola perumahan. Sistem jaringan jalan di daerah pasang surut dan bertanah lunak umumnya menggunakan konstruksi batu (dengan perkerasan atau makadam) atau konstruksi kayu, sedangkan jaringan jalan di atas air sepenuhnya menggunakan konstruksi kayu. Pola jaringan jalan umumnya tidak teratur/organik mengikuti perkembangan bangunan dan tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4.

- b. Sistem drainase memerlukan penanganan relatif lebih rumit, karena merupakan daerah retensi yang sering tergenang air/banjir dan menjadi muara daerah hulunya;
- c. Pembuangan air limbah memerlukan penanganan khusus, karena muka air tanah yang tinggi serta menjadi muara daerah hulunya. Masyarakat cenderung membuang air limbah langsung ke badan air, baik dari kakus individu maupun MCK;
- d. Kebutuhan air bersih biasanya belum tercukupi karena pada umumnya belum terjangkau jaringan air bersih/minum kota (PAM/PDAM) dan kondisi air tanah yang dijadikan sumber air bersih kebanyakan payau, sehingga perlu penjernihan air.
- e. Umumnya sampah dibuang/ditimbun di pinggir laut atau dibuang langsung ke laut sehingga sering menimbulkan bau serta menjadi sarang lalat dan nyamuk.

Karakteristik status hukum (legalitas) dari permukiman tepi pantai umumnya tidak jelas, terutama area yang direklamasi secara swadaya oleh masyarakat. Pengakuan legal umumnya tidak ada, tetapi pelarangan atau pengaturan juga tidak ada. Contoh kasus Pantai Cilincing, Jakarta Utara.

## **2.6 Pendekatan, Metode dan Pola Pembangunan dalam Mengatasi Kemiskinan Perkotaan**

### **2.6.1 Pendekatan dalam Mengatasi Kemiskinan Perkotaan**

Kelompok humanis mengartikan bahwa pembangunan adalah sebagai pembebasan dari kemelaratan, memupuk harga diri, untuk membuat pemilihan-pemilihan mengenai masa depan, selanjutnya pembangunan juga diartikan sebagai hal yang memiliki tiga nilai utama yaitu:

1. Menunjang kelangsungan hidup
2. Memupuk harga diri dan percaya diri
3. Upaya pendemokrasian

Namun di negara-negara yang sedang berkembang, para penentu kebijakan kota lebih sering menilai bahwa pembangunan identik dengan pertumbuhan, sehingga pemecahannya pun terfokus pada pemecahan dilema industrialisasi dan urbanisasi. Paradigma tersebut terpangkal pada pengaruh industrialisasi dan urbanisasi yang berimplikasi terhadap kepadatan penduduk, penyakit, pengangguran, penghunian illegal dan kumuh (baik *squartters* maupun *slums*). Pada gilirannya menghambat terciptanya administrasi yang efektif.

Gejala munculnya perkampungan miskin identik dengan lingkungan permukiman yang kumuh di perkotaan, tidak lepas kaitannya dengan fenomena kemiskinan yang dijumpai di perkotaan terutama dinegara dunia ketiga termasuk Indonesia. Dalam mengkaji awal tumbuhnya perkampungan miskin diperkotaan sebagai produk kegagalan urbanisasi dan proses migrasi desa-kota sebagai penyebabnya, dapat pula dilihat dari pada “teori dasar marginalitas dan teori ketergantungan”. Kedua teori tersebut mempunyai asumsi dan penjelasan yang berbeda, demikian juga dengan implikasi kebijakan dalam penanganannya.

a. Pendekatan Permukiman Miskin Dalam Pertumbuhan Kota

Manifestasi dari permukiman miskin dimulai bila tingkat migrasi dari penduduk desa/kota kecil lebih besar dari kemampuan kota menerima atau mengintegrasikan penduduk tersebut pada struktur masyarakat kota yang sudah ada..sedangkan di kota metropolitan di negara yang sedang berkembang masih terdapat berbagai masalah pada kegiatan pembangunannya, antara lain seperti:

1. Terjadinya kelalaian akan program urbanisasi
2. Sistem perpajakan tanah
3. Pembangunan jalan secara parsial
4. Penyediaan air bersih kurang baik
5. Tidak/kurang baiknya system pengaliran air hujan dan pembuangan air kotor
6. Tidak/kurang baiknya system transportasi untuk menuju tempat pekerjaan, mengakibatkan orang yang tinggalnya jauh dari kota berusaha untuk tinggal di pusat kota meskipun mendapat tekanan

7. Melonjaknya harga tanah walaupun masih terbatasnya berbagai sarana dan prasarana bagi penduduknya.

Untuk itu tugas “*urban manager*” atau corak planner yang akan datang dalam pembangunan masyarakat pada negara yang sedang berkembang hendaknya menekankan pada pengawasan atas proses perencanaan kota yang menyeluruh. Sistem pemerintahan (administrasi) kota yang dapat diterima, kerja sama dengan peraturan yang berlaku di masyarakat, mempertimbangkan jumlah pemukim *slums and squatters* yang akan selalu bertambah.

b. Pendekatan Model dari Tipe Migran pada Context Urban

Menurut John Turner (dalam Ahmadin, 2000 : 58), dikatakan bahwa untuk dapat memahami keadaan permukiman di suatu kota, dapat dibuat sebuah model dari tipe migran pada *context urban* dengan membandingkan prioritas pemilihan lokasi, tingkat pembangunan untuk mendiami/ memiliki. Hasil menunjukkan prioritas yang membedakan perubahan lingkungan tempat tinggal sebagai keadaan dari perubahan tempat tinggal di kota. Ini dilakukan dengan menggariskan perubahan melalui waktu.

### **2.6.2 Kebijakan Pembangunan dalam Mengatasi Kemiskinan**

Streeten (dalam Syahrir, 1986 : 32) mengatakan terjadinya perbedaan dalam menentukan kebutuhan dasar dari setiap negara, pada hakikatnya didasarkan pada pendekatan tiga tujuan pokok yaitu:

1. Terpenuhinya kebutuhan minimum keluarga untuk onsumsi; pangan, sandang, papan dan sebagainya.
2. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik (*access to public services*).
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam formasi dan implementasi program atau kebijaksanaan yang menyangkut diri masyarakat.

Untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dasar minimal dari setiap negara, peranan pemerintah sangat penting dalam menyalurkan pelayanan masyarakat (*public service*). *Public service* yang dilakukan birokrasi pemerintahan pada

negara-negara berkembang terus menerus meningkat sejalan dengan penambahan penduduk, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh arus informasi maupun dinamika dan tuntutan masyarakat (Rodinnelle, 1989 : 14). Dalam paradigma pembangunan untuk pemenuhan kebutuhan dasar manusia dan masyarakat miskin selain dibutuhkan pelayanan publik yang efisien dan efektif oleh birokrasi pemerintahan, juga dituntut terciptanya suatu kondisi yang memberikan akses yang sama pada setiap penduduk dalam memperoleh pelayanan publik.

Strategi dan pendekatan pembangunan yang lebih memfokuskan pada keunggulan potensi untuk memperbaiki proses pelaksanaan pembangunan dengan memberi kekuatan, kesempatan dan kekuasaan individu, kelompok sasaran lokal, masyarakat serta struktur kelembagaan pembangunan (*capacity, capability and institutional locally*), agar berpartisipasi dalam proses pembangunan. Pendekatan ini berusaha untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada birokrasi pemerintahan. Birokrasi pemerintahan dalam pelayanan publik hendaknya lebih melakukan peran dan fungsi sebagai “*steering organization*” ketimbang sebagai “*rowing organization*” untuk menjamin tumbuhnya *self-sustaining capacity* masyarakat menuju *sustained development* seperti disarankan seperti disarankan Osborne dan Gaebler, (1992 : 47).

### **2.6.3 Pola Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Miskin**

Konsep bahwa perumahan adalah komoditi atau serupa dengan benda konsumsi yang diperjual-belikan begitu saja menyebabkan kebijakan dan program yang digariskan tertuju pada pembangunan rumah-rumah baru dengan target kuantitas fisik, untuk dipasarkan sesuai dengan hukum penawaran dan permintaan sesuai dengan mekanisme pasar. Namun, konsep tersebut kurang tepat, karena selain sebagai tempat berlindung (*shelter*) perumahan juga merupakan benda kebutuhan sosial (*socially desirable good*) yang banyak berpengaruh terhadap kesehatan, kesejahteraan dan berfungsinya keluarga. Hal ini menyebabkan perubahan kebijakan dan program perumahan, dimana perumahan ditujukan pada segenap lapisan masyarakat (khususnya yang berpenghasilan rendah) dengan

berbagai alternatif seperti permejaan kota, penyediaan kavling siap bangunan atau “*site and service*” dan pembangunan infrastruktur lainnya.

#### **2.6.4 Pendekatan Berperspektif Perencanaan Sosial**

Konsep komunitas tampaknya kurang diperhatikan dalam proses perencanaan kota terutama dalam pengentasan kemiskinan perkotaan, padahal komunitas merupakan suatu unit sosial yang penting secara sosiologis dan unsur ini sebenarnya dapat menjadi penentu keberhasilan pembangunan sosial di perkotaan.

Kurangnya perhatian pada analisis potensi sosial pada suatu komunitas merupakan cermin dari kurangnya perhatian terhadap variabel-variabel sosial dalam perencanaan kota. Seolah-lah ada suatu keyakinan bahwa dinamika sosial secara otomatis akan mengikuti derap pembangunan fisik yang dilakukan, sehingga tidak perlu suatu perencanaan sosial secara khusus.

Perencanaan sosial adalah suatu perencanaan yang fokus utamanya adalah kehidupan bersama, baik kehidupan bersama dalam masyarakat luas maupun dalam masyarakat kecil (*community*). Oleh karena itu, perlu dilakukan pengentasan kemiskinan dengan pendekatan kepada masing-masing komunitas. Hal ini terkait dengan perubahan tingkah laku masyarakat (*behavioural*) serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Perubahan-perubahan yang direncanakan dalam perencanaan sosial bukan perubahan individu-individu secara perseorangan maupun dalam kelompok tertentu melainkan suatu perubahan seluruh masyarakat sebagai suatu sistem.

### **2.7 Pola Kemiskinan di Permukiman Nelayan**

Berdasarkan kajian dan telaah teori-teori di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kemiskinan di daerah perkotaan dapat disebabkan oleh berbagai aspek. Berbedanya aspek pemicu kemiskinan membentuk pola-pola kemiskinan di suatu daerah/kawasan. Begitu juga halnya yang terjadi di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang. Kemiskinan yang terjadi akibat ketimpangan wilayah dengan daerah perkotaan Tanjungpinang dan

pola hidup masyarakat nelayan menyebabkan terbentuknya permukiman nelayan yang kumuh di pinggiran pantai (daerah pinggiran).

Untuk memudahkan memahami aspek-aspek penelitian ini maka dibuat satu gambar teoritik yang merupakan kerangka berfikir berdasarkan teori yang ada. Penentuan aspek penelitian ini berdasarkan hasil sintesis beberapa literatur hasil penelitian terdahulu, yang dapat dilihat Tabel II.5.

**TABEL II.5**  
**HASIL SINTESA LITERATUR**

SASARAN	VARIABEL	SUMBER TEORI
Kondisi fisik kawasan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok	Bentuk kemiskinan perkotaan adalah permukiman liar yang dapat diidentifikasi melalui: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Lokasi</li> <li>◆ Bahan bangunan dinding rumah</li> <li>◆ Kepadatan penduduk</li> <li>◆ Fasilitas perdagangan</li> <li>◆ Fasilitas pendidikan</li> <li>◆ Status kepemilikan tanah</li> </ul>	Permukiman kumuh dan liar (Soedarsono, 1992: 1).
Karakteristik masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok	Karakteristik Sosial dan Politik Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Tingkat Pendidikan</li> <li>◆ Tingkat kesehatan</li> <li>◆ Tingkat partisipasi</li> <li>◆ Pola hidup masyarakat</li> </ul> Karakteristik Ekonomi Masyarakat <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pendapatan masyarakat</li> <li>◆ Mata pencaharian dominan</li> </ul>	Karakteristik masyarakat miskin (Clarence N. Stone, Robert K Whelen, William J. Murin, 1979: 214)
Indikasi Kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok	Indikasi kemiskinan <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Terbatasnya kecukupan dan mutu pangan</li> <li>◆ Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha</li> <li>◆ Terbatasnya akses dan mutu layanan sarana dan prasarana</li> <li>◆ Terbatasnya perlindungan sosial dan politik</li> <li>◆ Lingkungan buruk</li> <li>◆ Lemahnya jaminan rasa aman</li> <li>◆ Besarnya beban kependudukan</li> </ul>	Indikator kemiskinan menurut Bank Dunia dan BAPPENAS



Lanjutan

SASARAN	VARIABEL	SUMBER TEORI
	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Lemahnya kepastian kepemilikan tanah</li> </ul>	
Pola kemiskinan di pemukiman nelayan Kelurahan Dompok	Pola kemiskinan terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kemiskinan sub-sistensi</li> <li>◆ Kemiskinan perlindungan</li> <li>◆ Kemiskinan pemahaman</li> <li>◆ Kemiskinan partisipasi</li> <li>◆ Kemiskinan identitas</li> <li>◆ Kemiskinan Kebebasan</li> </ul>	Pola Kemiskinan menurut Max-Neef et. al
Faktor-faktor penyebab timbulnya kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok.	Faktor penyebab kemiskinan <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Faktor sosial berupa tingkat pendidikan penduduk, tingkat kesehatan penduduk, dan pola hidup masyarakat</li> <li>◆ Faktor ekonomi berupa pekerjaan penduduk dan tingkat pendapatan penduduk</li> <li>◆ Faktor politik berupa tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (<i>good governance</i>); kegagalan kepemilikan terutama tanah dan modal, perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung</li> </ul>	Definisi Kemiskinan menurut Friedmann, Penyebab kemiskinan menurut Bank Dunia.

Sumber: Hasil Sintesa, 2006

### **BAB III**

## **GAMBARAN PERMUKIMAN NELAYAN DI KELURAHAN DOMPAK KOTA TANJUNGPINANG**

### **3.1 Gambaran Umum Kota Tanjungpinang**

#### **3.1.1 Letak Geografis**

Kota Tanjungpinang merupakan daerah yang sangat strategis karena selain menjadi pusat ibu kota Kepulauan Riau, juga merupakan tempat persinggahan dari berbagai jalur perhubungan laut yang menghubungkan antar Kabupaten di Kepulauan Riau seperti; Batam Tanjung Balai, Batam, Singkep Natuna dan kabupaten-kabupaten lain yang berada diwilayah Kepulauan Riau.

Kota Tanjungpinang memiliki batas – batas dengan dengan wilayah lainnya yaitu:

- Sebelah Barat : Kecamatan Bintan Timur
- Sebelah Utara : Kecamatan Galang (Kodya Batam)
- Sebelah Timur : Kecamatan Bintan Timur, dan
- Sebelah Selatan : Kecamatan Galang (Kodya Batam)

Berdasarkan topografinya, Kota Tanjungpinang terletak pada dataran rendah, tanahnya berawa dan hutan bakau. Keadaan tanah yang demikian kurang baik untuk pertanian dalam arti sempit (bertani dan berkebun) karena merupakan tanah pedsolik kuning merah.

Geologi dari Kota Tanjungpinang menyimpan bebatuan metamor dan beku dari zaman pra tersier. Sedangkan bebatuan sedimennya sangat terbatas. Warna tanahnya merah kuning yang terdiri dari organosol dan clay humic, podsolit, litosol, dan latosol serta mengandung bahan mineral berupa bauksit. Alamnya berbukit-bukit, tetapi pantainya landai (BPS Kabupaten Kepulauan Riau, 1999: 5).

Sedangkan iklim yang menyelimuti Pulau Bintan ini, sebagaimana wilayah lainnya di Indonesia, adalah tropis. Meskipun demikian, masyarakatnya tidak hanya mengenal musim yang dua (kemarau dan hujan), tetapi juga mengenal

musim yang didasarkan pada arah angin (utara, selatan, barat dan timur). Kelembaban udaranya sekitar 84% dengan temperatur terendah 23,0 C dan tertinggi 31,8 C.

### 3.1.2 Kependudukan

Berdasarkan data Dinas Kependudukan Kota Tanjungpinang, jumlah penduduk kota pada awal tahun 2003 adalah 127,623 jiwa WNI dan 401 WNA. Total jumlah penduduk Kota Tanjungpinang adalah 128,024 jiwa. Jumlah penduduk diatas selanjutnya dapat dirinci berdasarkan kecamatan, kelurahan, jenis kelamin dan kewarganegaraan seperti terlihat pada tabel berikut.

**TABEL III.1.**  
**JUMLAH PENDUDUK KOTA TANJUNGPINANG**  
**BERDASARKAN KECAMATAN, KELURAHAN,**  
**JENIS KELAMIN DAN KEWARGANEGARAAN**  
**TAHUN 2003**

No	Kecamatan/ Kelurahan	WNI			WNA			WNI + WNA
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1.	<b>TPI BARAT</b>							
	Tg. Pinang Barat	8.398	7.947	16.345	9	6	15	16.360
	Kamboja	6.372	6.486	12.858	123	107	230	13.088
	Kampung Baru	3.739	4.039	7.778	2	6	8	7.786
	Bukit Cermin	4.476	4.540	9.016	9	5	14	9.030
2.	<b>TPI TIMUR</b>							
	Melayu Kt. Piring	3.285	2.867	6.152	0	0	0	6.152
	Kampung Bulang	3.199	3.038	6.237	2	2	4	6.241
	Air Raja	1.734	1.133	2.867	0	0	0	2.867
	Batu IX	2.766	2.673	5.439	61	66	127	5.566
	Pinang Kencana	995	915	1.910	0	0	0	1.910
3.	<b>TPI KOTA</b>							
	Tg. Pinang Kota	3.116	3.116	6.232	2	1	3	6.235
	Kp. Bugis	3.433	2.158	5.591	0	0	0	5.591
	Senggarang	1.818	1.781	3.599	0	0	0	3.599
	Penyengat	1.047	1.125	2.172	0	0	0	2.172
4.	<b>BUKIT BESTARI</b>							
	Tg. Pinang Timur	3.863	3.621	7.484	0	0	0	7.484
	Dompok	906	647	1.553	0	0	0	1.553
	Tg. Aun Sakti	3.375	3.321	6.696	0	0	0	6.696
	Sei. Jang	7.209	7.610	14.819	0	0	0	14.819
	Tg. Unggat	5.696	5.179	10.875	0	0	0	10.875
		65.427	62.196	127.623	208	193	401	128.024

Sumber : Dinas Kependudukan Kota Tanjungpinang Tahun 2003

Mobilitas sosial penduduk Kota Tanjungpinang berdasarkan data Laporan Tahunan Pemerintah Tanjungpinang Tahun 2003 adalah:

**TABEL III.2**  
**MOBILITAS PENDUDUK KOTA TANJUNGPINANG**  
**TAHUN 2003 (JIWA)**

Datang	Pindah	Lahir	Mati
502	301	218	42

*Sumber : Dinas Kependudukan Kota Tanjungpinang Tahun 2003*

Berdasarkan pada data ini dapat disimpulkan bahwa penduduk yang datang menempati urutan tertinggi dari mobilitas sosial, melebihi dari jumlah penduduk yang pindah. Tingginya mobilitas sosial penduduk yang datang dan pindah menunjukkan bahwa transportasi di daerah ini cukup lancar.

### **3.1.3 Sosial Budaya**

Struktur masyarakat dan kebudayaan melayu melongar dan terbuka. Kelonggaran dan keterbukaan masyarakat serta kebudayaan melayu itu disebabkan karena dalam tradisi terwujudnya kebudayaan Melayu terbiasa dengan kontak-kontak dengan dunia luar, proses pembauran, dan akulturasi unsur-unsur kebudayaan sebagaimana ditunjukkan dalam sejarah mereka. Keterbukaan struktur kebudayaan Melayu memungkinkan untuk mengakomodasi perubahan-perubahan kebudayaan yang berbeda-beda, sepanjang hal ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama (Islam), adat-istiadat, dan sopan santun Melayu.

### **3.1.4 Kondisi Perekonomian**

Kondisi perekonomian penduduk Kota Tanjungpinang digambarkan dengan mata pencaharian penduduknya. Mata pencaharian anggota masyarakat Tanjungpinang sangat bervariasi dan kompleks. Namun demikian, jenis lapangan usaha yang digeluti oleh sebagian besar warganya adalah pertanian (38,08%). Ini artinya bahwa sebagian besar penduduknya tinggal di pedesaan (kelurahan) dan

atau dekat dengan pantai, karena pertanian yang dimaksud adalah pertanian dalam arti luas, tidak hanya berkebun semata, melainkan juga sebagai nelayan.

Tumbuh dan berkembangnya perekonomian Kota Tanjungpinang dan Bintan pada umumnya tidak lepas dari letak yang dekat dengan selat melaka; suatu selat yang dilayari oleh para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Singapura yang menjadi tempat bongkar dan muat barang dari berbagai penjuru dunia tadi, dengan demikian mempunyai peranan yang sangat berarti bagi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Kota Tanjungpinang.

Masyarakat Tanjungpinang di dalam berkehidupan ekonomi sebagian besar masih mengacu kepada sikap mental kebudayaan agraris dan bukan kebudayaan industri; terlebih para nelayannya mereka masih berpandangan bahwa masa lalu, kini dan yang akan datang adalah sama. Hal ini tercermin dari sikap dan tingkah laku mereka yang cenderung menghabiskan apa yang diperoleh hari ini, dengan perkataan lain, gaya hidup mereka cenderung konsumtif.

### **3.1.5 Sistem Transportasi**

Lancarnya arus transportasi baik laut maupun darat menyebabkan daerah Riau Kepulauan menjadi incaran para calon migran. Hal ini berimplikasi pada tingkat urbanisasi yang terus berlanjut dengan konsentrasi permukiman yang terus berkembang, dan akibatnya tingkat kepadatan penduduk pun terus semakin meningkat. Hal ini mulai dirasakan khususnya di daerah Pulau Bintan yang mengarah ke Timur dan Utara. Sementara di kawasan Kota Tanjungpinang problema permukiman kumuh sudah mulai tampak khususnya pada tempat rawa-rawa dan kawasan *mangrove*. Orang-orang Melayu, Bugis dan Jawa yang telah bermukim lebih dari 30 tahun menjual tanah dan rumahnya kepada pihak swasta membangun rumah toko dan perumahan lainnya serta tempat-tempat dengan kegiatan yang bernilai ekonomi tinggi. Penduduk tempatan membeli tanah di kawasan kampung-kampung yang berdekatan dengan perbatasan Kecamatan Bintan Timur. Secara perlahan lahan etnis melayu dari lapisan bawah terus bergerak dan semakin merangkak kedaerah pinggiran (*marjinal*).

### **3.1.6 Proses Urbanisasi**

Di Tanjungpinang atau Bintan umumnya tenaga Kerja perempuan maupun laki-laki kebanyakan hanya menamatkan Sekolah Dasar (SD). Keadaan ini menumbuhkan suatu persoalan utama bagi tenaga kerja setempat. Tidak heran jika berbagai usaha yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah daerah untuk menyokong supaya dapat berkiprah di daerahnya sendiri. Selama ini dipahami bahwa kekuasaan ada di tangan investor yang dekat dengan puncak kekuasaan maka isu yang dihembuskan ialah lowongan pekerjaan yang tersedia bagi penduduk setempat terbatas kepada pekerjaan kasar. Orang-orang Melayu tidak mampu bersanding dengan tenaga kerja pendatang karena kurang minat, tidak memiliki etos kerja serta pemalas (Ali, 1985; Alatas, 1988; Rab, 1990 dan Ahmad; 1997). Dalam perkembangannya, Tanjungpinang atau Pulau Bintan terus menjadi ajang perburuan bagi tenaga kerja pendatang.

## **3.2. Gambaran Umum Kelurahan Dompok**

### **3.2.1 Lokasi**

Secara umum, Kota Tanjungpinang terbagi menjadi 2 bagian berdasarkan aktivitas perkotaannya, yaitu terdiri dari:

1. Pusat kota yaitu Tanjungpinang
2. Pinggiran kota (*urban fringe*) yang terdiri dari pantai laut.

Kelurahan Dompok merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Bukit Bestari. Sebagai lokasi penelitian tesis, daerah ini termasuk ke dalam pinggiran kota dimana lokasinya mayoritas pantai dan laut. Oleh karena itu, daerah ini terkenal dengan permukiman nelayannya.

### **3.2.2 Kependudukan**

Suatu fenomena wilayah perkotaan yang umum terjadi adalah terlihat terjadinya peningkatan kepadatan penduduk yang semakin bertambah, sejalan bertambahnya jumlah kelahiran dan urbanisasi.

Jumlah penduduk Kelurahan Dompok di awal tahun 2003 berjumlah 1.553 jiwa dan terdiri dari 311 KK. Hal ini menggambarkan bahwa kelurahan ini tidak padat penduduk.

**TABEL III.3**  
**JUMLAH PENDUDUK KELURAHAN DOMPAK**  
**TAHUN 2003**

Kelurahan	WNI			WNA			Total (Jiwa)	Jumlah KK
	L	P	L+P	L	P	L+P		
Dompok	906	647	1.553	0	0	0	1.553	311

*Sumber : Dinas Kependudukan Kota Tanjungpinang Tahun 2003*

**Keterangan:**

Jumlah KK berdasarkan asumsi 1 KK = 5 orang

Sedangkan berdasarkan data BKKBN Kota Tanjungpinang tahun 2003, dari 311 KK yang ada, Kelurahan Dompok memiliki 147 KK yang dianggap sebagai keluarga miskin. Didasarkan pada alasan ekonomi, keluarga miskin di daerah ini terdiri dari kelompok pra sejahtera dan sejahtera satu.

### 3.2.3 Penggunaan Lahan

Kawasan subur adalah kawasan kota yang secara fungsional dan fisik berada dalam transisi dan didominasi oleh kegiatan non agraris . Hal ini berarti bahwa masih terdapat lahan agraris walaupun tidak lagi dominan. Secara logis kawasan pusat kota adalah kawasan non agraris penuh dan kawasan pinggiran kota masih didominasi oleh penggunaan lahan untuk agraris. (Adisetyawan, 1998).

Kelurahan Dompok sebagai daerah pinggiran kota, aktivitasnya juga di dominasi oleh kegiatan pertanian (perikanan tambak). Hal ini disebabkan karena letak wilayah yang berada di pinggir laut dimana lahannya didominasi oleh pantai dan laut.

Selain itu, daerah ini didominasi pula oleh permukiman nelayan, yang letaknya menyebar satu sama lain. Masing-masing permukiman nelayan tersebut membentuk koloni sendiri-sendiri sehingga menyebar ke dalam beberapa kampung, seperti kampung Tg. Siambang, Tg. Duku, Sekatap, Dompok Seberang,

Kampung Seberang, Kampung Dompok, Kampung Dompok Lama, Sungai Ungar, Kampung Pagi, dan Kampung Kelam pagi.



*Sumber : hasil pengamatan, 2005*

### **GAMBAR 3.1 GAMBARAN PERMUKIMAN NELAYAN DI KELURAHAN DOMPAK**

#### **3.2.4 Sektor Kegiatan Masyarakat**

Identifikasi sektor kegiatan masyarakat bersifat menguatkan pertimbangan proporsi lahan agraris. Karena karakteristik lokasi Kelurahan Dompok yang berada di pinggir laut, maka kegiatan utama masyarakatnya adalah nelayan ataupun pengelola tambak. Kegiatan melaut (mencari ikan) dijadikan sebagai mata pencaharian utama mereka. Hal ini sesuai dengan banyaknya (38,08%) jumlah lapangan usaha di bidang pertanian (perikanan) di Kota Tanjungpinang. Ini artinya bahwa sebagian besar penduduknya yang berada di pedesaan (kelurahan) dan atau dekat dengan pantai sebagai nelayan.

Berdasarkan hasil dari kuisioner dapat diketahui bahwa pendapatan pokok yang diperoleh masyarakat setempat dari hasil penangkapan ikan untuk tiap KK umumnya berkisar Rp. 200.000,00-Rp. 500.000,00/bulan dan Rp. 500.000,00-Rp. 1.000.000,00/perbulan. Pendapatan ini diperoleh masyarakat setempat tidak tetap tergantung pada musim dan tingkat kebutuhan konsumen akan ikan. Sehingga pendapatan penduduk Kelurahan Dompok sangat dipengaruhi oleh



musim (cuaca), karena hal ini sangat mempengaruhi kegiatan melaut para nelayan dan siklus perkembangbiakan ikan.

Mata pencaharian penduduk Kelurahan Dompok cenderung homogen dan memiliki corak perikanan. Hal ini mempengaruhi pola hidup dan karakteristik lingkungan tempat tinggal.

### **3.3. Karakteristik Keluarga Miskin di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok**

Karakteristik atau ciri keluarga miskin di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang akan dilihat dari berbagai aspek kehidupan sosialnya, yang diawali dengan data tentang jumlah keluarga miskin, kemudian diikuti data tentang lokasi tempat tinggal penduduk, kondisi lingkungan permukiman nelayan, pola hidup keluarga nelayan yang miskin, kondisi kesehatan serta sandang dan pangan keluarga miskin tersebut.

Berdasarkan data BKKBN Kota Tanjungpinang, maka diketahui jumlah keluarga miskin di permukiman nelayan Kelurahan Dompok dengan alasan ekonomis, kelompok pra sejahtera, dan sejahtera satu, adalah sebanyak 147 kepala keluarga. Penelitian ini mengambil sampel dari beberapa perkampungan nelayan, yaitu; Tg. Siambang, Tg. Duku, Sekatap, Dompok Seberang, Kampung Seberang, Kampung Dompok, Kampung Dompok Lama, Sungai Ungar, Kampung Pagi, Kampung Kalam pagi.

#### **3.3.1. Kondisi Tempat Tinggal Keluarga Miskin**

Formulasi ukuran jumlah dan lokasi tempat tinggal keluarga miskin dimaksud untuk memberikan cakupan dari berbagai aspek kehidupan yang ada disekitar keluarga miskin itu sendiri. Keluarga miskin di Kelurahan Dompok yang berjumlah 147 KK ini tidak terkonsentrasi pada satu daerah perkampungan saja, tetapi menyebar kedalam wilayah-wilayah perkampungan yang ada. Misalnya di Kampung Tg. Siambang dan Dompok Lama yang hampir seluruh wilayahnya terdapat kelompok keluarga miskin. Konsentrasi keluarga miskin terbesar untuk Kelurahan Dompok adalah terdapat di Kampung Tg. Siambang.



*Sumber : hasil pengamatan, 2005*

### **GAMBAR 3.2 KONDISI TEMPAT TINGGAL KELUARGA MISKIN**

Berdasarkan hasil observasi di wilayah studi, dapat diketahui bahwa mayoritas dinding bangunan rumah keluarga miskin dari 100 KK di Kelurahan Dompok adalah menggunakan bahan papan (85%) dan hanya 15% saja yang menggunakan bahan dari semen. Demikian juga halnya dengan lantai, sebagian besar rumahnya terbuat dari papan (70%), dan mereka sudah ada yang menggunakan bahan semen mencapai (25%). Artinya pada bangunan lantai masih belum seimbang antara bahan papan dengan semen.

Sedangkan pada bagian atapnya sebagian besar sudah menggunakan bahan dari seng/asbes (75%), meskipun masih dijumpai rumah yang atapnya terdiri dari bahan daun (25%). Hal ini berarti bangunan rumah bagian atas yang digunakan oleh keluarga miskin di Kelurahan Dompok bervariasi antara bahan daun dan seng/asbes, meskipun tidak seimbang/sama..

**TABEL III.4  
JENIS BANGUNAN RUMAH  
YANG DITEMPATI OLEH KELUARGA MISKIN  
DI KELURAHAN DOMPAK TAHUN 2004**

No.	Jenis Bahan	Bahan Bangunan					
		Dinding		Atap		Lantai	
		KK	%	KK	%	KK	%
1.	Daun	-	-	37	25	-	-
2.	Papan	125	85	-	-	103	70

Lanjutan

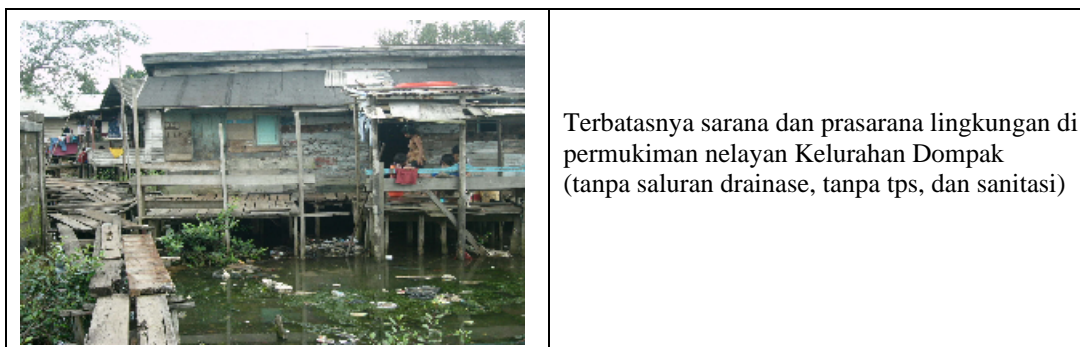
No.	Jenis Bahan	Bahan Bangunan					
		Dinding		Atap		Lantai	
		KK	%	KK	%	KK	%
3.	Semen	22	15	-	-	37	25
4.	Tanah	-	-	-	-	7	5
5.	Seng/Asbes	-	-	110	75	-	-
Jumlah		147	100	147	100	147	100

Sumber: Data olahan dari kuesioner kemiskinan di Kelurahan Dompok tahun 2004

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa mayoritas tempat tinggal penduduk Kelurahan Dompok bersifat non-permanen. Hal ini terlihat dari besarnya prosentase penggunaan papan sebagai bahan utama dinding dan lantai tempat tinggal mereka. Selain itu, terdapat pula penggunaan daun sebagai atap rumah.

### 3.3.2. Kondisi Lingkungan Permukiman Nelayan

Permukiman Nelayan di Kelurahan Dompok juga minim infrastruktur. Hal ini menyebabkan akses penduduk dalam penggunaan sarana dan prasarana umum terbatas. Di Kelurahan Dompok tidak terdapat prasarana penunjang permukiman seperti prasarana sanitasi (MCK), tempat pembuangan sampah sementara maupun drainase. Adapun ketidakadaan saluran drainase disebabkan karena kecenderungan masyarakat membangun rumahnya di atas air dan berbentuk rumah panggung (bahan kayu). Sehingga system pembuangan langsung ke bawah (pinggiran laut).



Sumber: hasil pengamatan, 2006

**GAMBAR 3.3**  
**KONDISI LINGKUNGAN PERMUKIMAN NELAYAN**

Keadaan ini jelas mempengaruhi kondisi lingkungan sekitar tempat tinggal penduduk. Selain karena tempat tinggal yang mayoritas non-permanen dan terbatasnya infrastruktur penunjang, buruknya kondisi lingkungan di daerah ini juga di pengaruhi oleh kesadaran masyarakat akan pemeliharaan lingkungan yang masih sangat rendah karena masyarakat di daerah ini sudah merasa nyaman dengan kondisi seperti ini dan mereka tidak mempermasalahkannya.

### 3.3.3. Kondisi Kesehatan Keluarga Miskin

Masalah kesehatan merupakan salah satu aspek yang serius dari keluarga miskin sehingga mereka terus berada dalam lingkaran kemiskinan. Ketidakmampuan masyarakat untuk mendapatkan fasilitas kesehatan serta lingkungan yang buruk menyebabkan tingkat kesehatan keluarga miskin rendah.

Untuk mengetahui kondisi kesehatan keluarga miskin di Kelurahan Dompok, digunakan indikasi jumlah dan jenis penyakit yang sering di deritan oleh keluarga miskin serta tempat mereka berobat.

**TABEL III.5**  
**JUMLAH KELUARGA MISKIN DI PERMUKIMAN NELAYAN**  
**KELURAHAN DOMPAK**  
**MENURUT JENIS PENYAKIT YANG SERING DIDERITA**  
**TAHUN 2004**

NO.	JENIS PENYAKIT	JUMLAH	PROSENTASE
			(%)
1	Malaria	10	10
2	Demam Berdarah	0	0
3	Paru-paru	10	10
4	Demam Biasa	30	30
5	Diare	10	10
6	Gigi dan Lainnya	40	40
Jumlah		100	100

*Sumber: Diolah dari kuesioner kemiskinan di Kelurahan Dompok Tahun 2004*

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa jenis penyakit yang sering diderita oleh keluarga miskin adalah; penyakit gigi dan demam. Banyaknya keluarga miskin yang menderita penyakit gigi, mengindikasikan bahwa mereka

tidak rajin membersihkan diri, terutama untuk menggosok gigi ketika mandi. Kurangnya kesadaran untuk menggosok gigi mungkin dikarenakan oleh tiadanya biaya untuk membeli pasta gigi serta sikat gigi. Disamping penyakit gigi, penyakit lain yang sering diderita oleh keluarga miskin adalah demam, hal ini disebabkan oleh kurangnya masyarakat setempat untuk membiasakan hidup yang bersih. Sehingga tempat yang tidak bersih (kumuh) tersebut menjadi tempat berkembang biaknya penyakit.

Selain itu, adanya indikasi penyakit diare juga menggambarkan bahwa lingkungan tempat tinggal masyarakat Kelurahan Dompok serta makanan yang mereka makan kurang memenuhi standar hidup sehat. Hal ini dapat disebabkan karena minimnya pendapatan para nelayan di Kelurahan Dompok.

Masyarakat Kelurahan Dompok biasanya berobat di Puskesmas ataupun pengobatan alternatif (di luar dokter) atau bahkan tidak dipedulikan penyakitnya. Hal ini disebabkan ketidakmampuan mereka membayar ongkos pengobatan yang saat ini tidak murah.

#### **3.3.4. Pendidikan Masyarakat Kelurahan Dompok**

Kondisi pendidikan masyarakat di Kelurahan Dompok masih sangat memprihatinkan karena banyak masyarakat yang belum/tidak memperoleh pendidikan. Walaupun ada sebagian masyarakat yang mendapat pendidikan namun tingkat pendidikan umumnya hanyalah SD. Sedikit sekali jumlah masyarakat yang dapat memperoleh pendidikan hingga ke tingkat SLTP.

Selain itu, fasilitas pendidikan yang tersedia di permukiman nelayan di Kelurahan Dompok hanyalah 1 SD. Lokasi permukiman tersebut cukup jauh dari SLTP.

#### **3.3.5. Kondisi Sandang dan Pangan Keluarga Miskin**

Kondisi yang disajikan ini meliputi keadaan riil tempat keluarga (rumah) keluarga miskin, kemampuan membeli/memiliki pakaian baru bagi anggota keluarga miskin dan kebiasaan makan yang setiap harinya. Hal ini perlu diketahui

karena dapat dijadikan sebagai tolok ukur (indikator) tingkat kesejahteraan suatu keluarga.

Berdasarkan hasil observasi, penduduk Kelurahan Dompok secara ekonomi menggambarkan bahwa hasil yang didapatkan dari pekerjaan sehari-hari (80%) dihabiskan guna membeli kebutuhan makanan dan minuman. Hal ini karena minimnya pendapatan mereka. Sehingga uang yang mereka miliki hanya dapat digunakan untuk mengakses kebutuhan pangan saja. Namun, umumnya penduduk Kelurahan Dompok memiliki sarana telekomunikasi seperti radio/TV. Penduduk Kelurahan Dompok menganggap kebutuhan akan sarana telekomunikasi lebih penting dibandingkan dengan memenuhi kebutuhan sandang. Namun, sisi positifnya adalah walaupun pendapatan mereka rendah, tetapi akses mendapatkan informasi global tidak terhambat.

## **BAB IV**

### **ANALISIS POLA KEMISKINAN DI PERMUKIMAN NELAYAN KELURAHAN DOMPAK KOTA TANJUNGPINANG**

Analisis pola kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang didahului dengan mengetahui kondisi fisik kawasan permukiman nelayan dan karakteristik masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang. Kemudian dilakukan analisis, yang terdiri dari analisis indikasi kemiskinan di permukiman nelayan, analisis pola kemiskinan di permukiman nelayan dan analisis faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan di Kelurahan Dompok, Kota Tanjungpinang. Uraianya adalah sebagai berikut.

#### **4.1 Analisis Karakteristik Masyarakat di Permukiman Nelayan**

Analisis ini berfungsi untuk mengetahui seutuhnya bagaimana kondisi masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang. Analisis ini terbagi atas karakteristik ekonomi nelayan, karakteristik sosial budaya masyarakat nelayan dan karakteristik kehidupan berpolitik masyarakat nelayan di Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang.

##### **4.1.1 Analisis Karakteristik Ekonomi Nelayan**

Karakteristik ekonomi masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok dapat dirumuskan dengan menggambarkan mata pencaharian mayoritas penduduk dan tingkat pendapatan penduduk per bulan.

###### **a. Mata Pencaharian Penduduk**

Kegiatan utama masyarakat Kelurahan Dompok adalah melaut (menangkap ikan). Sehingga mayoritas mata pencaharian penduduknya sebagai nelayan. Kegiatan melaut (mencari ikan) dijadikan sebagai mata pencaharian utama mereka. Hal ini sesuai dengan banyaknya (38,08%) jumlah lapangan usaha di bidang pertanian (perikanan) di Kota

Tanjungpinang (lihat bab 3: 47). Selain itu, berdasarkan hasil kuesioner, dari 40 responden yang dikunjungi, 37 orang diantaranya merupakan nelayan.

**TABEL IV.1**  
**MATA PENCAHARIAN UTAMA PENDUDUK KELURAHAN**  
**DOMPAK BERDASARKAN HASIL KUESIONER**

Pekerjaan Utama KK							Jumlah
PNS/ TNI	Karyawan Perusahaan/ Swasta	Buruh Industri/ Bangunan	Pedagang	Wiraswasta	Tidak bekerja/ pensiunan	Lain-lain (Nelayan)	
0	3	0	0	0	0	37	40

*Sumber: Hasil Kuesioner, 2004*

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa 20 dari 40 responden menyatakan mereka tidak hanya menjadi nelayan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Hal ini dikarenakan sebagian dari responden tersebut masih merasa kekurangan atas pendapatan yang mereka hasilkan dari melaut (nelayan). Oleh karena itu, selain bekerja sebagai nelayan, beberapa masyarakat yang terdapat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok memiliki pekerjaan sampingan seperti berkebun, pedagang, buruh kasar, budidaya ikan dan nambang pompong. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel IV.4.

**TABEL IV.2**  
**PEKERJAAN SAMPINGAN PENDUDUK KELURAHAN DOMPAK**  
**BERDASARKAN HASIL KUESIONER**

Jenis Pekerjaan Sampingan	Jumlah KK	Prosentase
Buruh Pelabuhan	5	25%
Pedagang	4	20%
Guru TPA	1	5%
Nambang Pompong	4	20%
Pencari Kayu	2	10%
Ojek	1	5%



Lanjutan

Jenis Pekerjaan Sampingan	Jumlah KK	Prosentase
Restoran	1	5%
Beternak Ikan	2	10%
<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>

Sumber: Hasil Kuesioner, 2004

*b. Tingkat Pendapatan Penduduk*

Kriteria utama yang paling berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung di dalam menentukan kemiskinan adalah pendapatan. Masyarakat dikatakan miskin bila mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan baik berupa barang-barang maupun pelayanan akibat perolehan pendapatan yang tidak sesuai.

**TABEL IV. 3**  
**PENDAPATAN PER BULAN MASYARAKAT DI**  
**KELURAHAN DOMPAK**  
**BERDASARKAN HASIL KUESIONER (RP 000)**

< 200	200-500	500-1000	1000-2000	2000-5000	>5000
0	27	13	0	0	0

Sumber: Hasil Kuesioner, 2004

Berdasarkan hasil dari kuesioner dapat diketahui bahwa pendapatan pokok yang diperoleh masyarakat setempat dari hasil penangkapan ikan untuk tiap KK umumnya berkisar Rp. 200.000,00-Rp. 500.000,00/bulan dan Rp. 500.000,00-Rp. 1.000.000,00/perbulan. Adapun sifat dari pendapatan adalah tidak tetap, karena penghasilan yang diperoleh masyarakat setempat bergantung pada musim, cuaca dan tingkat kebutuhan konsumen akan ikan. Hal ini disebabkan siklus perkembangbiakan ikan berbeda-beda. Sehingga tak jarang pada musim-musim tertentu mereka tidak memperoleh ikan. Begitu juga dengan iklim di laut yang tidak menentu. Nelayan yang terdapat di Kelurahan Dompok, memiliki jangka waktu melaut hanya sekitar 8 bulan dalam satu tahun. Adapun 4 bulan sisanya, para nelayan tidak melaut karena kondisi cuaca yang tidak kondusif

(siklus musim per tahun). Ketika masyarakat tidak melaut maka mereka tidak mendapatkan penghasilan, kecuali memiliki kerja sampingan. Sehingga, pendapatan nelayan per bulan yang tidak terlalu besar pun menjadi bertambah buruk karena sifatnya tidak tetap setiap bulan. Dan hal ini menyebabkan banyak keluarga nelayan berada pada garis kemiskinan.

**TABEL IV. 4**  
**PENGHASILAN DARI PENANGKAPAN IKAN (RIBU/HARI)**  
**BERDASARKAN HASIL KUESIONER**

50	100	100-150	150-200	< 50
21	0	0	0	19

*Sumber: Hasil Kuesioner, 2004*

Pendapatan pokok nelayan yang tidak tetap tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Banyak masyarakat setempat yang mencari usaha sampingan seperti menjadi pedagang, ambil kayu di hutan, bekerja di restoran, menjadi guru, dan lain-lain. Pendapatan yang diperoleh dari usaha sampingan ini berkisar Rp. 400.000,00-Rp. 500.000,00/bulan. Dari usaha sampingan inilah mereka berusaha agar dapat memenuhi kebutuhannya.

#### **4.1.2 Analisis Karakteristik Sosial Budaya Masyarakat Nelayan**

Karakteristik sosial budaya masyarakat nelayan di Kelurahan Dompok dapat diketahui dengan melihat tingkat pendidikan masyarakat, pola hidup masyarakat dan tingkat kesehatan masyarakatnya.

##### **a. Tingkat Pendidikan Masyarakat**

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan pola kemiskinan adalah tingkat pendidikan masyarakat di permukiman tersebut. Berdasarkan hasil kuesioner, tingkat pendidikan masyarakat masih rendah karena masih banyak masyarakat yang belum/tidak memperoleh pendidikan. Walaupun ada sebagian masyarakat yang mendapat pendidikan namun tingkat pendidikan umumnya hanyalah SD/ sederajat. Sedikit sekali jumlah masyarakat yang dapat memperoleh

pendidikan hingga ke tingkat SLTP. Berikut ini gambaran tingkat pendidikan masyarakat nelayan berdasarkan hasil kuesioner di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang.

**TABEL IV. 5**  
**PENDIDIKAN TERAKHIR KEPALA KELUARGA (KK)**  
**BERDASARKAN HASIL KUESIONER**

Pendidikan Terakhir KK							Jumlah
Tdk Sekolah	Tamat SD	Tamat SLTP	Tamat SLTA	Tamat D3	Tamat S1	Tamat S2/S3	
27	12	1	0	0	0	0	40

Sumber: Hasil Kuesioner, 2004

Berdasarkan tabel (tabel IV.6 dan tabel IV.7),  $\pm 70\%$  masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok tidak berpendidikan, dan 25% berpendidikan terakhir SD. Sehingga, masyarakat yang berpendidikan > SD hanya sekitar 5%. Bahkan untuk memenuhi standar wajib belajar 9 tahun pun belum dapat. Hal ini menggambarkan rendahnya tingkat pendidikan di permukiman nelayan ini.

**TABEL IV. 6**  
**PENDIDIKAN TERAKHIR ANGGOTA KELUARGA**  
**BERDASARKAN HASIL KUESIONER**

Anggota Keluarga	Pendidikan Terakhir Anggota Keluarga							Jumlah
	Tidak Sekolah	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2/S3	
Isteri	18	4	4	-	-	-	-	26
Anak I	16	11	3	2	-	-	-	32
Anak II	-	-	1	-	-	-	-	1
Saudara	-	1	-	-	-	-	-	1
Pembantu	-	-	-	-	-	-	-	0
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	0
<b>Jumlah</b>	<b>34</b>	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>

Sumber: Hasil Kuesioner, 2004

Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat, tingkat pendidikan penduduk yang rendah di permukiman nelayan Kelurahan Dompok disebabkan oleh 3 (dua) hal, yaitu:

- **Besarnya biaya perolehan pendidikan**

Besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendidikan bila dibandingkan antara pendapatan yang diperoleh nelayan sehari-sehari menyebabkan mereka enggan bersekolah.

- **Fasilitas pendidikan yang terbatas**

Fasilitas pendidikan yang terdapat di Kelurahan Dompok hanyalah 1 SD. Lokasi permukiman tersebut cukup jauh dari SLTP. Kondisi ini menyebabkan kesempatan masyarakat untuk memperoleh pendidikan semakin kecil karena terbatasnya fasilitas pendidikan yang ada dan tingginya biaya pendidikan bagi mereka. Selain itu, kondisi ini menimbulkan kesulitan bagi masyarakat nelayan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Walaupun kendala yang dihadapi masyarakat setempat adalah kesulitan bagi mereka untuk memperoleh pendidikan ataupun meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, namun masyarakat setempat tidak sulit dalam memperoleh informasi global. Hal ini disebabkan karena pada umumnya masyarakat setempat memiliki TV dan radio. Sehingga, bagi mereka yang ingin mengakses informasi maka dapat diperoleh melalui acara yang ditayangkan di dalam radio dan TV.

- **Tidak ada keinginan untuk berubah**

Masyarakat merasa bahwa nelayan merupakan pekerjaan turun-temurun dan keahlian melaut merupakan warisan nenek moyang. Sehingga mereka enggan untuk beralih mata pencaharian.

**b. *Tingkat Kesehatan***

Salah satu faktor yang menjadi akibat dari adanya kemiskinan adalah faktor kesehatan. Tingkat kesehatan keluarga miskin yang rendah dapat menyebabkan kurangnya produktivitas kerja, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan keluarga. Tingkat kesehatan masyarakat juga

mempunyai hubungan yang signifikan dengan pekerjaan yang dilakukan disamping rendahnya mutu kesehatan keluarga miskin, sehingga menyebabkan banyak keuangan yang harus dikeluarkan guna berobat.

**TABEL IV.7**  
**JUMLAH KELUARGA MISKIN**  
**DI PERMUKIMAN NELAYAN KELURAHAN DOMPAK**  
**MENURUT JENIS PENYAKIT YANG SERING DIDERITA**  
**TAHUN 2004**

NO.	JENIS PENYAKIT	JUMLAH	PROSENTASE (%)
1	Malaria	4	10
2	Demam Berdarah	0	0
3	Paru-paru	4	10
4	Demam Biasa	12	30
5	Diare	8	20
6	Gigi dan Lainnya	12	30
Jumlah		40	100

*Sumber: Diolah dari kuesioner kemiskinan di Kelurahan Dompok Tahun 2004*

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kependudukan, masyarakat seringkali menderita penyakit seperti sakit gigi, demam dan diare. Hal ini disebabkan oleh lingkungan permukiman yang buruk seperti tidak memiliki tempat pembuangan sampah sendiri. Sehingga biasanya mereka membuang sampah ke sungai, pantai dan semak-semak. Selain itu, banyaknya penyakit yang diderita masyarakat setempat dapat menjadi indikator bahwa tempat tinggal mereka tidak bersih. Tempat yang tidak bersih (kumuh) tersebut menjadi tempat berkembang biaknya penyakit. Ketidakpedulian masyarakat Kelurahan Dompok akan kebersihan lingkungan menyebabkan timbulnya bibit-bibit penyakit sebagai vektor dari penyakit tertentu. Kondisi ini dapat menimbulkan epidemi penyakit. Selain itu, masyarakat Kelurahan Dompok tidak memiliki pendapatan yang tetap dan mencukupi. Pendapatan per bulan dari para nelayan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Hal ini menyebabkan masyarakat cenderung berobat dengan mengkonsumsi obat P3K, pengobatan

alternatif, atau bahkan dibiarkan saja (tidak diobati). Selain itu, tidak terdapat fasilitas kesehatan di Kelurahan Dompok. Adapun letak fasilitas kesehatan, yaitu puskesmas terdapat di ibukota Kecamatan Bukit Bestari.

*c. Pola Hidup Masyarakat Nelayan*

Pola hidup masyarakat Kelurahan Dompok sangat dipengaruhi oleh kehidupan mereka sebagai masyarakat nelayan. Karena pengaruh tersebut masyarakat Kelurahan Dompok lebih cenderung untuk bertempat tinggal di daerah yang berdekatan dengan laut.

Adapun persepsi masyarakat terhadap lingkungan yang kotor adalah hal tersebut merupakan suatu fenomena lingkungan yang biasa, tidak bermasalah dan tidak mengganggu. Mereka menganggap bahwa lingkungan yang kurang bersih tersebut merupakan hal yang biasa dan kehidupan mereka tidak akan terganggu oleh keadaan lingkungan seperti itu. Mereka tidak mempersoalkan lingkungan mereka karena mereka beranggapan bahwa kalau lingkungan mereka dibersihkanpun nantinya juga akan kembali seperti itu lagi. Sehingga mereka menganggap bahwa perhatian terhadap kebersihan lingkungan merupakan hal yang percuma.

Selain itu, masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok mayoritas memiliki jumlah anggota keluarga lebih dari 1 KK dalam satu rumah. Keinginan mereka untuk hidup di dekat laut menyebabkan masyarakat rela 'berdesakan' di dalam rumah. Hal ini diperparah dengan rata-rata 1 KK terdiri dari 5-6 anggota keluarga.



*Sumber: hasil pengamatan, 2005*

**GAMBAR 4.1**  
**POLA HIDUP MASYARAKAT NELAYAN**

### 4.1.3 Analisis Karakteristik Kehidupan Politik Masyarakat

Kehidupan berpolitik masyarakat di permukiman nelayan dapat diketahui dengan melihat keterlibatan masyarakat dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan status kepemilikan tanah.

#### *a. Keterlibatan Masyarakat Dalam Berbagai Organisasi*

##### *Kemasyarakatan*

Keberadaan organisasi kemasyarakatan sangat penting terutama di dalam pembangunan. Melalui organisasi kemasyarakatan ini masyarakat dapat berpartisipasi aktif untuk membangun dan mengembangkan wilayahnya. Ada tiga jenis organisasi kemasyarakatan yang aktif di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok, yakni: RT (rukun tetangga), RW (Rukun Warga) dan PKK. Berdasarkan hasil kuesioner dari 40 KK, masyarakat yang berpartisipasi di dalam organisasi tersebut bervariasi. Masyarakat yang aktif di RT berjumlah 21 jiwa, masyarakat yang aktif di RW adalah 42 jiwa sedangkan di PKK berjumlah 40 jiwa. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok berpartisipasi secara aktif di dalam kegiatan organisasi. Hal ini terlihat dari masyarakat yang memiliki keanggotaan ganda dengan mengikuti 2 atau lebih kegiatan organisasi. Hal ini menggambarkan bahwa walaupun masyarakat setempat mayoritas keluarga miskin, namun kebebasan mereka dalam berpartisipasi tidak terhambat. Sehingga masyarakat setempat memiliki peluang besar dalam kegiatan pembangunan yang partisipatif.

#### *b. Status Kepemilikan Tanah*

Tidak adanya kepemilikan hak atas tanah dan kondisi sarana-prasarana yang sangat minim membuat sebagian kawasan tersebut dapat dikategorikan dalam keadaan miskin.

Perumahan yang terdapat di daerah tersebut pada umumnya dihuni atas nama pribadi. Kondisi ini berbanding terbalik dengan hak kepemilikan atas tanah. Sedikit sekali masyarakat setempat yang memiliki tanah sendiri. Status atas tanah yang mereka huni tersebut bervariasi. Ada tanah

atas nama orang tua, tanah garapan maupun tanah yang mereka pinjam dengan sistem sewa. Selain itu, adapula masyarakat yang tinggal pada tanah yang tidak mereka ketahui kepemilikannya/tidak jelas statusnya.

**TABEL IV. 8**  
**STATUS KEPEMILIKAN TANAH RUMAH DI KELURAHAN DOMPAK**  
**BERDASARKAN HASIL KUESIONER**

Status Kepemilikan Tanah Rumah	Jumlah KK
Hak Milik	1
Hak Pakai	1
Surat Atas Hak	6
Tanah Orang Tua	1
Surat Bebas	1
<b>Tidak Ada Surat</b>	6
Garapan	8
Pinjam	1
<b>Jumlah</b>	25

*Sumber: Hasil Kuesioner, 2004*

#### **4.2 Analisis Kondisi Fisik Kawasan Permukiman Nelayan di Kelurahan Dompok**

Kondisi fisik kawasan permukiman nelayan Kelurahan Dompok dapat dilihat dari karakteristik tempat tinggal nelayan dan kondisi fisik sarana dan prasarana penunjang permukiman. Dengan ini dapat diketahui gambaran lingkungan fisik permukiman nelayan di Kelurahan Dompok, Kota Tanjungpinang.

##### **4.2.1 Analisis Kondisi Fisik Tempat Tinggal Nelayan**

Kondisi fisik tempat tinggal nelayan dapat diketahui dengan mengamati kondisi rumah (luas rata-rata rumah dan perkarangan) dari penduduk dan tingkat kepadatan bangunan di lingkungan rumah.

###### **a. Kondisi Rumah**

Berdasarkan hasil survei dapat diketahui bahwa karakteristik permukiman masyarakat setempat pada umumnya berada dalam keadaan tidak



beraturan. Luas tanah yang masyarakat tempati juga bervariasi. Ada yang memiliki luas berkisar 1600-7000m<sup>2</sup>, 100-600m<sup>2</sup> dan dibawah 100m<sup>2</sup>. Namun, luas rata-rata rumah adalah 100 m<sup>2</sup> (10 m x 10 m). Kondisi di atas memperlihatkan bahwa di masyarakat permukiman nelayan di Kelurahan Dompok memiliki tingkat ekonomi yang bervariasi, namun mayoritas berada pada kondisi kekurangan.

Adapun bahan dasar dinding rumah-rumah di kawasan tersebut didominasi oleh bahan dasar kayu. Selain kayu, ada juga rumah yang terbuat dari kayu yang diselengi dengan batu bata, batu bata, seng bekas dan daun pandan. Sebagian besar perumahan yang terdapat di kawasan permukiman ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sebagian besar bahan dasar lantai rumah masyarakat juga terbuat dari kayu/papan. Bahan lainnya adalah tanah, perkerasan semen, dan keramik.



*Sumber: hasil pengamatan, 2005*

#### **GAMBAR 4.2 KONDISI RUMAH NELAYAN**

Selain itu, rata-rata rumah masyarakat di permukiman nelayan tidak memiliki pekarangan yang luas. Mayoritas perbandingan luas tanah dan luas bangunan rumah adalah 60:40. Hal ini disebabkan rumah masyarakat yang berbentuk panggung dan dibangun di atas air (tepi laut) sehingga lahan mereka terbatas.

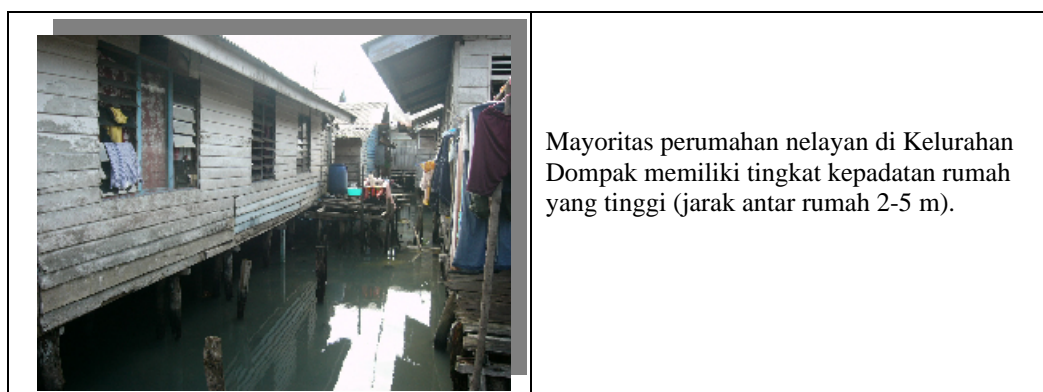
**TABEL IV.9**  
**PERBANDINGAN LUAS BANGUNAN**  
**DAN LUAS TANAH YANG DITEMPATI**  
**DI KELURAHAN DOMPAK**

Perbandingan (%)					
>90	90-80	80-70	70-60	60-50	<50
3	14		3	16	4

*Sumber: Hasil Kuesioner, 2004*

**b. Kepadatan rumah**

Tingkat kepadatan di lingkungan perumahan tersebut bervariasi. Ada kawasan di permukiman ini yang termasuk padat. Hal tersebut dapat diketahui dari keterangan responden dan jarak antar rumah yang cukup dekat yaitu 2-5 meter. Tetapi ada juga bagian dari kawasan yang memiliki tingkat kepadatan rendah. Hal tersebut dapat diketahui dari jarak antar rumah yang cukup jauh yakni berkisar 50-100 meter dan 100-150 meter. Di dalam permukiman nelayan Kelurahan Dompok, rumah dengan bahan dasar dinding dan lantai yang terbuat dari papan, memiliki tingkat kepadatan yang tinggi.



*Sumber: hasil pengamatan, 2005*

**GAMBAR 4.3**  
**KEPADATAN RUMAH**

#### 4.2.2 Kondisi Fisik Sarana dan Prasarana Penunjang Permukiman

Dilihat dari kondisi sarana-prasarana yang tersedia maka dapat diketahui bahwa sarana-prasarana yang tersedia belum mencukupi kebutuhan masyarakat setempat.

- Sumber Air Bersih

Pada umumnya (80%) sumber air bersih yang diperoleh masyarakat berasal dari sumur dangkal yang diperoleh dari sumur umum. Hanya sedikit masyarakat setempat yang memiliki sumur sendiri.

**TABEL IV.10**  
**PENGUNAAN SUMBER AIR BERSIH MENURUT RESPONDEN**  
**DI KELURAHAN DOMPAK**

PDAM	Sumur timba	Pompa	Kran umum	Sumur umum	Sumber lainnya
0	8	0	0	32	0

*Sumber: Hasil Kuesioner, 2004*

- Saluran Drainase dan Sanitasi

Sistem pembuangan air kotor masyarakat setempat adalah sungai. Hanya sedikit masyarakat yang membuat parit sendiri untuk menyalurkan air kotor hasil pembuangan limbah rumah tangganya. Di sisi lain, masyarakat tidak memiliki saluran drainase dan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya kebersihan juga cukup rendah. Sedangkan fasilitas MCK (mandi, cuci, dan kakus) sebagian besar sudah memenuhi kebutuhan.

- Tempat Pembuangan Sampah (akumulatif)

Kebiasaan masyarakat nelayan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok membuang sampah pada sungai, pantai dan semak-semak menyebabkan tidak ada satupun dari mereka yang memiliki tempat pembuangan sampah sendiri. Hal ini menyebabkan kualitas lingkungan di sekitar permukiman nelayan Kelurahan Dompok tidak baik dan dapat berakibat pada buruknya tingkat kesehatan penduduk Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang.

- Jaringan Jalan

Adapun prasarana jalan yang terdapat di Kelurahan Dompok sebagian besar terbuat dari tanah. Sedangkan untuk prasarana listrik, dilihat dari alat penerangan yang tersedia, sebagian besar masyarakat nelayan ini menggunakan mesin diesel sendiri dan sisanya masyarakat mempergunakan lampu minyak. Masyarakat di permukiman nelayan ini belum banyak menggunakan listrik sebagai alat penerangan mengingat tingginya tarif dasar listrik.



*Sumber: hasil pengamatan, 2005*

**GAMBAR 4.4**  
**KONDISI JALAN DI PERMUKIMAN NELAYAN**

#### **4.3 Analisis Indikasi Kemiskinan di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok**

Sesuai dengan uraian sebelumnya, maka untuk mengetahui apakah masyarakat di permukiman nelayan dapat dikategorikan kepada masyarakat miskin maka perlu dilakukan analisis dengan membandingkan antara karakteristik masyarakat setempat terhadap teori kemiskinan. Sehingga didapat karakteristik kemiskinan yang terdapat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok, Kota Tanjungpinang. Menurut BAPPENAS, terdapat 12 indikator utama dari kemiskinan yaitu (a) terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, (b) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, (c) terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, (d) terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, (e) terbatasnya akses layanan perumahan dan sanitasi, (f) Terbatasnya

akses terhadap air bersih, (g) lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, (h) memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam, (i) lemahnya jaminan rasa aman, (j) lemahnya partisipasi, (k) Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga, dan (l) tata kelola pemerintahan yang buruk.

Namun, fenomena kemiskinan yang terdapat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok, hanya didasarkan pada beberapa indikator. Adapun penjelasannya dapat dilihat dalam tabel IV.11.

**TABEL IV.11**  
**KARAKTERISTIK KEMISKINAN DI PERMUKIMAN NELAYAN**  
**KELURAHAN DOMPAK**  
**BERDASARKAN INDIKATOR KEMISKINAN**

INDIKASI KEMISKINAN	ANALISIS	KESIMPULAN
Kecukupan dan mutu pangan	Pemenuhan kebutuhan sandang dan pangan masyarakat di Kelurahan Dompok cukup. Hal ini karena pendapatan sehari-hari nelayan dipusatkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut walaupun dengan kualitas yang rendah. Tetapi bagi lauk-pauk, penyediaannya tidak menjadi masalah karena ikan dapat diperoleh dengan mudah dengan kualitas yang cukup baik.	Cukup (tidak kekurangan) karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kebutuhan pangan terpenuhi</li> <li>▪ Menu makanan standar, tidak 'empat sehat lima sempurna' (protein lebih banyak dari vitamin)</li> </ul>
Akses dan mutu layanan kesehatan	Mahalnya biaya pengobatan menyebabkan masyarakat nelayan di Kelurahan Dompok jarang berobat ke dokter atau Puskesmas. Tingkat kesadaran masyarakat akan kesehatan juga rendah. Hal ini didukung dengan tidak adanya fasilitas kesehatan di Kelurahan Dompok.	Tingkat kesehatan masyarakat nelayan rendah, dengan parameter: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Frekuensi masyarakat berobat jarang</li> <li>▪ Tidak adanya fasilitas kesehatan di Kelurahan Dompok</li> <li>▪ Kesadaran pentingnya kesehatan rendah</li> <li>▪ Banyaknya jumlah masyarakat yang menderita penyakit demam, diare dan gigi.</li> </ul>
Akses dan mutu layanan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat pendidikan masyarakat 60-70% tidak sekolah, dan 25% berpendidikan terakhir SD.</li> <li>▪ Sarana pendidikan yang tersedia di kawasan permukiman hanya 1 SD. Pada SD ini, fasilitas pendidikannya juga sangat terbatas. Hal tersebut disebabkan minimnya alokasi dana pendidikan bagi SD tersebut.</li> </ul>	Miskin ilmu pengetahuan (minim informasi) dengan parameter: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hanya terdapat 1 SD</li> <li>▪ Mayoritas masyarakat pendidikannya hanya lulusan SD/SLTP</li> </ul>

Lanjutan

INDIKASI KEMISKINAN	ANALISIS	KESIMPULAN
	Masyarakat setempat juga tidak dapat membantu karena kemampuan finansial mereka yang rendah.	
Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha	Pada umumnya masyarakat setempat hanya memiliki keahlian dalam menangkap hasil laut. Keahlian yang menjadi modal utama sebagai nelayan ini diperoleh secara turun-temurun. Minimnya kemampuan dan keahlian ( <i>skill</i> ) selain menangkap hasil laut ini memperkecil kesempatan kerja di sektor lain	Miskin Keahlian, karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Mata pencaharian homogen (mayoritas nelayan)</li> <li>▪ Tidak memiliki keahlian tambahan</li> <li>▪ Pendidikan rendah</li> </ul>
Terbatasnya akses dan penyediaan layanan perumahan dan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Perumahan mayoritas non-permanen, bahan yang digunakan adalah kayu/papan.</li> <li>▪ Ketersediaan fasilitas sanitasi bagi masyarakat setempat di permukiman tersebut masih sangat rendah. Rendahnya ketersediaan fasilitas tersebut terlihat dari jumlah fasilitas MCK yang tidak dimiliki setiap rumah. Masyarakat setempat juga masih belum memiliki perumahan dan lingkungan yang sehat dan layak. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya saluran drainase dan tempat pembuangan sampah, serta sistem pembuangan air kotor..</li> </ul>	Minim sarana dan prasarana lingkungan permukiman <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada TPS</li> <li>▪ Jumlah MCK minim</li> <li>▪ Tidak ada saluran drainase (air tergenang)</li> <li>▪ Mayoritas rumah terbuat dari kayu</li> </ul>
Terbatasnya akses terhadap air bersih	Dilihat dari akses terhadap air bersih, permukiman nelayan memiliki pelayanan sumber air yang terbatas. Masyarakat setempat hanya menggunakan sumur dangkal yang sebagian besar merupakan milik umum.	Miskin air bersih, karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada pelayanan PDAM</li> <li>▪ 80% masyarakat menggunakan sumur dangkal bersama-sama untuk mendapatkan air bersih</li> </ul>
Memburuknya kondisi lingkungan hidup dan sumberdaya alam, serta terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya alam	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Masyarakat setempat sering membuang limbah rumah tangganya ke sungai atau semak-semak. Hal ini dapat merusak ekosistem yang terdapat di pinggir laut/pantai</li> <li>▪ Akses pemanfaatan sumber daya alam terutama SDA laut cukup baik. Hal tersebut disebabkan lokasi tempat tinggal yang berdekatan dengan laut. Namun kemudahan ini tidak dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik karena keterbatasan sarana-prasana serta rendahnya kualitas SDA masyarakat setempat.</li> </ul>	Minim pengelolaan SDA, karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kurangnya perhatian terhadap lingkungan</li> <li>▪ Jenis sumberdaya alam yang dimanfaatkan tidak berkembang</li> <li>▪ Kurangnya pengetahuan mengenai pengolahan hasil perikanan</li> </ul>
Lemahnya jaminan rasa aman;	Jaminan rasa aman bagi masyarakat setempat yang tinggal di permukiman tersebut hampir dapat dikatakan rendah.	Miskin keamanan, karena: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tidak ada jaminan kepemilikan tanah</li> </ul>

Lanjutan

INDIKASI KEMISKINAN	ANALISIS	KESIMPULAN
	Hal tersebut disebabkan kondisi hidup yang serba minim. Hal ini menyebabkan orang yang berkuasa dapat semena-mena terhadap mereka.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kondisi hidup serba kekurangan</li> </ul>
Besarnya beban kependudukan yang disebabkan oleh besarnya tanggungan keluarga	Tiap-tiap keluarga pada masyarakat ini rata-rata memiliki 3-4 orang anak. Pada tiap keluarga ini yang bekerja hanyalah suami sebagai tulang punggung keluarga. Akibat kecilnya pendapatan yang diperoleh keluarga hanya sedikit anak yang disekolahkan. Banyak anak yang tidak bersekolah di keluarganya ikut bekerja sekedar menambah pendapatan keluarga Jumlah KK dalam satu rumah > 1 KK. Hal ini dikarenakan mayoritas nelayan tidak ingin hidup jauh dari laut. Sehingga dengan lahan yang terbatas, mereka rela hidup berdesakan di permukiman tersebut.	Over quota dalam rumah, dengan ciri: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Banyaknya jumlah anggota keluarga dalam satu rumah</li> <li>▪ Jumlah KK &gt; 1 dalam satu rumah</li> </ul>
Lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah	Banyak masyarakat setempat yang tidak memiliki surat tanah. Sebagian dari mereka membuat rumah pada lahan garapan, yaitu lahan baru yang dibuka masyarakat untuk digarap. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan status tanah tersebut bagi mereka.	Terbatasnya akses kepemilikan lahan, karena ketidakjelasan status tanah yang digunakan oleh masyarakat.

Sumber: Hasil Analisis, 2006

Berdasarkan kondisi di atas dengan memperhatikan indikator utama kemiskinan, maka sebagian besar masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok mengalami kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi permukimannya, keterbatasan akses pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan sanitasi, air bersih, lemahnya perlindungan terhadap aset usaha, lemahnya jaminan rasa aman dan lain sebagainya. Indikator ini dapat menentukan pola kemiskinan yang terdapat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok.

#### 4.4 Analisis Pola Kemiskinan pada Permukiman Nelayan

Dilihat dari kondisi sosial dan masyarakat di permukiman nelayan di Kelurahan Dompok dapat dilakukan analisis bagaimana pola kemiskinan yang terdapat di permukiman nelayan tersebut.

Adapun berdasarkan karakteristik masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang, pola kemiskinan yang sesuai adalah sebagai berikut:

a. *Kemiskinan sub-sistensi,*

Permukiman nelayan di Kelurahan Dompok mengalami kemiskinan sub-sistensi karena:

- Sebagian besar perumahan di kawasan permukiman nelayan ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Hal tersebut dapat dilihat dari bahan dasar dinding dan lantai rumah yang terbuat dari kayu/papan. Tingkat kepadatan di permukiman ini sebagian besar termasuk pada kategori tinggi. Hal tersebut dapat dilihat pada jarak antar rumah yang hanya 2-5 m. Dengan tingkat kepadatan yang tinggi dan ukuran rumah yang kecil ( $\pm 100 \text{ m}^2$ ) semakin memperjelas adanya kemiskinan di kawasan ini.
- Ketersediaan fasilitas air bersih yang terdapat pada kawasan ini termasuk terbatas. Walaupun air bersih dapat diperoleh dari sumur yang dangkal, namun sumur tersebut masih merupakan milik umum sehingga tidak menimbulkan keleluasaan bagi para penggunanya. Hanya sedikit masyarakat setempat yang memiliki sumur pribadi. Sejumlah 80% masyarakat menggunakan sumur umum untuk mendapatkan air bersih.
- Dari segi pendapatan yang diperoleh maka sebagian besar masyarakat setempat berada dalam kondisi yang cukup baik. Namun sebagian masyarakat berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Hal tersebut terlihat dari ketidakmampuan mereka untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sejumlah 67,5% (menurut responden) penduduk di permukiman nelayan Kelurahan Dompok memiliki pendapatan Rp 200.000-Rp 500.000,- per bulannya.

b. *Kemiskinan perlindungan*

Permukiman nelayan di Kelurahan Dompok mengalami kemiskinan perlindungan karena:



- Dilihat dari segi lingkungan maka kondisi perumahan di permukiman tersebut dapat dikategorikan tidak bagus. Banyaknya masyarakat setempat yang membuang sampah di sungai, semak-semak, pantai dan tidak adanya tempat pembuangan sampah khusus menyebabkan tingkat kebersihan pada kawasan tersebut tidak terjaga.
- Dilihat dari perbandingan antara jumlah fasilitas MCK yang tersedia dengan jumlah perumahan penduduk maka jumlah sarana-prasarana tersebut tidak mencukupi. Namun masyarakat menganggap bahwa kebutuhan mereka telah terpenuhi walaupun mereka dengan menggunakan sumur umum, sumur tetangga, rawa-rawa, pantai dan semak-semak untuk memenuhinya
- Tidak terdapatnya saluran drainase atau pembuangan air kotor. Sehingga air kotor dan sampah rumah tangga langsung dibuang ke semak-semak ataupun sungai/pinggir laut.
- Kondisi kerja para nelayan menjadi buruk karena tidak ada jaminan keselamatan, alat-alat melaut sangat sederhana (kapal dan sebagainya). Sehingga dapat menjadi berbahaya jika cuaca di laut buruk.
- Walaupun rata-rata rumah tersebut merupakan milik pribadi. Namun hak kepemilikan atas tanah yang ditempati bukanlah merupakan hak pribadi melainkan atas nama orang tua atau milik orang lain yang mereka sewa. Selain itu, banyak juga dari masyarakat tersebut yang tidak memiliki sertifikat atau menempati lahan milik orang lain yang tidak mereka kenal. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai “squatters” yaitu hunian yang dibangun diatas tanah bukan haknya (orang lain atau negara) atau disebut dengan hunian liar.

c. *Kemiskinan pemahaman*

Permukiman nelayan di Kelurahan Dompok mengalami kemiskinan pemahaman karena:

- Dilihat dari tingkat pendidikan masyarakat setempat termasuk memprihatinkan. Adanya ketidakseimbangan biaya antara pemenuhan kebutuhan akan pendidikan yang cukup tinggi dengan pendapatan yang

kecil menyebabkan masyarakat sulit untuk memperoleh pendidikan. Selain keterbatasan kemampuan ini, fasilitas yang tersedia hanyalah SD menyebabkan mereka sulit untuk mendapat pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

- *Skill* atau keahlian yang dimiliki oleh penduduknya adalah keahlian sebagai nelayan. Sifat pekerjaan ini adalah warisan/turun temurun. Sehingga masyarakat tidak berniat untuk melakukan perubahan dalam pekerjaan. Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa melaut merupakan warisan yang perlu dijaga dari para leluhurnya.
- Seharusnya adanya TV dan radio mempermudah mereka dalam mengakses berbagai informasi baik dari luar negeri maupun dari berbagai daerah. Namun kemudahan di dalam mengakses informasi tidak diiringi dengan kemampuan intelektual yang bagus, sehingga tidak akan mengoptimalkan potensi yang terdapat pada diri mereka sendiri. Hal tersebut akan mempersulit pengadaan perubahan dan pembaharuan di lingkungannya.

Fenomena kemiskinan yang terjadi di Kelurahan Dompok berdasarkan karakteristik kemiskinan yang telah dibahas pada subbab sebelumnya tidak membentuk pola kemiskinan partisipasi, kemiskinan identitas ataupun kemiskinan kebebasan (lihat teori pola kemiskinan dari Max-neef, tabel 4.11), dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- Masyarakat setempat yang tinggal di permukiman nelayan Kelurahan Dompok memiliki kemauan yang tinggi untuk berorganisasi. Hal tersebut tergambar dari keikutsertaan mereka pada beberapa organisasi. Hanya saja potensi ini belum dapat dioptimalkan karena tidak adanya pembinaan untuk berorganisasi yang baik. Selain itu, keterbatasan pengetahuan, tidak adanya akses dan kontrol menjadi kendala untuk melakukan proses pengambilan keputusan yang menyangkut nasib diri dan komunitas.
- Masyarakat yang berada di permukiman nelayan ini merupakan masyarakat yang berasal dari berbagai suku seperti Jawa, Bugis, dan lain-lain. Pada umumnya suku masyarakat ini adalah Suku Melayu. Walaupun

terjadi perbedaan suku namun hal ini tidak menjadi kendala untuk melakukan interaksi sosial (pembauran). Hal ini disebabkan sifat terbuka Suku Melayu untuk menerima suku lain.

- Walaupun kemiskinan melanda sebagian besar masyarakat di permukiman ini. Namun hal tersebut tidaklah menjadi permasalahan yang berarti bagi mereka. Kemiskinan tidak harus menjadi halangan untuk menikmati kebebasan. Ketenangan dan kesabaran menjadi pegangan untuk menjalani hidup. Bagi masyarakat ini hal yang terpenting adalah berusaha semampunya.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui bagaimana pola kemiskinan yang terdapat di Permukiman Nelayan Kelurahan Dompok.



Sumber: Hasil Analisis, 2006

**GAMBAR 4.5**  
**POLA KEMISKINAN DI PERMUKIMAN NELAYAN**  
**KELURAHAN DOMPAK**

#### 4.5 Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pembentukan Pola Kemiskinan pada Permukiman Nelayan

Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, sehingga dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Begitu juga fenomena kemiskinan yang terjadi di permukiman nelayan Kelurahan Dompok.

Dilihat dari karakteristik permukiman nelayan tersebut dan dengan mengacu pada indikator utama kemiskinan (BAPPENAS) dapat diketahui bahwa akses layanan dan mutu layanan kesehatan perumahan nelayan di Kelurahan Dompok masih sangat rendah. Masyarakat setempat juga belum memiliki perumahan dan lingkungan yang sehat dan layak. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya saluran drainase dan tempat pembuangan sampah, serta sistem

pembuangan air kotor. Dilihat dari akses terhadap air bersih, permukiman nelayan memiliki pelayanan sumber air yang terbatas. Masyarakat setempat hanya menggunakan sumur dangkal yang sebagian besar merupakan milik umum. Untuk menyikapi kondisi kemiskinan ini maka perlu dilakukan suatu tindakan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat dengan cara meminimalisir faktor penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat setempat.

Berdasarkan pola kemiskinan yang terdapat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok, maka penyebab kemiskinan di daerah tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal dari masyarakat di permukiman tersebut.

Faktor penyebab internal dari kemiskinan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Faktor sosial

Pola hidup masyarakat yang tidak perhatian terhadap kebersihan lingkungan menyebabkan lingkungan permukiman menjadi buruk dan tidak sesuai standar kesehatan. Hal ini diperparah dengan adanya keterbatasan prasarana umum seperti drainase, saluran sanitasi maupun tempat pembuangan sampah.

Selain itu, sebagian besar penduduk di permukiman ini tidak mempunyai hak milik yang sah terhadap lahan yang mereka tempati (*squatters*). Oleh karena itu, mereka merasa tidak harus membayar biaya penyediaan dan pemakaian fasilitas pelayanan. Sementara itu pemerintah enggan untuk menyediakan pelayanan seperti saluran air bersih, listrik dan saluran air kotor untuk mereka.

2. Faktor ekonomi

Masyarakat setempat di permukiman nelayan memiliki pendapatan yang kecil bila dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Pendapatan nelayan sangat bergantung pada kondisi cuaca ataupun musim. Sedangkan dari pendapatan pokok ditambah dengan pendapatan sampingan belum tentu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Selain itu, pola hidup 'boros' juga menyebabkan penduduk di permukiman nelayan selalu kekurangan pendapatan. Bila pendapatan yang diperoleh agak tinggi, kelebihan dari pendapatan tersebut tidak mereka tabung sehingga tak jarang sistem yang mereka gunakan adalah sistem "*gali lubang tutup lubang*".

Akibatnya tingkat kemiskinan semakin meningkat karena banyak masyarakat yang terkena pinjam-meminjam dengan bunga yang tinggi.

3. Faktor pendidikan.

Keterbatasan pendidikan menyebabkan masyarakat setempat tidak memiliki keahlian (*skill*) selain dari keahlian dalam menangkap ikan. Hal tersebut menyebabkan sempitnya kesempatan mereka untuk bekerja di luar sektor perikanan. Padahal realitas menunjukkan bahwa penghasilannya yang diperoleh masyarakat setempat belum dapat memenuhi kebutuhannya. Di sisi lain, apabila masyarakat tersebut memiliki keterampilan dan keahlian maka keahlian tersebut dapat digunakan untuk meningkat nilai guna hasil tangkapan laut.

Sedangkan faktor penyebab eksternal dari kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Sistem administrasi pemerintah

Dilihat dari geografis, lokasi permukiman dapat dikategorikan sebagai wilayah *hinterland*. Hal ini disebabkan lokasi yang terletak cukup jauh dari pusat kota. Jauhnya lokasi ini menyebabkan permukiman ini luput dari perhatian pemerintah terutama di dalam penyediaan sarana dan prasarana permukiman. Selain itu, standar pemerintah untuk pelayanan kota biasanya terlalu tinggi, sehingga membutuhkan biaya yang tinggi untuk mendapatkan pelayanannya. Kecilnya pendapatan masyarakat setempat menyebabkan mereka jarang untuk mendapat pelayanan yang disediakan pemerintah. Hanya segelintir masyarakat yang dapat memanfaatkan pelayanan yang telah disediakan oleh pemerintah.

2. Penyediaan pelayanan Pemerintah

Kurangnya perhatian pemerintah menyebabkan penyediaan sarana dan prasarana di permukiman nelayan Kelurahan Dompok sangat minim. Akses masyarakat terhadap layanan publik pun menjadi sangat sulit. Kondisi ini menyebabkan kemiskinan internal masyarakat menjadi lebih parah.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui faktor yang mempengaruhi kemiskinan masyarakat setempat ada 2 macam yaitu: faktor internal yang terdiri dari faktor ekonomi, sosial, dan pendidikan. Sedangkan faktor eksternal (sebab dari luar wilayah) terdiri dari sistem administrasi pemerintah dan penyediaan pelayanan pemerintah. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut diharapkan dapat menjadi input dalam menentukan langkah-langkah mengurangi kemiskinan bagi masyarakat setempat.

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1 Temuan Studi**

Masyarakat yang tinggal di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang merupakan salah satu cerminan kondisi daerah pinggir (*hinterland*) yang terletak jauh dari pusat kota. Adapun temuan-temuan studi yang di dapat dari penelitian tentang pola kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang berdasarkan hasil observasi dan analisis adalah sebagai berikut:

- a. Dilihat dari kondisi permukiman masyarakatnya, sebagian permukiman masyarakat setempat berada dalam kondisi kumuh. Sejumlah 85% masyarakat menggunakan bahan dasar kayu untuk lantai dan dinding rumah. Tingkat kepadatan umumnya cukup tinggi dengan jarak antar rumah hanya sekitar 2-5 m.
- b. Sarana-prasarana yang ada pada permukiman tersebut cukup minim. Tidak ada saluran drainase, tidak ada saluran pembuangan air kotor serta sedikitnya jumlah masyarakat setempat yang memiliki tempat pembuangan sampah pribadi.
- c. Masyarakat mayoritas (90%) bekerja sebagai nelayan. Adapun tingkat pendapatan, masyarakat 67,5 % berpendapatan hanya Rp 200.000 – Rp 500.000/per bulan sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- d. Tingkat pendidikan masyarakat sangat rendah yaitu hanya mencapai SD. Bahkan banyak dijumpai masyarakat setempat yang belum bersekolah. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk pendidikan bagi masyarakat terbatas. Walaupun begitu, akses masyarakat setempat untuk memperoleh informasi tidak sulit. Masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dari media elektronik seperti TV dan radio miliknya.



- e. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam berorganisasi cukup tinggi. Banyak masyarakat setempat yang tidak hanya terlibat pada suatu organisasi namun terlibat pada beberapa organisasi.
- f. Dengan memperhatikan indikator utama kemiskinan yang dibuat oleh BAPPENAS, maka sebagian besar masyarakat yang tinggal di permukiman nelayan dapat dikategorikan kepada masyarakat miskin ilmu pengetahuan, minim pelayanan kesehatan, miskin keahlian, minim sarana dan prasarana lingkungan permukiman, miskin air bersih, minim pengelolaan sumber daya alam, miskin keamanan, overquota anggota keluarga dalam rumah, dan terbatasnya akses kepemilikan tanah..

## 5.2 Kesimpulan

Berdasarkan temuan studi yang di dapat di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa pola kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok adalah:

- a. Kemiskinan sub-sistensi, karena mayoritas (67,5%) pendapatan masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok yang rendah, kondisi perumahan yang tidak layak (85% rumah terbuat dari kayu, non-permanen) dan minimnya fasilitas air bersih.
- b. Kemiskinan perlindungan, dimana lingkungan permukiman nelayan yang buruk (sanitasi, sarana pembuangan sampah, polusi), minim sarana dan prasarana, dan tidak adanya jaminan atas hak pemilikan tanah (mayoritas status tanah sebagai tanah garapan).
- c. Kemiskinan pemahaman, kualitas pendidikan formal buruk (rendah), karena masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok mengalami keterbatasan pemahaman yang menyebabkan terbatasnya kesadaran atas kebersihan lingkungan tempat tinggalnya, dan tidak memiliki upaya, kemampuan dan potensi untuk mengupayakan perubahan dalam mata pencaharian.

Berdasarkan pola kemiskinan masyarakat di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang, diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan tersebut terdiri dari faktor internal seperti adalah (1) Faktor ekonomi, yakni rendahnya pendapatan yang diperoleh dan keterbatasan *skill* (keahlian); (2) Faktor Sosial, yakni pola hidup masyarakat nelayan yang tidak peduli kebersihan lingkungan dan keinginan untuk hidup di tepi laut, dan tidak adanya kepemilikan lahan yang jelas; serta (3) Faktor pendidikan, yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki. Selain itu, terdapat faktor eksternal yang mempengaruhi terbentuknya kemiskinan di permukiman nelayan seperti faktor administrasi pemerintah dan penyediaan pelayanan pemerintah.

Oleh karena itu, untuk menyikapi kondisi kemiskinan yang terjadi di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang ini maka perlu dilakukan suatu tindakan peningkatan taraf hidup masyarakat setempat dengan cara meminimalisir faktor penyebab terjadinya kemiskinan masyarakat setempat. Sehingga apabila pengentasan kemiskinan dilakukan sesuai dengan pola kemiskinan dan faktor penyebabnya masing-masing, maka upaya tersebut dapat lebih optimal.

### **5.3 Rekomendasi**

Kemiskinan merupakan isu pembangunan yang kompleks dan kontradiktif, baik dari segi perspektif kebijakan ataupun segi sosial untuk mengatasinya. Oleh karena itu, guna pengentasan kemiskinan di permukiman nelayan Kelurahan Dompok Kota Tanjungpinang yang lebih optimal, diberikan rekomendasi penelitian sesuai dengan temuan studi yang didapat di lapangan, sebagai berikut:

**TABEL V.1**  
**REKOMENDASI PENELITIAN**

TEMUAN STUDI	REKOMENDASI	PELAKU KEGIATAN
Pendapatan masyarakat yang rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelatihan keahlian melaut</li> <li>▪ Pengembangan hasil perikanan yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan tanpa tergantung musim dan cuaca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah</li> <li>▪ Masyarakat</li> </ul>
Terbatasnya sarana dan prasarana permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ membuka dan mempermudah akses masyarakat setempat untuk memperoleh pelayanan publik (<i>access to public services</i>).</li> <li>▪ mengembangkan dan meningkatkan kualitas pelayanan terutama bagi daerah-daerah yang jauh dari pelayanan pemerintah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah (dinas-dinas yang terkait pelayanan publik)</li> </ul>
Rendahnya tingkat pendidikan dan terbatasnya keahlian tambahan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ memberikan simultan kepada masyarakat setempat untuk meningkatkan pendidikannya</li> <li>▪ memberikan akses bagi masyarakat yang ingin meneruskan pendidikannya namun kesulitan dalam hal pendanaan.</li> <li>▪ Pelatihan guna peningkatan keahlian tambahan dari para nelayan/masyarakat setempat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah</li> <li>▪ Organisasi Kemasyarakatan</li> </ul>
Tidak adanya jaminan atas kepemilikan tanah	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ menginventaris kembali kepemilikan lahan di permukiman nelayan. Masyarakat yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan, pemerintah dapat mempermudah kepengurusan sertifikat tersebut. Bagi masyarakat yang tinggal pada lahan orang lain, maka dapat masyarakat tersebut dapat dialokasikan kepada lahan yang sesuai.</li> <li>▪ Masyarakat setempat mengakomodir keinginannya serta lingkungannya dengan berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemerintah melalui organisasi atau forum yang telah disediakan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pemerintah</li> <li>▪ Masyarakat</li> <li>▪ Organisasi Kemasyarakatan</li> </ul>

Sumber: Penyusun, 2006

## DAFTAR PUSTAKA

- Ala, Andre Bayo. 1996. *Kemiskinan dan Strategi Memerangi Kemiskinan*. Yogyakarta : Liberty.
- Auslan, Patrick Mc. 1986. *Tanah Perkotaan dan Perlindungan Rakyat Jelata*. Jakarta : Gramedia.
- Baker, David. 1980. "Memahami Kemiskinan di Kota : Masa Apung di Kota". *PRISMA*. No. 6 Tahun VIII.
- Blaang, C. Djemabut. 1986. *Perumahan dan Permukiman sebagai Kebutuhan Pokok*. Jakarta : Yayasan Obor.
- Bremen, J. 1980. *The Informal Sector in Research Theory and Practice*. New Jersey : Prentice-Hall Inc
- Budihardjo, Eko. 1984. *Sejumlah Masalah Permukiman Kota*. Cetakan I. Bandung : Penerbit Alumni.
- \_\_\_\_\_ . 1986. *Arsitektur dan Kota di Indonesia*. Cetakan III. Bandung : Penerbit Alumni.
- \_\_\_\_\_ . 1997. *Lingkungan Binaan dan Tata Ruang Kota*. Cetakan I. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- \_\_\_\_\_ . 1997. *Tata Ruang Perkotaan*. Bandung : Penerbit Alumni.
- \_\_\_\_\_ . 1998. *Percikan Masalah Arsitektur Perumahan Perkotaan*. Yogyakarta : Gajahmada University Press.
- Budihardjo, Eko dan Sudanti Hardjohudojo. 1993. *Kota Berwawasan Lingkungan*. Cetakan III. Bandung : Penerbit Alumni.
- Budihardjo, Eko dan Djoko Sujarto. 1998. *Kota yang Berkelanjutan (Sustainable City)*. Jakarta : Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Budihartono. 1993. *Pola Permukiman di Jakarta dengan Tekanan pada Kehidupan Kampung*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Chambers, Robert. 1983. *Rural Development : Putting The Last First*. New York : Longman Inc.

- Esmara, Hendra. 1986. *Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Friedman, J and Sullivan, F. 1974. *The Absorbtion of Labour in The Urban Economy : The Case of Developing Country*. New Jersey : Prentice-Hall Inc.
- Herlianto. 1997. *Urbanisasi Pembangunan dan Kerusakan Kota*. Bandung : Penerbit Alumni.
- Irwanto, dkk. 1995. *Pekerja Anak di Tiga Kota Besar : Jakarta, Surabaya dan Medan*. Jakarta : Pusat Penelitian Unika Atma Jaya – UNICEF.
- Jansen, Clifford. 1969. *Some Sociological Aspect of Migration*. Cambridge : The University Press.
- Levitan, San. A. 1980. *Programs in Aid of The Poor far The 1980's : Policy Studies Employment and Welfare No. 1 Fourth Edition*. London : The Jhones Hopkins University Press
- Nientied, P et. al. 1982. *Karachi Square Settlement Upgrading*. Amsterdam : Virje Universiteit.
- Permadi, Gunawan, dkk. 1999. *Selinting Ganja di Tangan*. Semarang : Yayasan Duta Awam bersama Terre des Homes Netherlands.
- Purbo, Hasan. 1993. *Katalis Fasilitator Pembangunan dan Konsultan Pembangunan, Dua Sejoli Untuk Menghadapi Tantangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Waktu Mendatang*. Jakarta : Masyarakat Jurnal Sosiologi Jurusan Fisiologi FISIP UI dengan Gramedia Pustaka Utama.
- Rachbini, Didik J, dkk. 1994. *Ekonomi Informal Perkotaan : Gejala Involusi Gelombang Kedua*. Jakarta : LP3ES.
- Ridlo, Muhammad Agung. 1990. *Evaluasi Pemukiman Kembali (Resettlement) Masyarakat Miskin (Daerah Studi : permukiman YSS Mangunharjo dan Mayangsari di Kota Semarang)*. Skripsi tidak diterbitkan. Jurusan Teknik Planologi Universitas islam Bandung.
- 
- \_\_\_\_\_ . 1995. *Masalah, Gagasan dan Strategi Perencanaan Pembangunan Kota – Desa*. Kumpulan Essay penulis di beberapa media surat kabar di Indonesia tidak diterbitkan. Semarang.

- \_\_\_\_\_. 2001. *Kemiskinan di Perkotaan*. Semarang : Unissula Press.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Karakteristik Kemiskinan Perkotaan pada Permukiman Kumuh dan Liar Kota Semarang*. Tesis tidak diterbitkan. Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro Semarang.
- Rietveld, Piet, dkk. 1988. *Mobilitas Ulang-Alik Penduduk Pedesaan (Suatu Studi Kasus di Kabupaten Boyolali Jawa Tengah)*. Semarang : Satya Wacana.
- Salim, Emil. 1984. *Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan*. Jakarta : Inti Idayu Press.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 1987. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta : Rajawali.
- Sasmita, Ginanjar. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat : Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta : Pustaka Cidesindo.
- Sayogyo. 1996. *Garis Kemiskinan dan Kebutuhan Minimum Pangan*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Siagian. 1989. *Perencanaan Pembangunan (Suatu Pengantar)*. Semarang : Satya Wacana.
- Silas, Johan. 1993. *Permukiman Kumuh di Jakarta : Tinjauan Kontradiktif-Komparatif*. Jakarta : Masyarakat Jurnal Sosiologi Jurusan Fisiologi FISIP UI dengan Gramedia Pustaka Utama.
- Subakti, A. Ramlan. 1984. "Kemiskinan di Kota dan Program Perbaikan Kampung : Kota Bermuka Dua". *PRISMA*. No. 5 tahun XIII.
- Soegijoko, Boedhi Tjahjati S. dan B.S. Kusbiantoro. 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia (mengenang Prof. Dr. Soegijanto Soegijoko)*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Soetrisno, Loekman. 1997. *Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan*. Yogyakarta : Penerbit Kanisius.
- \_\_\_\_\_. 1999. *Jalan Kemanusiaan – Panduan Untuk Memperkuat Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : Laperia Pustaka Utama.
- Stone, Clarence N et al. 1979. *Urban Policy and Politics in A Bureaucratic Age*. New Jersey : Prentice-Hall Inc.

- Suharto, Bahar. 1993. *Pengertian, Fungsi, Format Bimbingan dan Cara Penulisan Karya Ilmiah*. Bandung : Tarsito.
- Suparlan, Supardi. 1995. *Kebudayaan Kemiskinan dalam Kemiskinan di Perkotaan : Bacaan Untuk Antropologi Perkotaan*. Yogyakarta : YOI.
- Supriyatna, Tjahya. 1997. *Birokrasi Pemberdayaan dan Pengentasan Kemiskinan*. Bandung : Humaniora Utama Press.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Taylor, John L. Kampung-Kampung Miskin dan Tempat Pengelompokan Liar di Kota-Kota Asia Tenggara. *PRISMA*. No. 7 Desember 1972.
- Twikromo, Y. Argo. 1999. *Pemulung Yogyakarta – Konstrksi Marginalitas dan Perjuangan Hidup dalam Bayang-Bayang Budaya Dominan*. Yogyakarta : Media Presindo.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 mengenai Perumahan dan Permukiman.
- Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 mengenai Penataan Ruang.
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
- Wie, Thee Kian. 1983. *Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan : Beberapa Pendekatan Alternatif*. Jakarta : LP3ES.
- Yudohusodo, Siswono. 1990. *Tumbuhnya Permukiman-Permukiman Liar di Daerah Perkotaan sebagai Akibat dari Urbanisasi yang Tinggi*. Sinopsis pada Seminar Hunian Liar di Perkotaan. Jakarta.
- Yudohusodo, Siswono, dkk. 1991. *Perumahan Untuk Seluruh Rakyat*. Jakarta : INKOPPOL.
- Yunus, Hadi Sabari. 2000. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Data-data Bidang Perumahan dan Permukiman*. Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat Jakarta. 1993.

*Identifikasi dan Indikasi Lokasi Kawasan Kumuh di 6 (enam) Kota/Kabupaten di Jawa Tengah.* Proyek Strategi Penanganan Kawasan. Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. 2000.

*Karakteristik Kemiskinan di Kotamadya Bandung : Kasus Studi Lingkungan Cikapundung, Lingkungan Sukapada, Kampung Pangaritan.* Tugas Mata Kuliah : Seminar Prinsip Perencanaan. Jurusan Teknik Planologi FTSP-ITB Bandung. 1992.

*Kepulauan Riau dalam Angka 1999.* Bappeda Kabupaten Kepulauan Riau dan BPS Kepulauan Riau. 1999.

*Penjelasan Umum : Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).* Tim Persiapan P2KP Jakarta. 1999.

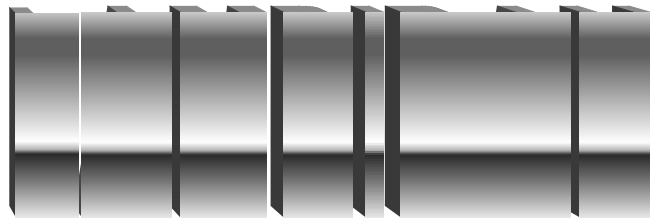
*Penyiapan Masyarakat, Survey, Pengukuran dan Penggambaran Program Penataan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kotamadya Semarang.* Laporan Identifikasi (Rencana Paket Pekerjaan dan Pendampingan Masyarakat). Proyek Peningkatan Prasarana Permukiman Jawa Tengah, Departemen Pekerjaan Umum, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Semarang. 1998.

*Permukiman Kumuh dalam Kaitannya dengan Lapangan Kerja Sektor Informal.* Proyek Penelitian dan Pengembangan Regional Jawa Tengah. Fakultas Teknik Undip Semarang. 1990.

*Profil Kemiskinan di Indonesia.* Biro Pusat Statistik (BPS) Pusat Jakarta. 2000.

*Program Penanganan Kawasan Kumuh Kotamadya Dati II Semarang : Laporan Pendampingan.* Proyek Peningkatan Prasarana Permukiman Jawa Tengah, Departemen Pekerjaan Umum, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. Semarang. 1998.





**(FORM KUESIONER MASYARAKAT)**

**DAFTAR PERTANYAAN (KUESIONER)**  
**(Pola Kemiskinan Nelayan Di Kelurahan Dompok Tanjungpinang)**

**Petunjuk Umum Pengisian :**

1. Daftar Pertanyaan ini sebaiknya diisi oleh Kepala Keluarga atau anggota keluarga lainnya yang sudah dewasa.
2. Pilih salah satu jawaban untuk pertanyaan yang berupa pilihan dengan memberikan tanda silang (X).
3. Jika dalam daftar jawaban tidak ada yang sesuai, maka dapat diisi dengan pendapat anda sendiri pada tempat yang tersedia.
4. Untuk pertanyaan yang berupa isian, agar diisi dengan jawaban yang singkat, padat dan jelas.

Data Responden :

Nama : .....

Umur : .....

Alamat : .....

**A. Latar Belakang Responden dan Keluarga**

**A.1. Kepala Keluarga**

1. Nama Kepala Keluarga : .....

Umur : .....

Jenis Kelamin : Laki-laki / Perempuan

2. Pendidikan Terakhir Kepala Keluarga :

? Tidak sekolah / tidak tamat SD

? Tamat SD

? Tamat D3

? Tamat SLTP

? Tamat SI

? Tamat SLTA

? Tamat S2 / S3

## 3. Pekerjaan utama Kepala Keluarga :

- |                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| ? PNS / TNI                    | ? Wiraswasta (sebut jenisnya)     |
| ? Karyawan Perusahaan / Swasta | .....                             |
| ? Buruh Industri / bangunan    | ? Tidak bekerja / pensiunan ..... |
| ? Pedagang (sebut jenisnya)    | ? Lain-lain (sebutkan) .....      |
| .....                          |                                   |

**A.2. Anggota Keluarga**

## 4. Sebutkan jumlah anggota keluarga yang tinggal satu rumah :

- |                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| ? Isteri ..... orang  | ? Pembantu ..... orang |
| ? Anak ..... orang    | ? Lainnya ..... orang  |
| ? Saudara ..... orang |                        |

## 5. Sebutkan anggota keluarga terakhir yang tinggal satu rumah :

Anggota Keluarga	Pendidikan Terakhir (tamat)						
	Tidak SD	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2 / S3
Isteri							
Anak							
Saudara							
Lainnya							

Petunjuk : beri tanda silang (X)

6. Sebutkan pekerjaan anggota keluarga yang tinggal satu rumah :

Anggota Keluarga	Pekerjaan						
	PNS / TNI	Karyawan	Pedagang	Buruh	Wiraswasta	Pensiunan	Lain
Isteri							
Anak I							
Saudara							
Lainnya							

Petunjuk : Jika berkarja beri tanda silang (X)

Jika bekerja, tidak perlu di isi

7. Beberapa penghasilan anggota keluarga setiap bulan :

Anggota Keluarga	Penghasilan setiap bulan (Rp)					
	- 200 ribu	200-500 ribu	500 ribu-1 juta	1 - 2 juta	2 – 5 juta	lebih 5 juta
Isteri						
Anak I						
Saudara I						
Lainnya						

Petunjuk : beri tanda silang (X)

Jika belum bekerja dan belum punya penghasilan, tidak perlu di isi.

## B. Pola Kemiskinan

### B.1. Pendapatan

8. Penghasilan Kepala Keluarga tiap bulan :
- |                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| ? Kurang dari 200 ribu | ? 1 – 2 juta        |
| ? 200 – 500 ribu       | ? 2 – 5 juta        |
| ? 500 – 1 juta         | ? lebih dari 5 juta |
9. Berapakah penghasilan rata-rata saudara setiap hari berdasarkan hasil pengkapan ikan ?
- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| ? 50 ribu                | ? 100 ribu       |
| ? 100 – 150 ribu         | ? 150 – 200 ribu |
| ? Lainnya sebutkan ..... |                  |
10. Apakah saudara dapat mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari dengan pendapatan saudara tersebut ?
- |                                   |
|-----------------------------------|
| ? Dapat mencukupi kebutuhan       |
| ? Tidak dapat mencukupi kebutuhan |
- Jika tidak*, bagaimanakah usaha saudara agar dapat mencukupi kebutuhan keluarga? .....
- .....

### B.2. Pekerjaan

11. Selain sebagai nelayan sebagai pekerjaan utama, apakah pekerjaan sampingan yang saudara lakukan ?
- |                               |
|-------------------------------|
| ? Berkebun                    |
| ? Berternak                   |
| ? Lain-lain, disebutkan ..... |

12. Apakah saudara dapat mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari dengan pekerjaan utama dan sampingan saudara tersebut ?

? Dapat mencukupi kebutuhan

? Tidak dapat mencukupi kebutuhan

*Jika tidak*, bagaimanakah usaha saudara agar dapat mencukupi kebutuhan keluarga? .....

.....

13. Apakah masyarakat di lingkungan sekitar saudara juga berprofesi sama seperti saudara ?

? Sama

? Tidak sama

### **B.3. Pendidikan**

14. Bagaimana tingkat pendidikan saudara?

? SD

? SLTP

? SLTA

? Diploma

? Sarjana

15. Bagaimana tingkat pendidikan rata-rata masyarakat dilingkungan permukiman saudara ?

? SD

? SLTP

? SLTA

? Diploma

? Sarjana

### **B.4. Kondisi Rumah**

16. Bagaimana status kepemilikan rumah saudara?

? Rumah sendiri

? Kontrak

? Rumah orangtua

? Sewa

? Rumah saudara selain orangtua

? Lainnya: .....

17. Bagaimana status tanah rumah yang saudara huni ?
- ? Hak milik
  - ? Hak pakai
  - ? Hak guna Bangunan
  - ? Hak Guna Usaha
  - ? Lainnya .....
18. Berapakah luas kapling tanah / rumah yang saudara huni (Jawaban boleh lebih dari satu)?
- Luas kapling: ..... m<sup>2</sup> atau**  
 Ukuran kapling : ..... x .....m<sup>2</sup>
19. Berapa perbandingan antara luas bangunan dan luas tanah yang ditempati?
- |                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| ? Lebih dari 90 % | ? 70 % - 60 %      |
| ? 90 % - 80 %     | ? 60 % - 60 %      |
| ? 80 % - 70 %     | ? Kurang dari 50 % |
20. Berapa luas halaman atau perkarangan kosong rumah?
- |   |   |
|---|---|
| ? Kurang dari 10 m <sup>2</sup>         | ? 60 m <sup>2</sup> – 100 m <sup>2</sup>  |
| ? 10 m <sup>2</sup> – 30 m <sup>2</sup> | ? 100 m <sup>2</sup> – 300 m <sup>2</sup> |
| ? 30 m <sup>2</sup> – 60 m <sup>2</sup> | ? Lebih dari 300 m <sup>2</sup>           |
21. Bagaimana kondisi dinding rumah saudara?
- ? Seluruhnya terbuat dari kayu
  - ? Sebagian kayu dan sebagian dinding batu bata
  - ? Seluruhnya batu bata.

22. Bagaimana kondisi lantai rumah saudara?

- ? Tanah.
- ? Perkerasan semen.
- ? Lantai ubin.
- ? Keramik.

23. Apakah rumah saudara memiliki kamar mandi dan WC sendiri?

- ? Dapat mencukupi kebutuhan.
- ? Tidak dapat mencukupi kebutuhan.

*Jika tidak*, dimanakah saudara mandi dan buang air?

.....

24. Apakah rumah saudara telah disambungkan dengan listrik dari PLN?

- ? Sudah, melalui sambungan sendiri.
- ? Sudah, melalui sambungan dari tetangga.
- ? Belum.

25. Dari manakah saudara mendapatkan air bersih?

- ? Dari langganan PDAM sendiri.
- ? Dari sumur timba sendiri.
- ? Dari sumur pompa sendiri.
- ? Dari kran umum.
- ? Dari sumur umum.
- ? Dari sumber lainnya: .....

26. Dimanakah anda membuang sampah ?

- ? Bak sampah sendiri
- ? Bak sampah lingkungan
- ? Sungai
- ? Lainnya .....





32. Berapakah jarak antara rumah saudara dengan rumah tetangga ?
- ? 3 – 5 meter
  - ? 5 meter
  - ? 1 – 2 meter
  - ? Kurang dari 1 meter
  - ? Lainnya: .....
33. Jenis sarana air bersih apakah yang terdapat di sekitar rumah anda?
- ? Kran umum.
  - ? Sumur umum.
  - ? Sungai.
  - ? Jenis lainnya: .....
34. Dimanakah anda menjemur pakaian yang dicuci ?
- ? Ruang jemuran sendiri
  - ? Ditepi jalan sekitar lingkungan
  - ? Pagar rumah
  - ? Lainnya .....
35. Apakah disekitar lingkungan anda memiliki tempat untuk membuang sampah ?
- ? Memiliki
  - ? Tidak memiliki
- Jika tidak***, dimanakah masyarakat membuang sampah?  
 .....
36. Adakah saluran drainase dilingkungan permukiman anda ?
- ? Ada
  - ? Tidak
37. Bagaimanakah kondisi drainase di lingkungan perumahan anda ?
- ? Baik / lancar
  - ? Sedang
  - ? Macet

38. Bagaimana Kondisi jalan di depan pekarangan rumah anda ?
- ? Aspal
  - ? Paving
  - ? Beton
  - ? Tanah
  - ? Pelantar / jembatan
39. Kebutuhan air bersih di lingkungan tempat tinggal saudara dilayani oleh ?
- ? PDAM
  - ? Sumur dangkal
  - ? Sumur artesis
  - ? Kran Umum
  - ? Lain-lain (sebutkan) .....
40. Bagaimana system pembuangan air kotor (*sewerage*) dilingkungan tempat tinggal saudara ?
- ? Septitank individu
  - ? septitank umum
  - ? Sungai
  - ? Riol kota
  - ? Lain-lainnya (sebutkan) .....
41. Alat yang dipergunakan sebagai penerangan dilingkungan tempat tinggal saudara adalah ?
- ? Listrik (PLN)
  - ? Petromak
  - ? Lampu minyak.
  - ? Lainnya .....

42. Bagaimana struktur kelembagaan di lingkungan permukiman saudara ? (Jawaban boleh dari satu)
- ? Berjalan dengan baik
  - ? Belum ada struktur
  - ? Tidak punya struktur
  - ? Lainnya .....
43. Organisasi kemasyarakatan apa saja yang berjalan dengan baik di lingkungan tempat tinggal saudara ? (jawaban boleh lebih dari satu) :
- ? Rukun Warga (RW)
  - ? Pemuda
  - ? Rukun Tetangga
  - ? Dasa Wisma
  - ? PKK
  - ? Lainnya (sebutkan) .....
44. Siapakah yang mengatur penataan kawasan di lingkungan permukiman saudara ?
- ? Diatur oleh suatu organisasi masyarakat
  - ? Tidak ada pengaturan
  - ? Lainnya .....